

BAB V

PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN DAN MODEL STRATEGI PENGELOLAAN PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN RIMBA BERBASIS BUDAYA LOKAL

A. Pembahasan Temuan Penelitian

Dalam pembahasan temuan penelitian ini, akan dibahas secara rinci terhadap tujuh hal pokok. Ketujuh hal pokok tersebut adalah: (1) Profil eksternal pendidikan dilihat dari aspek geografis, demografis, ekonomis, sosial, dan budaya (2) Profil internal pendidikan terutama dalam kaitannya dengan keadaan pendidikan dan pengelolaan pendidikan (3) Pandangan Orang Rimba terhadap pendidikan (4) Peran Perempuan Rimba kaitannya dengan pendidikan (5) Strategi pengelolaan pendidikan dalam upaya pemberdayaan Perempuan Rimba (6) Faktor-faktor strategis dalam pengelolaan pendidikan untuk pemberdayaan Perempuan Rimba (7) Dampak dari strategi pengelolaan pendidikan terhadap pemberdayaan Perempuan Rimba.

1. Profil Eksternal Pendidikan Dilihat dari Aspek Geografis, Demografis, Ekonomis, Sosial, dan Budaya

Faktor-faktor eksternal pendidikan dilihat dari aspek geografis, demografis, ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan TNBD yang meliputi wilayah Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Sarolangun, KPA Sokola, dan KKI Warsi rata-rata kondisinya hampir sama dan berpengaruh terhadap pemberdayaan Perempuan Rimba. Dalam pembahasan tentang profil eksternal ini akan diuraikan satu persatu untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan.

Pertama dari aspek geografis, TNBD merupakan salah satu kawasan hutan hujan tropis dataran rendah di Provinsi Jambi. Keadaan topografi taman nasional ini datar sampai bergelombang sedang, dengan bukit/gunung seperti Bukit Suban, Sungai Punai (± 164 m. dpl), Gunung Panggang (± 328 m. dpl), dan Bukit Kuran (± 438 m. dpl). Masyarakat asli Orang Rimba telah mendiami hutan TNBD selama puluhan tahun. Orang Rimba menyebut hutan yang ada di TNBD sebagai daerah pengembaraan, dimana mereka berinteraksi dengan alam, saling memberi, memelihara, dan menghidupi. Kawasan yang didiami oleh Orang Rimba ini secara geografis adalah kawasan yang dibatasi oleh Batang Tabir di sebelah Barat, Batang Tembesi disebelah Timur, Batang Hari disebelah Utara, dan Batang Merangin di sebelah Selatan. Selain itu kawasan ini terletak di antara beberapa jalur perhubungan yaitu: Lintas Tengah Sumatera, Lintas Tengah antara kota Bangko-Muaro Bungo-Jambi, dan lintas Timur Sumatra. Dengan letak yang demikian, maka dapat dikatakan kawasan ini berada di tengah-tengah Provinsi Jambi.

Selama ini secara tidak resmi, suku-suku bangsa yang ada di Indonesia digolongkan menjadi tiga, yaitu: (1) Golongan Suku Bangsa, (2) Golongan Minoritas dan (3) Golongan Masyarakat Terasing. Khusus menyikapi masalah golongan masyarakat terasing menurut Departemen Sosial (1989), didefinisikan sebagai: “.....masyarakat yang terisolasi dan memiliki kemampuan terbatas untuk berkomunikasi dengan masyarakat-masyarakat lain yang lebih maju, sehingga karena itu bersifat terbelakang serta tertinggal dengan proses mengembangkan kehidupan ekonomi, politik, sosial-budaya, keagamaan, dan ideologi”. Dari

definisi tersebut Orang Rimba dapat dikategorikan masyarakat terasing. Kondisi ini sejalan dengan yang dikemukakan (Koentjaraningrat, 1993) bahwa:

Asal mula adanya masyarakat terasing dapat dibagi dua yaitu; Pertama dengan menganggap bahwa masyarakat terasing itu merupakan sisa-sisa dari suatu produk lama yang tertinggal di daerah-daerah yang tidak dilewati penduduk sekarang. Kedua bahwa mereka merupakan bagian dari produk sekarang yang karena peristiwa-peristiwa tertentu diusir atau melarikan diri ke daerah-daerah terpencil sehingga mereka tidak mengikuti perkembangan dan kemajuan penduduk sekarang.

Pendapat tentang penyebutan masyarakat terasing tersebut berubah dengan dikeluarkannya Keppres No. 111 tahun 1999 tentang pembinaan Komunitas Adat Terpencil, istilah untuk menyebut masyarakat terasing berubah menjadi KAT karena oleh sebagian kalangan masyarakat memiliki kesan kurang tepat sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan tetap dengan sasaran yang sama.

Perempuan Rimba mendiami wilayah hutan di TNBD sudah bertahun-tahun secara turun temurun. Wilayah hutan ini jaraknya cukup jauh dari daerah atau wilayah kabupaten terdekat, sulit dijangkau karena akses infrastruktur yang belum memadai atau belum ada, akses informasi terbatas, hal ini yang menyebabkan kondisi Perempuan Rimba masih termarginalkan. Sesuai dengan tempat tinggal Perempuan Rimba dan beragam asal usul Orang Rimba, dapat diyakini penyebab mereka tinggal di pedalaman hutan karena berbagai sebab dan asal usul sehingga menyebabkan Orang Rimba bersama anggota keluarga dan kelompoknya telah menghuni hutan selama bertahun-tahun.

Kenyataan kondisi ini seharusnya menjadikan perhatian berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah agar mengalokasikan dana secara khusus untuk

pembangunan infrastruktur di wilayah tempat tinggal Orang Rimba. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu:

- Pertama, sesuai dengan letak kawasan TNBD yang berada di tengah-tengah Provinsi Jambi dapat dijadikan sarana penghubung yang strategis.
- Kedua, jika kebutuhan jalan penghubung dan sarana komunikasi serta sarana perhubungan lainnya memadai dapat membantu akses pendidikan bagi Orang Rimba dan akses untuk pemberdayaan Perempuan Rimba.
- Ketiga, dengan infrastruktur yang memadai dapat menjadikan peluang TNBD menjadi kawasan wisata sekaligus sebagai upaya mempromosikan budaya dan kearifan lokal Orang Rimba.

Kedua dari aspek demografis, jumlah penduduk Orang Rimba belum diketahui secara pasti jumlahnya, data yang ada juga belum akurat. Jumlah penduduk Orang Rimba ada beberapa versi baik menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Daerah, Dinas Sosnakertrans maupun oleh LSM setempat. Hal ini disebabkan oleh penyebaran Orang Rimba yang tidak merata dan selalu berpindah-pindah karena budaya melangun, dan ini menyebabkan akses pendidikan menjadi sulit karena anak didiknya harus mengikuti orangtuanya berpindah tempat.

Dengan kenyataan di atas, seharusnya segera dilakukan pendataan dan pemetaan penduduk rimba agar dapat diketahui data anak-anak rimba usia sekolah guna menunjang pembangunan akses pendidikan. Untuk mendapatkan data yang akurat diperlukan kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan

Badan Pusat Statistik setempat dengan institusi sosial Orang Rimba yaitu Temenggung, Wakil Temenggung, Depati, Menti, dan Jenang.

Ketiga dari aspek kegiatan ekonomi, kehidupan kaum Perempuan Rimba masih berada di bawah garis kemiskinan, karena mereka masih hidup bergantung kepada alam. Hal ini terlihat dari mata pencaharian mereka dengan cara berburu, mencari jernang, mencari rotan, mencari damar, mengambil umbi, dan sebagian ada yang berladang. Selain itu Perempuan Rimba biasanya mengerjakan pekerjaan yang bersifat rumah tangga, misalnya memasak, mengasuh anak, menganyam kerajinan, dan mencari kayu bakar. Dari mata pencaharian mereka ini, belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Menurut Christine Heward & Sheila W (1999):

Described that the activities expected of rural women in the family and in her community tend to be similar, including home-making, childbearing, gardening, livestock rearing, producing food, and handicrafts and operating small businesses. Most of all, the identity women is about being a wife and mother.

Dijelaskan bahwa aktivitas dari perempuan miskin dalam keluarga dan kelompoknya terjadi beberapa kesamaan, yang mencakup pekerjaan rumah tangga, mengurus anak, berkebun, mengolah makanan, membuat kerajinan, dan mengoperasikan usaha kecil. Kondisi ini hampir sama dengan kondisi Perempuan Rimba yang juga ikut mencari mata pencaharian guna mencukupi kebutuhan hidup demi keluarganya, disamping sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya. Perempuan Rimba selain ikut membantu mencari mata pencaharian juga berperan sebagai seorang istri dan seorang ibu dalam keluarganya.

Kesetaraan gender (*gender equality*) adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Sedangkan pengertian keadilan gender (*gender equity*) adalah kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki, intinya adalah kesempatan dan perlakuan adil kepada laki-laki dan perempuan. Perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan atau yang dikenal dengan perbedaan gender yang terjadi di masyarakat tidak menjadi suatu permasalahan sepanjang perbedaan tersebut tidak mengakibatkan diskriminasi atau ketidakadilan. Kenyataan di lapangan dilihat dari kesetaraan dan keadilan gender, Perempuan Rimba ini mengalami beban ganda dalam kehidupan rumah tangga, dengan indikator sebagai berikut:

- Perempuan Rimba sebagai istri yang mengurus rumah tangga
- Perempuan Rimba sebagai ibu yang mengurus anak-anaknya
- Perempuan Rimba sebagai pencari nafkah
- Perempuan Rimba mengatur kebutuhan keluarga termasuk mengatur ekonomi keluarga
- Perempuan Rimba juga ikut bertransaksi dalam menjual hasil hutan yang diperoleh

Hen Jeanne (1984) berpendapat:

Women usually carried out most of the mayor farming tasks breaking up the soil, planting, weeding, harvesting, and carrying the harvest home. From the perspective it is clear that women's roles in agricultural production were and are highly significant in terms of their contributions to the economy.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa perempuan memberikan kontribusi terhadap ekonomi keluarga melalui bidang pertanian dan sumber-sumber yang ada. Berkaitan dengan mata pencaharian Perempuan Rimba yang mendukung ekonomi keluarga, sesuai dengan pendapat Idochi (1999) bahwa: “.....untuk mendapatkan nilai tambah”. Bagi kehidupan Perempuan Rimba mencari penghidupan dari hasil hutan adalah hal yang biasa dilakukan secara turun temurun dari nenek moyangnya dulu.

Berkaitan dengan Perempuan Rimba yang ikut mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhannya, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Stromquist (1993) bahwa: “*economic empowerment involves the ability for women to engage in income-generating activities that will enable them to have acces to independent income*”. Bahwa dalam pemberdayaan ekonomi termasuk di dalamnya kemampuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan supaya bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhannya.

Jika kita memperhatikan terhadap tantangan alam yang begitu dahsyat di hutan belantara di TNBD seperti yang dialami oleh Perempuan Rimba, maka perlu menggunakan daya akal supaya bisa tetap survive. Masyarakat rimba dalam memenuhi kebutuhannya masih bergantung kepada alam dengan mengambil hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kenyataan yang terjadi di lapangan, hutan yang menjadi tempat bergantung hidup bagi Orang Rimba sudah semakin berkurang karena berbagai sebab seperti adanya aksi pencurian kayu di di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas, ekspansi lahan untuk transmigrasi, perkebunan besar, serta perladangan

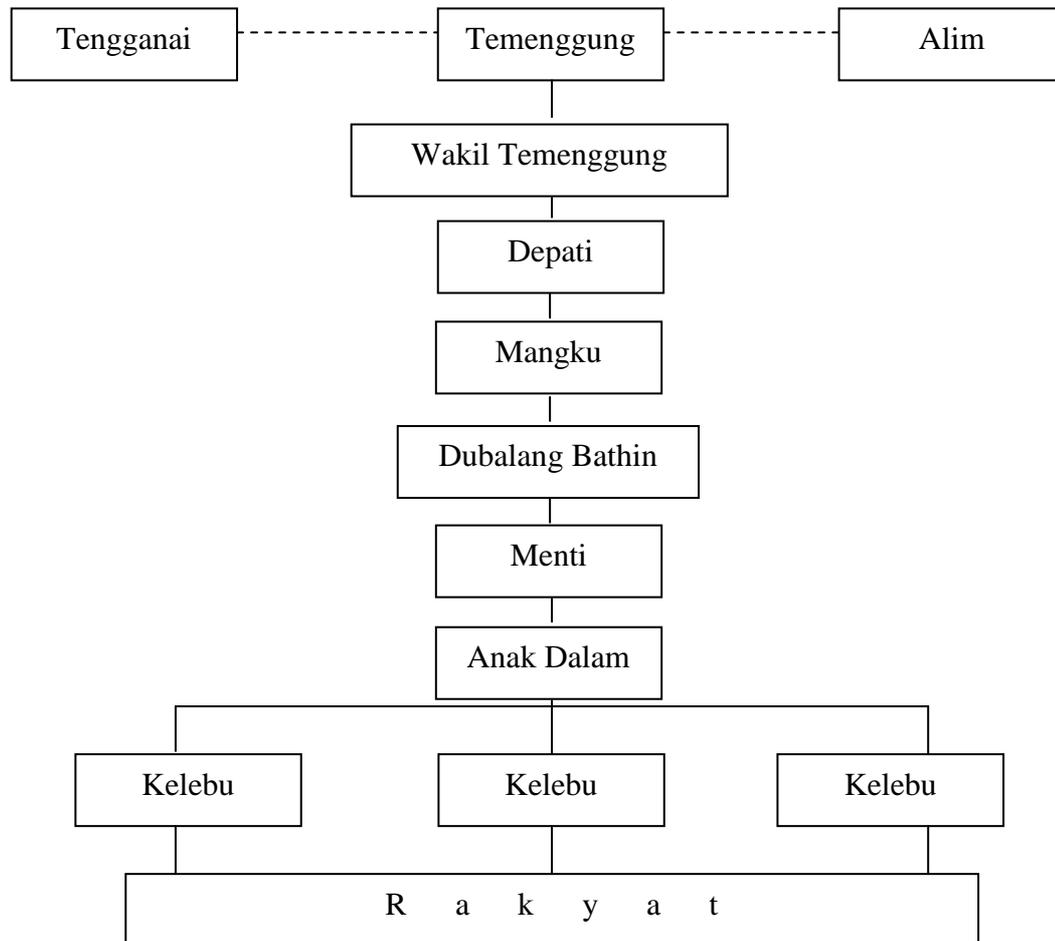
warga desa dari sekitar Taman Nasional Bukit Duabelas. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup Orang Rimba diperlukan uluran tangan dari berbagai pihak agar diarahkan pola hidup yang bergantung kepada alam kearah pola hidup yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di hutan. Mata pencaharian dengan cara berburu, meramu, mengumpul, berladang berpindah diarahkan kepada cara bercocok tanam, berkebun karet, dan sawit. Dalam hal ini perlu diperkenalkan teknologi sederhana agar mempermudah dan mempercepat kerja mereka.

Dengan demikian menurut Sumantri (2000) bahwa: “perlu diberikan sentuhan teknologi sederhana....” agar dapat mengolah sumber daya alam yang ada di hutan yang mempunyai nilai tambah. Muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan sentuhan teknologi sederhana. Teknologi sederhana yang diperkenalkan terhadap Perempuan Rimba berkaitan dengan mata pencaharian adalah peralatan sederhana untuk pertanian, teknologi sederhana dalam membuat ketrampilan menganyam yang berasal dari rotan, jernang, daun pandan yang bisa mempunyai nilai seni dan nilai jual sehingga bisa meningkatkan ekonomi mereka.

Berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam di hutan, seorang pemimpin kelompok Orang Rimba di wilayah TNBD, desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun yang bernama Temenggung Tarib telah menerima penghargaan Kalpataru pada tanggal 12 Juni 2006 di Istana Negara oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Temenggung Tarib telah berjasa dalam menyelamatkan lingkungan dengan cara membuat *hompongan* yang dalam bahasa Indonesia berarti pagar sebagai penghalang bagi orang luar yang akan merusak wilayah hutan di TNBD. *Hompongan* ini dibuat dengan cara

membuka lahan untuk ditanami karet, sawit, dan tanaman hutan lainnya. Sesuai perjanjian antara Orang Rimba dengan masyarakat desa di sekitar TNBD, maka wilayah yang sudah menjadi kebun Orang Rimba tidak boleh dimasuki warga luar. Kebun karet dan sawit itu dijadikan sebagai pagar, jika ada warga desa yang masuk ke dalam hutan yang sudah ada kebun Orang Rimba, akan dikenakan denda secara adat berupa 500 (lima ratus) lembar kain. Temenggung Tarib dapat dijadikan sebagai contoh bagi masyarakatnya dalam meningkatkan ekonomi keluarga melalui hompongan. Pemberdayaan Orang Rimba melalui bidang pertanian dan perkebunan perlu kerjasama antara Pemerintah Daerah setempat dengan Dinas Pertanian agar ada pendampingan dalam pengolahan sumber daya hutan.

Keempat ditinjau dari bidang sosial, kehidupan kaum Perempuan Rimba masih bergantung kepada kelompoknya, sehingga jauh dari masyarakat luar. Sebagian besar mereka masih menempati hamparan hutan, dengan hidup secara berkelompok menurut rombongnya, terbagi menjadi beberapa kelompok masyarakat dan masih terdapat pelapisan sosial di dalam masyarakat tersebut. Pelapisan sosial yang terjadi lebih didasarkan atas kekuasaan, yang legitimasinya didukung oleh sistem kepercayaan. Pengulu adalah suatu institusi sosial yang mengurus dan memimpin Orang Rimba, mereka yang termasuk Pengulu adalah: (1) Temenggung; (2) Wakil Temenggung; (3) Dubalang Bathin; (4) Depati; (5) Mangku; (6) Menti; (7) Anak Dalam; (8) Kelebu. Selain para pengulu, masih terdapat dua institusi sosial yaitu Tenganai dan Alim yang bertugas mengawasi dan melayani masyarakat di bidang masalah kekeluargaan dan masalah spiritual. Susunan institusi sosial di atas seperti dalam bagan berikut:



Sumber: KPA Sokola

Gambar 5.1
Organisasi Orang Rimba Menurut Struktur Kepemimpinan

Kenyataan di lapangan, Perempuan Rimba ada keterbatasan dalam berinteraksi sosial, karena berbagai hal seperti:

- Ikatan sosial mereka dalam satu rombongan atau komunitas Orang Rimba sangat kuat
- Perempuan Rimba tidak mudah menerima orang luar
- Rasa curiganya sangat tinggi terhadap orang luar yang belum dikenal

- Perempuan Rimba harus dikawal, didampingi oleh laki-laki rimba kemanapun pergi.

Hal ini menyebabkan keterasingan mereka sehingga sulit untuk berinteraksi dengan dunia luar, menerima pembauran dari luar Orang Rimba. Kondisi ini perlu ada perubahan supaya Perempuan Rimba bisa melihat dunia luar, tidak hanya bergantung kepada kelompoknya yang menyebabkan keterbatasan akses yang mengarah pada kemajuan. Orang Rimba hidup dengan sengaja mengasingkan diri dari masyarakat lain di sekitarnya. Dimana sejak sekitar abad XVI mereka tetap bertahan seperti yang dapat kita saksikan saat ini. Sandang, pangan dan papan, mereka upayakan sendiri. Hutan dan alam sekitarnya merupakan sumber hidup dan kehidupan mereka. Dijaga oleh sebuah sistem adat yang amat kuat dan merupakan sistem norma batasan pola hidup mereka. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, mereka belum pernah mengharap bantuan dari luar, mereka mampu secara mandiri. Orang Rimba bagaikan sebuah negara yang tatanan hidupnya diatur oleh hukum adat yang sangat kuat. Semua kewenangan yang berlandaskan kebijaksanaan dan keadilan, ada pada Temenggung. Tatanan kehidupan yang terpola dengan adat budaya yang kuat ini juga yang menyebabkan akses Perempuan Rimba sulit untuk berinteraksi dengan orang luar. Namun saat ini dengan adanya anak-anak perempuan diijinkan untuk bersekolah ada kemajuan sebagian anak perempuan ini mulai berinteraksi dengan orang luar walaupun masih sebatas dengan sesama perempuan penduduk desa. Hal ini terjadi ketika mereka keluar hutan untuk menjual hasil hutan atau berbelanja ke pasar untuk membeli kebutuhan makanan. Secara tidak langsung anak-anak perempuan ini

sudah mempraktekkan pendidikan yang didapat dengan berinteraksi menggunakan bahasa Indonesia, membantu menghitung hasil jual beli orangtuanya. Jika dilihat dari adanya perubahan sosial, menurut Harper (1989) dikatakan: "*social change is also the story of individuals and of differences between generations in families*". Dijelaskan bahwa perubahan sosial terjadi pada individu dan terjadi perbedaan antara generasi dalam keluarganya. Kondisi ini juga terjadi pada anak-anak perempuan yang mulai sedikit terbuka dalam berinteraksi dengan orang luar walaupun itu sebatas pada perempuan.

Dalam upaya peningkatan kemampuan sosial Perempuan Rimba perlu diberikan pemberdayaan secara sosial dengan memberikan beberapa kegiatan seperti dibentuk kelompok pertemuan dengan diselingi kegiatan arisan, sosialisasi tentang kesehatan, keluarga berencana (KB), dan pemberian ketrampilan. Pihak Pemerintah Daerah khususnya Tim Penggerak PKK Kabupaten setempat perlu memprogramkan kegiatan khusus untuk pemberdayaan Perempuan Rimba bekerjasama dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan dan Keluarga Berencana Kabupaten, Tim Penggerak PKK Kecamatan, dan Tim Penggerak PKK desa terdekat. Hal ini agar terjalin kerjasama dan koordinasi dalam program-program tahunan dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program kegiatannya.

Kelima ditinjau dari aspek adat budaya, Orang Rimba mempunyai beragam adat budaya yang telah turun temurun dari nenek moyangnya. Adat budaya Orang Rimba antara lain pertama *besesandingon*. *Besesandingon* adalah perpindahan tempat tinggal Orang Rimba dikarenakan adanya penyakit menular di

tempat tinggal asal. Mereka memilih untuk meninggalkan tempat terjadinya wabah penyakit. Pada saat pergi besesandingan mereka akan pergi sambil merangkak, lalu naik ke atas pohon, turun, dan merangkak lagi sampai jarak tertentu. Kemudian mereka naik pohon lagi, turun, dan merangkak lagi sampai merasa bahwa dirinya aman. Cara seperti itu dimaksudkan agar penyakit tidak dapat mengikuti kepergian mereka sehingga di tempat baru mereka akan bebas dari penyakit. Budaya kedua adalah *melangun*. Apabila ada Orang Rimba meninggal, maka kawasan tempat meninggalnya dianggap tidak baik lagi untuk ditinggali karena akan membawa sial, oleh sebab itu mereka berpindah tempat untuk mencari tempat baru. Perjalanan *melangun* seperti acara pindah rumah, mereka membawa seluruh harta benda dan peralatan yang mereka miliki, seperti alat-alat dapur, kain, berbagai senjata tajam, dan peralatan lainnya. Orang Rimba beranggapan bahwasanya kawasan tempat tinggal terdahulu yang ditinggalkan karena adanya kematian akan kembali netral setelah beberapa waktu. Pada masa lalu lamanya *melangun* paling sedikit enam tahun, kemudian berubah menjadi dua tahun, dan sekarang berubah menjadi beberapa bulan. Hal itu dikarenakan mulai menguatnya budaya berladang, meninggalkan tanaman-tanaman di ladang yang telah dapat menunjang kehidupan mereka lebih baik. Perubahan lamanya *melangun* merupakan gambaran jelas bahwa tradisi Orang Rimba perlahan mulai berubah. Desakan ekonomi memaksa mereka untuk lebih fleksibel dalam mempertahankan adat. Ketiga adalah *seloko dan mantera*. Kehidupan Orang Rimba sangat dipengaruhi oleh aturan-aturan hukum yang sudah diterapkan dalam bentuk *seloko-seloko* yang secara tegas dijadikan pedoman hukum oleh para

pemimpin Orang Rimba, khususnya Tumenggung dalam membuat suatu keputusan. Seloko juga menjadi pedoman dalam bertutur kata dan bertingkah laku serta dalam kehidupan bermasyarakat. Keempat, budaya *besale*. Besale dilaksanakan pada malam hari yang dipimpin oleh seorang tokoh yang disegani atau yang biasa disebut dukun. Tokoh ini harus memiliki kemampuan lebih dan mampu berkomunikasi dengan dunia ghaib atau arwah. Sesajian disediakan untuk melengkapi upacara. Upacara besale adalah upacara sakral yang bertujuan untuk mengobati anggota yang sakit atau untuk menolak bala. Peralatan besale lainnya berupa bunyi-bunyian dan tarian yang mengiringi prosesi pengobatan. Kelima adalah hukum dan undang-undang Orang Rimba. Kehidupan masyarakat Orang Rimba didasarkan pada prinsip-prinsip yang tergantung pada adat yang diwarisi dari nenek moyangnya. Orang Rimba percaya apabila masyarakat taat dan patuh pada adat, maka kehidupannya akan selamat pada waktu hidup di dunia dan di alam setelah mereka meninggal. Prinsip adat Orang Rimba adalah undang dan teliti, aturan adat yang berlaku di kalangan Orang Rimba tercakup dalam *Induk Undang-undang, Pucuk Undang-undang nan delapan, Undang-undang nan dua belas, dan teliti*. Keenam adalah tentang *tabu-tabu*, Orang Rimba mempertahankan keteraturan sosial dan adat melalui berbagai tabu atau pantangan. Pelanggaran terhadap tabu-tabu itu akan dikenakan denda. Adanya tabu-tabu merupakan wujud dari kebijaksanaan nenek moyang dalam menjaga adat. Adapun denda sebagai alat penghukum bagi yang melanggar ditetapkan dalam musyawarah adat. Tabu-tabu yang ada bisa digolongkan ke dalam beberapa kategori, yaitu tabu-tabu mengenai makanan, tabu-tabu mengenai hubungan

dengan sesama manusia, tabu-tabu mengenai hubungan antara manusia dan alam, dan tabu-tabu mengenai hubungan antara manusia dan alam supranatural. Empat kategori itu menunjukkan bahwa Orang Rimba telah mengatur seluruh kehidupannya agar sesuai dengan kepercayaan mereka. Semuanya sudah diatur dan memiliki hukum yang bersifat tetap. Ketujuh adalah budaya *bediom*, budaya Orang Rimba ternyata menyediakan mekanisme bagi Orang Rimba yang ingin meninggalkan kehidupan hutan. Mereka yang ingin keluar dari hutan dan menetap secara tetap diluar hutan dan berkampung seperti penduduk desa tidak mendapat halangan. Istilah untuk hal ini dikenal dengan nama *bediom*. Dalam budaya Orang Rimba terjadi semacam ketentuan bahwa adat dan tradisi mereka hanya berlaku di dalam rimba. Ketika keluar dari rimba maka yang berlaku dan harus diikuti adalah adat dan tradisi orang Melayu. Adat dan tradisi rimba tidak boleh lagi digunakan di luar rimba. Oleh karena itu syarat *bediom* adalah meninggalkan hal-hal terkait dengan kehidupan di dalam rimba dan mengadopsi seluruh tatacara berkampung. Kedelapan adalah *bebalai*. Orang Rimba mempunyai adat perkawinan yang proses perkawinannya disebut dengan *bebalai*. Namun sebelum *bebalai* dilakukan, pihak laki-laki harus *bersemendo* atau mengabdikan terlebih dahulu kepada pihak keluarga perempuan. *Bebalai* biasanya berlangsung selama tujuh hari tujuh malam dengan sesajian beragam buah-buahan dan hewan buruan. Kesembilan adalah *tarik rento*. Selain *bebalai* acara perkawinan bisa dilakukan dengan cara *tarik rento*. *Tarik rento* dilakukan karena kedua pasangan telah melanggar tabu adat. *Tarik rento* dilakukan jauh di tengah hutan dan jauh dari pemukiman kelompok. Kesepuluh, *harto besamo dan harto pribadi*. Harta bersama (*harto besamo*)

adalah harta yang kepemilikannya tidak dikuasai oleh satu orang, semua orang boleh memanfaatkannya. Adapun yang termasuk harta bersama adalah tumbuhan rotan, damar, jernang, dan balam. Wilayah perburuan juga merupakan milik bersama, siapa saja diperbolehkan untuk berburu di wilayah manapun. Harto tidak besamo atau harta pribadi pemanfaatannya mutlak dalam kuasa pemiliknya. Jika orang lain ingin memanfaatkannya harus meminta izin pada sang pemilik. Adapun yang termasuk harta pribadi adalah seluruh barang yang dibeli, tanaman yang ditanam, tanah yang telah dibuka, pohon sialang, dan pohon buah yang telah dimiliki.

Adat budaya Orang Rimba telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari Orang Rimba. Berkaitan dengan adat budaya, Dye (1990:38) menjelaskan bahwa:

Budaya itu adalah cara-cara hidup yang biasa dilakukan oleh suatu masyarakat. Budaya masyarakat manapun menggambarkan generalisasi tentang perilaku dari banyak anggota masyarakat itu. Budaya tidak menggambarkan kebiasaan-kebiasaan pribadi secara perseorangan.

Budaya juga merupakan cara-cara berperilaku yang biasa ditunjukkan dalam masyarakat yang mungkin saja berbeda cara-cara berperilakunya tergantung dari masyarakat mana yang menganut atau mengembangkannya.

Dari beberapa uraian tentang semua aspek di atas, kaitannya dengan pemberdayaan Perempuan Rimba, telah dilakukan berbagai upaya baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kepada pihak-pihak terkait yang mempunyai perhatian khusus terhadap pemberdayaan perempuan walaupun belum maksimal. Jika dilihat dari faktor geografis, demografis, ekonomi, kesehatan, soail, dan adat budaya Perempuan Rimba, Pemerintah Daerah telah melakukan

tindakan khusus untuk mengadakan pembangunan di segala bidang. Dalam hal ini telah ada kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Sosnakertrans yang telah melakukan pembinaan dan pemberdayaan Orang Rimba, Dinas Pendidikan untuk pembangunan bidang pendidikan, Dinas Kesehatan untuk memberikan pelayanan dan penyuluhan kesehatan, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, dan perusahaan swasta yang berada di wilayah TNBD diajak untuk bekerjasama dalam memberdayakan Orang Rimba. Koordinasi dan kerjasama antar berbagai pihak ini belum disinergiskan karena kenyataan yang ada, selama ini masing-masing berjalan dengan program dan kegiatannya sendiri. Dalam hal ini dari pihak Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi agar hasil pemberdayaan Orang Rimba khususnya pemberdayaan Perempuan Rimba ini menjadi nyata dan sesuai dengan yang diharapkan. Jika koordinasi lintas sektoral dapat berjalan dengan baik antara berbagai pihak, diyakini dapat lebih efisien dan efektif baik dari segi pendanaan, tenaga, maupun waktu yang dibutuhkan.

2. Profil Internal Pendidikan Terutama dalam Kaitannya dengan Keadaan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan

Ditinjau dari aspek sumber daya manusia, rata-rata sumber daya manusia Perempuan Rimba yang berada di kawasan TNBD masih rendah karena sebagian besar masih buta huruf. Dalam bidang pendidikan, kualitas perempuan masih rendah dengan beberapa indikator antara lain:

- Pertama, kesamaan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh pendidikan, ada perbedaan. Namun peluang ini tereduksi dengan konstruksi budaya yang menyatakan perempuan tidak perlu sekolah karena

posisi Perempuan Rimba nantinya akan selalu berada pada urusan rumah tangga.

- Kedua, dalam keluarga yang rata-rata berpenghasilan rendah, Perempuan Rimba bukanlah aset keluarga yang penting untuk masa depan keluarga, meskipun dalam kenyataannya Perempuan Rimba ini mempunyai peran dan sumbangan pendapatan yang tidak sedikit untuk peningkatan ketahanan pangan keluarga. Hal ini dibuktikan dengan para Perempuan Rimba membantu mencari mata pencaharian mereka dengan cara berburu, mencari jernang, mencari rotan, mencari damar, dan sebagian ada yang berladang.

Kondisi ini disebabkan karena letak geografis yang sulit dijangkau, adat budaya yang masih kuat, keterbatasan akses informasi dan komunikasi, dan berbagai kendala lainnya. Dengan berbagai usaha dan perjuangan dalam menembus peluang pendidikan bagi Perempuan Rimba, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Sarolangun maupun Lembaga Swadaya Masyarakat KPA Sokola dan KKI Warsi, pendidikan dapat dilaksanakan pada masyarakat rimba walaupun masih dalam jumlah terbatas. Selain itu juga ada keinginan dan motivasi dari Perempuan Rimba sendiri untuk menambah ilmunya. Motivasi untuk mengikuti pendidikan ini erat hubungannya dengan pendapat Sayogo dan Pudjiwati (1996) lebih mengarahkan ke dalam kitab suci bahwa:

Al-Quran itu khas dalam menekankan segi-segi yang berhingga, tertentu dan terbukti dari realitas. Dalam setiap halaman ayat-ayat suci menyuruh manusia menambah ilmunya dengan memperhatikan secara kritis ayat-ayat (tanda-tanda) Illahi di dalam hukum-hukum dan gejala alam dan dalam peristiwa-peristiwa sejarah yang penuh pelajaran.

Secara jelas dalam kitab suci Al-Quran telah mengajak umat manusia untuk menambah ilmunya dengan memperhatikan secara kritis tanda-tanda yang ada, termasuk gejala alam seperti musim hujan, musim kemarau, dan musim paceklik ketika sulit mendapatkan makanan di hutan. Orang Rimba harus berupaya menaklukkan kondisi alam seperti itu, agar dapat ditaklukkan guna meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Selain kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi juga harus dikuasai melalui pendidikan baik pendidikan dalam keluarga, pendidikan melalui sekolah maupun luar sekolah.

Anak-anak Perempuan Rimba telah mengikuti pendidikan formal dengan bersekolah di SD terdekat di pemukiman penduduk desa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dimana jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya serta dapat diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. Dikaitkan dengan fungsi pendidikan dalam mencerdaskan seluruh rakyat adalah merupakan amanat sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, tercermin di dalam pasal 31, bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran” (ayat 1); dan “Pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional” (ayat 2). Bunyi pasal tersebut jelas merupakan landasan yang sangat kuat bagi Pemerintah untuk mencanangkan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, yang tidak semata-mata diselenggarakan di

lingkungan sekolah, akan tetapi juga pendidikan berkelanjutan, seperti kursus-kursus, pelatihan-pelatihan, dan sejenisnya.

Berdasarkan hal tersebut, pendidikan sangat berarti bagi kehidupan dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan setiap orang. Kaitan dengan pendidikan, Satori (2000:2) mengemukakan bahwa:

Pendidikan dalam arti luas tidak terbatas hanya pada sistem persekolahan saja, akan tetapi meliputi segala upaya yang menyangkut transformasi nilai dan kemampuan yang berlangsung dalam proses interaksi antar individu dalam sistem sosial. Selanjutnya Satori mengemukakan bahwa pendidikan sebagai salah satu bagian penting dari proses pembangunan nasional merupakan salah satu sumber penentu dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendidikan dalam konteks ini dipandang sebagai investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, dimana peningkatan kemampuan, kecakapan, dan kualitas pribadi diyakini sebagai faktor yang mendukung kadar upaya manusia dalam menjalani kehidupannya.

Masyarakat yang ingin maju, tentunya merasakan perlunya pendidikan dan memandang sebagai kebutuhan yang mendasar, sehingga setiap penyelenggaraan pendidikan sudah barang tentu perlu memperhatikan berbagai karakteristik, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat dimana kegiatan pendidikan tersebut dilaksanakan. Anak-anak Perempuan Rimba yang mendiami pinggiran hutan wilayah TNBD telah mengikuti pendidikan di SD terdekat, walaupun jumlahnya masih kecil namun hal ini merupakan sebuah kemajuan pola pikir orangtuanya yang telah mengizinkan anak-anaknya untuk mengikuti pendidikan, karena sejak dulu pendidikan dianggap tabu dan akan merubah adat budaya mereka.

Pada Kabupaten Batang Hari, jumlah anak Perempuan Rimba yang mengikuti pendidikan di SD sebanyak 40 anak tersebar dalam empat kecamatan yaitu: Kecamatan Batin XXIV pada SD No. 98/I Jangga Aur sebanyak dua anak perempuan; Kecamatan Maro Sebo Ulu pada SD No. 02/I Kembang Seri

sebanyak tiga anak perempuan, SD No. 04/I Sungai Ruan Ilir sebanyak empat anak, dan SD No. 102/I Batu Sawar sebanyak dua anak; Kecamatan Bajubang pada SD No. 49/I Bungku sebanyak tiga anak, SD No. 65/I Tiang Tunggang sebanyak tiga anak, SD No. 178/I Pompa Air sebanyak lima anak, dan SD No. 184/I Johor Baru Bungku sebanyak sembilan anak; Kecamatan Muara Tembesi pada SD No. 104/I Simpang Jebak sebanyak enam anak, dan SD No. 173/I Senami sebanyak tiga anak perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1
Banyaknya Anak Suku Anak Dalam di Kabupaten Batang Hari
Yang Mengikuti Pendidikan Formal (SD)

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	PR	LK	JML
1	Batin XXIV	SD No. 98/I Jangga Aur	2	5	7
2	Maro Sebo Ulu	SD No. 02/I Kembang Seri	3	6	9
3	Maro Sebo Ulu	SD No. 04/I Sungai Ruan Ilir	4	10	14
4	Maro Sebo Ulu	SD No. 102/I Batu Sawar	2	4	6
5	Bajubang	SD No. 49/I Bungku	3	9	12
6	Bajubang	SD No. 65/I Tiang Tunggang	3	11	14
7	Bajubang	SD No. 178/I Pompa Air	5	15	20
8	Bajubang	SD No. 184/I Johor Baru Bungku	9	15	24
9	Muara Tembesi	SD No. 104/I Simpang Jebak	6	11	17
10	Muara Tembesi	SD No. 173/I Senami	3	12	15
Jumlah			40	97	137

Sumber: Diknas Batang Hari 2010

Kabupaten Sarolangun, anak-anak Perempuan Rimba yang belajar di SD terdekat berjumlah 46 anak perempuan, tersebar dalam enam kecamatan, yaitu: Kecamatan Sarolangun di SD Negeri No.64/VII Suka Sari II sebanyak satu anak perempuan. Kecamatan Cermin Nan Gedang di SD Negeri No. 205/VII Teluk

TigoII sebanyak 22 anak perempuan. Kecamatan Singkut di SD Negeri No.61/VII Bukit Murau I sebanyak tiga anak perempuan. Kecamatan Air Hitam di SD Negeri No.191/VII Pematang Kabau II sebanyak enam anak perempuan dan SD 211/VII Bukit Suban sebanyak tujuh anak perempuan. Kecamatan Mandiangin di SD Negeri No.212/VII Jernang sebanyak tujuh anak perempuan. Gambaran ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2
Data Anak Rimba di SD Kabupaten Sarolangun

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	PR	LK	JML
1	Sarolangun	SD No. 64/VII Suka Sari II	1	5	6
2	Limun	SD No. 205/VII Tanjung Raden III	22	13	35
3	Limun	SD No. 61/VII Bukit Murau I	3	5	8
4	Air Hitam	SD No. 191/VII Pematang Kabau II	6	11	17
5	Air Hitam	SD No. 211/VII Bukit Suban	7	14	21
6	Mandiingin	SD No. 212/VII Meranti Baru II	7	18	25
Jumlah			46	79	125

Sumber: Diknas Sarolangun 2010

Jumlah anak-anak Perempuan Rimba yang telah bersekolah tersebut jumlahnya meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kesadaran orangtua dalam mengizinkan anak perempuannya untuk mengikuti pendidikan. Berkaitan dengan pendidikan, Cohn (1979:2) mendefinisikan bahwa: *“education is the process of training and developing the knowledge, skill, mind, character, etc, especially by formal schooling”*. Pendidikan bagi anak-anak rimba merupakan proses pelatihan dan pengembangan pengetahuannya, ketrampilannya, pikiran-pikiran, dan karakternya untuk menuju

perubahan yang lebih baik dan dapat bermanfaat pada kehidupan sehari-hari di rimba.

Sejalan dengan itu menurut UNESCO (1999), bahwa:

Although formal education has several limitations, it has nevertheless an empowering element. It is through formal education that people enter the professional or political elite, albeit in small numbers. On the other hand non-formal education is in a better position to challenge the status quo.

Dijelaskan bahwa meskipun pendidikan mempunyai banyak keterbatasan akan tetapi mempunyai elemen pemberdayaan. Melalui pendidikan formallah manusia memasuki era professional atau elit politik meskipun dalam jumlah yang kecil. Jadi dengan anak-anak Perempuan Rimba mengikuti pendidikan di sekolah formal diharapkan mempunyai manfaat baik bagi dirinya, keluarganya, maupun kepada masyarakatnya Orang Rimba.

Anak-anak Perempuan Rimba yang mengikuti pendidikan di SD terdekat, dalam pelaksanaannya banyak mengalami permasalahan. Dalam temuan di lapangan pada SD Negeri No. 102/I Desa Batu Sawar dan SD Negeri No. 02/I Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Hulu Kabupaten Batang Hari; SD Negeri No. 191/VII Desa Pematang Kabau II dan SD Negeri No. 211/VII Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, anak-anak Perempuan Rimba yang mengikuti pendidikan di SD terdekat banyak mengalami kendala. Kendala anak-anak dalam mengikuti pendidikan ini antara lain yaitu:

- Pertama dari faktor geografis, tempat tinggal sulit dijangkau karena jauh dari jangkauan transportasi;
- Kedua dari faktor sosial, ada keterbatasan dalam berinteraksi dengan masyarakat luar;

- Ketiga dari faktor budaya, Perempuan Rimba masih kuat memegang adat budayanya, ada kekhawatiran dengan mengikuti pendidikan akan merubah adat budaya mereka;
- Keempat dari faktor ekonomi, sebagian besar masyarakat rimba masih memanfaatkan anak-anak mereka untuk membantu mencari nafkah dengan cara ikut berburu, meramu, berladang, dan aktivitas lain kaitannya dengan pemenuhan hidup;
- Kelima dari faktor keamanan, orangtua sangat mengkhawatirkan anak-anaknya dari gangguan binatang maupun orang luar yang dianggap akan mengancam jiwa;
- Keenam dari faktor keterikatan, anak-anak Perempuan Rimba merasa tidak bebas untuk mengikuti pendidikan karena banyak peraturan sekolah yang harus ditaati, dimana mereka merasa tidak bebas, terkungkung, padahal kehidupan mereka selama ini bebas di alam terbuka.

Beberapa permasalahan tersebut di atas menyebabkan anak-anak perempuan yang mengikuti pendidikan di SD terdekat banyak yang *droup out* atau putus sekolah. Tingginya putus sekolah pada anak perempuan yang bersekolah di SD terdekat karena anak-anak perempuan yang bersekolah di SD banyak mengalami permasalahan, antara lain yaitu:

- Pertama dari faktor psikologis, anak-anak Perempuan Rimba banyak yang merasa minder dengan anak-anak luar karena mereka sering dijadikan bahan ejekan hal ini disebabkan oleh tingkat kesehatan badan dan kebersihan pakaian yang rendah.

- Kedua dari faktor musim, kaitannya dengan potensi sumber daya hutan yang menjadi mata pencaharian orangtua ketika musim buah-buahan, musim memanen hasil ladang, musim memanen madu dengan budaya sialang, musim penghujan, dan musim lainnya di dalam rimba, maka anak-anak tidak masuk sekolah, hal ini yang menyebabkan mereka sering tinggal kelas dan karena malu akhirnya berhenti sekolah.
- Ketiga dari faktor budaya melangun, ketika ada keluarganya yang meninggal atau sakit keras, maka orangtua akan mengajak anak-anaknya untuk ikut berpindah ke tempat baru karena tempat lama diyakini akan membawa kesialan, akibatnya anak-anak yang menjadi korban tidak bisa bersekolah lagi. Karena masa melangun ini cukup lama dan ketika kembali ke tempat semula, anak-anak mereka sudah malu untuk bersekolah lagi takut diejek oleh teman-temannya.
- Keempat dari faktor motivasi, rata-rata motivasi belajar anak-anak rimba yang bersekolah di SD terdekat, motivasinya rendah untuk belajar. Hal ini penyebabnya pun bervariasi, antara lain karena jarak tempuh yang cukup jauh yang ditempuh dengan berjalan kaki membuat anak-anak sudah cukup lelah ketika sampai di rumah, selain itu akses penerangan di malam hari belum ada yang menyebabkan anak-anak tidak bisa belajar pada malam hari.

Anak-anak Perempuan Rimba yang bertempat tinggal di dekat pemukiman penduduk desa mengikuti pendidikan formal di SD terdekat, sedangkan yang tinggal di pinggiran hutan sebagian telah diijinkan untuk mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh KPA Sokola dan KKI Warsi.

Tabel 5.3
Jumlah Anak Rimba KKI Warsi berdasarkan lokasi Th. 1998-2009

No	Nama Lokasi	Nama Rombongan	Laki-laki	Perempuan	Total
	Kelompok Makekal				
1	Pengelaworon Godong	Menti Ngandun	10	-	10
2	Sako Talun-Gemuruh	Temenggung Mirak	23	-	23
3	Kedundung Muda	Temenggung Nggrip	19	1	20
4	Aek Behan	Wakil Meratai	11	-	11
5	Padang Pederon-Sako Jernang	Depati Bepak Begaji	19	-	19
6	Makekal Hilir	Temenggung Ngukir	12	2	14
	Kelompok Bernai				
1	Bernai Ulu	Nitip (Bepak Bepiyun)	10	-	10
2	Rantau Betu-Bernai Ilir	Wakil Tuha Pelindung	8	-	8
	Kelompok Kejasung				
1	Kejasung Besar Tengah	Temenggung Celitai	14	8	22
2	Kejasung Besar Ulu	Temenggung Meladang	6	11	17
3	Jernang-Kejasung Kecil	Besulit	9	4	13
4	Sungai Terap	Melayu Tuha	15	3	18
5	Sungai Bangkai Anjing	Melayu Tuha	16	4	20
6	Sungai Pebala Konadai	Melayu Tuha	17	5	22
	Kelompok Air Hitam				
1	Paku Aji	Temenggung Tarib	19	-	19
2	Semapuy	Angka-Angka	16	-	16
3	Air Panas	Temenggung Petaring	21	2	23
4	Bukit Suban	Temenggung Nggrip	20	5	25
Total			265	45	310

Sumber: KKI Warsi 2010

KPA Sokola juga menyelenggarakan pendidikan alternatif bagi anak-anak rimba yang meliputi enam kelompok belajar atau rombongan yaitu:

1. Sungai Kejasung Besar, dengan Rombongan Meladang.
2. Sungai Kejasung Kecil, dengan Rombongan Melayu Tuha.
3. Sungai Sempui, Air Hitam, dengan Rombongan Angka-angka.
4. Sungai Toruyan, Air Hitam, dengan Rombongan Ninjau.
5. Sungai Aebahan, dengan Rombongan Meratai.
6. Sungai Singosari, dengan Rombongan Gerak.

Dalam satu kelompok belajar terdapat 10-30 warga belajar. Kondisi ini tidak sesuai dengan komunitas Orang Rimba yang ada di Taman Nasional Bukit Duabelas yang berjumlah sekitar 1316 jiwa dari 300 KK, yang tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.4
Anak Rimba yang mengikuti pendidikan alternatif KPA Sokola

No	Nama Rombongan	Tempat	Jumlah warga belajar	Keterangan
1	Meladang	Kejasung Besar	29	L = 26, P = 3
2	Melayu Tua	Kejasung Kecil	20	L = 17, P = 3
3	Angka-angka	Sempui Air Hitam	22	L = 20, P = 2
4	Ninjau	Toruyan Air Hitam	18	L = 16, P = 2
5	Meranti	Aebahan	17	L = 16, P = 2
6	Gerak	Singosari	18	L = 16, P = 2
	Jumlah		110	L=110, P=14

Sumber: KPA Sokola 2010

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan jumlah anak Perempuan Rimba yang mengikuti pendidikan KPA Sokola sebanyak 14 anak, sedangkan anak laki-laki sebanyak 110 anak. Jumlah anak perempuan tersebut hanya 12,5% jika dibandingkan dengan jumlah anak laki-laki.

Orang Rimba juga mengikuti pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, antara lain yaitu: Program Keaksaraan Fungsional (KF), Program Life Skill, dan Program Paket A. Program pada Kabupaten Batang Hari dapat dilihat pada tabel 5.5 dan 5.6, sedangkan Kabupaten Sarolangun pada tabel 5.7 – 5.9.

Tabel 5.5
Peserta Program KF Kabupaten Batang Hari 2010

NO	KECAMATAN	LK	PR	Jumlah
1	Batin XXIV	2	10	12
2	Maro Sebo Ulu	-	8	8
3	Muara Tembesi	3	13	16
4	Bajubang	4	20	24
Jumlah		9	51	60

Sumber: Diknas Kab. Batang Hari

Tabel 5.6
Peserta Program Paket A Kabupaten Batang Hari 2010

NO	KECAMATAN	LK	PR	Jumlah
1	Batin XXIV	4	-	4
2	Maro Sebo Ulu	4	1	5
3	Muara Tembesi	6	2	8
4	Bajubang	11	5	16
Jumlah		25	8	33

Sumber: Diknas Kab. Batang Hari

Tabel 5.7
Peserta Program KF Kabupaten Sarolangun 2010

NO	KECAMATAN	LK	PR	Jumlah
1	Air Hitam	3	9	12
2	Mandiingin	-	11	11
	Jumlah	3	20	23

Sumber: Diknas Kab. Sarolangun

Tabel 5.8
Peserta Program Paket A Kabupaten Sarolangun 2010

NO	KECAMATAN	LK	PR	Jumlah
1	Singkut	3	1	4
2	Air Hitam	6	2	8
3	Mandiingin	5	2	7
	Jumlah	14	5	19

Sumber: Diknas Kab. Sarolangun

Tabel 5.9
Peserta Life Skill Kabupaten Sarolangun 2010

NO	KECAMATAN	PR	LK	Jumlah
1	Singkut	8	12	20
2	BatinVIII	11	9	20
3	Limun	6	14	20
4	Air Hitam	34	6	40
5	Mandiingin	13	7	20
6	Cermin Nan Gedang	10	10	20
	Jumlah	82	58	140

Sumber: Diknas Kab. Sarolangun

Dari tabel 5.5 - 5.9 di atas dapat diketahui jumlah Perempuan Rimba yang telah mengikuti pendidikan Paket A, KF, dan Life Skill berjumlah 166 orang.

Administrasi pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya adalah suatu ilmu yang mempelajari penataan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif. Engkoswara (1999:26) menggambarkan penataan sumber daya dalam administrasi pendidikan seperti tampak pada gambar berikut.



Sumber: Engkoswara. (1999). *Menuju Indonesia Modern 2020*.

Gambar 5.2 **Penataan Sumber Daya dalam Administrasi Pendidikan**

Gambar di atas mengilustrasikan keterpaduan antara fungsi administrasi pendidikan sebagai penjabaran dari istilah penataan yang dikemukakan pada definisi di atas dan garapan kerja administrasi pendidikan sebagai penjabaran dari sumber daya. Fungsi utama penataan administrasi pendidikan adalah perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*implementing*), dan pengawasan (*evaluating*) pendidikan yang menyangkut tiga sumber daya atau bidang garapan utama yaitu: (1) Sumber daya manusia (SDM) yang terdiri atas peserta didik, tenaga kependidikan, dan masyarakat pemakai jasa pendidikan; (2) Sumber belajar (SB) adalah alat atau rencana kegiatan yang akan dipergunakan sebagai media di antaranya kurikulum; dan (3) Sumber fasilitas dan dana (SFD) sebagai faktor pendukung yang memungkinkan pendidikan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semua fungsi dan sumber daya administrasi pendidikan ini merupakan media (teknologi

pendidikan) atau perilaku berorganisasi yang diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan secara produktif (TPP) baik untuk kepentingan perorangan maupun untuk kelembagaan.

Kenyataan di lapangan, dalam pengelolaan pendidikan baik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Sarolangun, sumber daya tenaga pendidik yang mengajar di SD adalah guru yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan tenaga pendidik pada KPA Sokola dan KKI Warsi adalah fasilitator pendidikan dan dibantu oleh kader pendidik yang berasal dari Orang Rimba yang sudah dianggap mampu mengajar. Tenaga pendidik bagi anak-anak rimba seharusnya dipersiapkan secara khusus untuk mengajar anak-anak rimba dan tidak dibaurkan dengan anak-anak luar Orang Rimba. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada permasalahan dalam adat budaya diantara keduanya, karena kenyataan yang terjadi di lapangan anak-anak rimba yang mengikuti pendidikan di SD terdekat banyak mengalami kendala dan putus sekolah.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Direktur KKI Warsi diungkapkan bahwa pihak KKI Warsi sudah mengajukan kerjasama dalam penyediaan tenaga pendidik bagi anak-anak rimba dengan pemerintah daerah setempat, namun belum ada realisasinya. Dalam perekrutan tenaga pendidik seharusnya ada koordinasi antara Pemerintah Daerah setempat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Sarolangun dengan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu KPA Sokola dan KKI Warsi. Permasalahan yang dihadapi oleh KPA Sokola dan KKI Warsi adalah terbatasnya tenaga pendidik yang mengajar anak-anak rimba,

sedangkan dari sisi penguasaan lapangan di wilayah TNBD, lembaga ini telah berpengalaman dan memahami berbagai permasalahan Orang Rimba. Jika Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Sarolangun dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan menyediakan tenaga pendidik yang mau dan bersedia mengajar anak-anak rimba maka kebutuhan akan tenaga pendidik dapat terpenuhi.

Jumlah tenaga pendidik atau lebih dikenal dengan nama fasilitator pendidikan baik yang dimiliki oleh KPA Sokola maupun KKI Warsi masing-masing hanya berjumlah dua orang tenaga pendidik. Hal ini tidak sebanding dengan luasnya wilayah TNBD dan tingginya mobilitas Orang Rimba dengan adanya budaya melangun, walaupun telah dibantu oleh Kader Pendidik dari anak-anak rimba namun belum bisa mengatasi permasalahan yang ada. Jika ada *political will* dari Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Sarolangun dengan merekrut guru-guru ataupun dengan menugaskan guru-guru yang telah diangkat menjadi PNS untuk ditugaskan secara khusus mengajar bagi anak-anak rimba akan dapat membantu kebutuhan tenaga pendidik. Jika melihat gambaran jumlah guru yang berada di Dinas Pendidikan baik pada Kabupaten Batang Hari maupun pada Kabupaten Sarolangun, sangat memungkinkan untuk diadakan perekrutan dan penugasan guru khusus untuk mengajar di wilayah TNBD. Hal ini dimaksudkan agar kebutuhan akan tenaga pendidik bagi anak-anak rimba dapat tercukupi. Kader pendidik dapat direkrut oleh pemerintah daerah sebagai tenaga pendidik, hal ini akan membantu mempermudah akses pendidikan bagi anak-anak rimba. Berikut ini gambaran jumlah guru yang berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Sarolangun.

Tabel 5.10
Banyaknya Guru Sekolah Dasar Menurut Kecamatan, Status Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Batang Hari Tahun 2009

Kecamatan	SD Negeri/Inpres		SD Swasta		Jumlah	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Mersam	115	168	-	-	115	168
2. Maro Sebo Ulu	118	124	4	8	122	132
3. Batin XXIV	107	194	-	-	107	194
4. Muara Tembesi	116	204	-	-	116	204
5. Muara Bulian	149	349	8	11	157	360
6. Bajubang	77	203	16	14	93	217
7. Maro Sebo Ilir	48	65	-	-	48	65
8. Pelayung	128	203	-	-	128	203
Jumlah	858	1.510	28	33	886	1.543
2007	664	1.236	22	24	686	1.260

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah guru pada Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Batang Hari adalah 2.429 orang terdiri dari 886 guru laki-laki dan 1.543 guru perempuan. Sedangkan jumlah tenaga pendidik pada Kabupaten Sarolangun, guru pada Taman Kanak-Kanak berjumlah 324 orang dan guru pada

sekolah dasar berjumlah 1.729 orang, dapat dilihat pada tabel 5.11 dan tabel 5.12 di bawah ini.

Tabel 5.11
Rasio Murid Terhadap Guru Pada Sekolah Taman Kanak-Kanak dan SD
Kabupaten Sarolangun Tahun 2007-2009

Kecamatan	Taman Kanak-kanak			Sekolah Dasar		
	Murid	Guru	Rasio	Murid	Guru	Rasio
1. Batang Asai	230	29	7,9	3.059	250	12,2
2. Limun	283	38	7,4	2.346	208	11,3
3. Cermin Nan Gedang	343	59	5,8	1.826	129	14,2
4. Pelawan	578	84	6,9	3.948	245	16,1
5. Singkut	820	87	9,4	4.454	212	21,0
6. Sarolangun	834	121	6,9	5.954	402	14,8
7. Batin VIII	508	55	9,2	2.977	197	15,1
8. P a u h	196	26	7,5	2.891	176	16,4
9. Air Hitam	275	30	9,2	3.037	146	20,8
10. Mandiangin	639	73	8,8	4.632	333	13,9
Jumlah 2009	4.706	602	7,8	35.124	2.298	45,3
Jumlah 2007	2.654	285	9	32.963	1.680	20
Jumlah 2008	2.998	324	9	33.573	1.729	19

Sumber: Diknas Kabupaten Sarolangun

Jumlah guru yang berada di Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Sarolangun tersebut cukup memberikan peluang untuk diadakan perekrutan untuk tenaga pendidik yang bersedia mengajar di Orang Rimba dengan diberikan fasilitas dan penghasilan yang lebih dibandingkan dengan guru yang mengajar pada sekolah dasar di luar TNBD. Dalam hal ini harus ada koordinasi dan kerjasama yang baik bagi pihak-pihak terkait untuk mewujudkan pendidikan khusus bagi anak-anak rimba.

Ditinjau dari aspek sumber belajar adalah alat atau rencana kegiatan yang akan dipergunakan sebagai media, di antaranya adalah kurikulum. Pada intinya kurikulum diperlukan dalam rangka menunjang terselenggaranya program pendidikan yang disusun sesuai dengan program yang diharapkan.

Sebagaimana dikemukakan Hamalik (2001:144) bahwa “kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar“. Dari pendapat tersebut, setiap program pendidikan perlu dibuat dengan perencanaan yang teratur dan memerlukan pedoman yang menuntun pendidik dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Untuk itu setiap program pendidikan memerlukan adanya kurikulum yang disusun sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan.

Kenyataan yang terjadi di lapangan, kurikulum pendidikan yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Sarolangun dalam proses belajar mengajar menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sedangkan kurikulum pendidikan yang digunakan oleh KPA Sokola dan KKI Warsi adalah kurikulum yang diramu sendiri dengan memasukkan budaya lokal Orang Rimba. Jika kita memperhatikan aspek eksternal pendidikan yang dilihat dari aspek geografis, demografis, sosial, ekonomi, adat, dan budaya Orang Rimba, kurikulum yang dijadikan sebagai pedoman untuk menuntun pendidik dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seharusnya memperhatikan aspek eksternal pendidikan di atas. Dalam Kurikulum perlu dimasukkan tentang budaya, seni, keterampilan tradisional, dan kepercayaan mereka dalam mempertahankan adat budaya rimba. Hal ini dimaksudkan untuk memperkecil permasalahan yang ada, sehingga Orang Rimba dapat menerima pendidikan dengan kesadarannya sendiri. Kurikulum yang digunakan baik oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Sarolangun maupun KPA Sokola dan

KKI Warsi dapat mengkolaborasikan kurikulum yang ada (KTSP) dengan kurikulum yang mengacu pada budaya lokal. Kurikulum Pendidikan Berbasis Budaya Lokal yang disusun disesuaikan dengan kelekatan budaya lokal anak didik. Kelekatan budaya lokal tersebut diurai dalam perlakuan tenaga pendidik yang diterapkan pada proses pembelajaran. Kurikulum yang digunakan dapat menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang ada sekarang, tetapi disusun berdasarkan kebutuhan belajar anak-anak rimba dengan berbasis pada adat budaya lokal setempat. Dalam merencanakan pola pendidikan formal yang berbasis budaya lokal, harus memperhatikan hal-hal berikut: kurikulumnya KTSP yang berbasis budaya lokal, ketahanan kultural Orang Rimba, metode pembelajaran lisan/oral/cerita karena Orang Rimba belum mengenal baca tulis, tenaga pendidik bisa mengajar huruf dengan cara oral disertai contoh benda nyata atau model, model pembelajarannya harus interaktif, kedisiplinan disesuaikan dengan adat budaya, waktu belajar fleksibel artinya menyesuaikan dengan kondisi kehidupan sehari-hari anak-anak rimba, pengetahuan tentang alam semesta, lingkungan.

Ditinjau dari aspek sarana prasarana, sebagaimana dikemukakan Mulyasa (2002:49-50) bahwa “manajemen sarana dan prasana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, dan penghapusan serta penataan“.

Kondisi yang ada di lapangan, terjadi kesenjangan antara sarana prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Sarolangun dibandingkan dengan sarana prasarana yang dimiliki oleh KPA Sokola dan KKI Warsi. Sarana prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Sarolangun begitu lengkap mulai dari gedung sekolah, meja belajar, bangku, buku-buku sekolah, dan peralatan sekolah lainnya. Sedangkan sarana prasarana yang dimiliki oleh KPA Sokola dan KKI Warsi masih sangat terbatas seperti fasilitas tempat belajar hanya berupa sebuah bangunan gubug terbuka tanpa sekat, alat-alat tulis sederhana, dan lebih banyak menggunakan media belajar dari sumber daya alam yang ada di hutan.

Dari aspek sumber fasilitas dan dana (SFD) sebagai faktor pendukung yang memungkinkan pendidikan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semua fungsi dan sumber daya administrasi pendidikan ini merupakan media atau perilaku berorganisasi yang diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan secara produktif baik untuk kepentingan perorangan maupun untuk kelembagaan.

Sebagaimana dikemukakan Gaffar (2000:1), bahwa “pembiayaan adalah salah satu komponen strategis dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang memberikan dampak multidimensional baik terhadap proses maupun output pendidikan. Keberhasilan suatu kebijaksanaan acapkali amat tergantung kepada faktor pembiayaan ini”.

Namun berdasarkan hasil temuan di lapangan, bahwa di keempat lembaga tersebut ternyata tidak terdapat perincian anggaran khusus yang berhubungan

dengan proses pelaksanaan pendidikan bagi anak-anak rimba. Berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, Mulyasa (2002:47) mengemukakan, bahwa:

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari.

Komponen keuangan dan pembiayaan tersebut perlu ada dan dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk dapat menunjang terselenggaranya tujuan pendidikan. Efisiensi internal sebagaimana dimaksud di atas, adalah merupakan penggunaan dana yang efektif berdasarkan komposisi item-item pengeluaran yang tepat, seperti dalam hal ketenagaan, sarana-prasarana, biaya operasional, pengelolaan dan lain sebagainya. Sedangkan efisiensi eksternal, adalah pengeluaran anggaran berdasarkan komposisi jenis dan atau jenjang pendidikan.

Dalam pengelolaan pendidikan bagi Orang Rimba perlu memperhatikan adat budaya lokal mereka. Kehidupan Orang Rimba sangat dipengaruhi oleh aturan-aturan hukum yang sudah diterapkan dalam bentuk seloko-seloko yang secara tegas dijadikan pedoman hukum oleh para pemimpinnya, khususnya Temenggung dalam membuat suatu keputusan. Seloko juga menjadi pedoman dalam bertutur kata dan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat Orang Rimba. Bentuk seloko itu antara lain: *bak emas dengan suasa, bak tali berpintal tigo, yang tersurat dan tersirat, mengaji di atas surat, banyak daun tempat berteduh, meratap di atas bangkai, dak teubah anjing makan tai, dimano*

biyawak terjen disitu anjing tetulung, dimano langit dipijak disitu langit dijunjung, bini sekato laki dan anak sekato bapak, titian galling tenggung negra.

Selain bentuk seloka di atas, seloko mantera mereka yang memiliki kepercayaan “*Sumpah Dewo Tunggal*” yang sangat mempengaruhi kehidupan adalah “*Hidup beranyam kuaw, bekambang kijang, berkebau ruso, rumah beatap sikai, badingding banir, balantai tanah yang berkelambu resam, suko berajo bejenang, bebatin bapanghulu*”. Artinya Orang Rimba mempunyai larangan berupa pantang berkampung, pantang beratap seng, harus berumah beratap daun kayu hutan, tidak boleh beternak, dan menanam tanaman tertentu, karena mereka telah memiliki ternak kuaw (burung hutan) sebagai pengganti ayam, kijang, ruso, babi hutan sebagai pengganti kambing atau kerbau. Jika warga Orang Rimba melanggar adat pusaka persumpahan nenek moyang, maka hidupnya akan susah.

Seloko adatnya adalah sebagai berikut “*di bawah idak berakar, diatai idak berpucuk, kalo di tengah ditebuk kumbang, kalau ke darat diterkam rimau, ke air ditangkap buayo*”. Artinya di bawah tidak ada akarnya, di atas tidak ada pucuknya, di tengah akan digigit kumbang, kalau ke darat akan dimakan harimau, ke sungai akan dimakan buaya. Kepercayaan tradisional mereka berkaitan dengan paham pollytheisme yang bersifat animisme dan dinamisme. Mereka mempercayai roh-roh halus serta percaya kepada tempat-tempat tertentu yang dikeramatkan.

Jika seloko dan mantera-mantera Orang Rimba tersebut dimasukkan ke dalam kandungan kurikulum dan dimaknai dalam pengelolaan pendidikan, dapat membantu proses percepatan penuntasan wajib belajar bagi anak-anak rimba yang

berusia sekolah. Dengan diterapkan bentuk seloko tersebut dapat dijadikan pedoman hukum, pedoman moral, pedoman dalam bertutur kata dan bertingkah laku bagi anak-anak rimba dalam kehidupan bermasyarakat Orang rimba. Kekawatiran orangtua akan terjadi perubahan adat kepada anak-anaknya yang bersekolah tidak akan terjadi dengan tetap menjaga kelestarian adat dan budaya lokal rimba.

3. Pandangan Orang Rimba Terhadap Pendidikan

Pandangan Orang Rimba terhadap pendidikan ada yang sudah menerima pendidikan dan sebagian besar masih menolak pendidikan. Pertama, pandangan masyarakat rimba yang masih menolak adanya pendidikan disebabkan karena pendidikan itu dianggap sebagai nilai baru dan akan mendatangkan perubahan. Orang Rimba sangat memproteksi diri dari budaya baru yang berasal dari luar. Orang Rimba menganggap pendidikan itu akan merubah adat mereka, dianggap akan memutuskan hubungan kekerabatan, akan terjadi perubahan pada anak-anak Orang Rimba, mereka takut anak-anak akan meninggalkan orangtua dan hutan. Pandangan Orang Rimba terhadap pendidikan dapat dikaitkan dengan kebiasaan, adat, dan budaya Orang Rimba dalam kehidupan sehari-hari. Ada ungkapan yang biasa dipakai Orang Rimba untuk menolak terjadinya perubahan, yakni “*sejak gagak hitam, kuntul putih diciptakan Tuhan...*”, yang artinya ‘sejak Tuhan menciptakan langit dan bumi seisinya...’. Ungkapan itu biasa digunakan dalam musyawarah untuk menolak terjadinya perubahan. Masyarakat rimba masih berkeyakinan bahwa pendidikan itu akan merubah adat budaya yang secara turun

temurun diwarisi dari nenek moyangnya, maka sebagian besar masih belum menerima pendidikan.

Adanya penolakan pendidikan juga disebabkan adanya budaya *nyemendo*, yaitu pihak laki-laki yang mengabdikan pada keluarga pihak anak perempuan untuk dijadikan calon istri. Tujuan *nyemendo* untuk menyakinkan keluarga perempuan bahwa laki-laki yang *nyemendo* layak dijadikan menantu dan sanggup menghidupi keluarganya kelak. Lamanya masa *nyemendo* ditentukan oleh pihak keluarga perempuan, jika mereka cepat yakin bahwa laki-laki itu mampu menghidupi keluarganya maka akan cepat diterimanya sebagai menantu. Anak perempuan yang dijadikan tempat *nyemendo* adalah anak perempuan usia sekolah, sehingga ini merupakan penghambat anak Perempuan Rimba untuk akses pendidikan.

Penyebab lain akan adanya penolakan adalah tentang tabu-tabu. Orang Rimba mempertahankan keteraturan sosial dan adat melalui berbagai tabu atau pantangan. Pelanggaran terhadap tabu-tabu itu akan dikenakan denda. Menurut Orang Rimba, tabu atau pantangan telah ditetapkan oleh nenek moyang mereka sejak mereka ada. Oleh karena itu tidak ada yang berhak mengubahnya. Tabu-tabu itu telah dijalankan oleh nenek moyang mereka dan sudah seharusnya dijalankan dengan baik oleh mereka. Adanya tabu-tabu merupakan wujud dari kebijaksanaan nenek moyang dalam menjaga adat. Adanya pendidikan juga dianggap tabu atau pantangan bagi Orang Rimba.

Penolakan adanya pendidikan ini juga terjadi pada masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) lainnya yang ada di Indonesia, seperti masyarakat Badui

pada awalnya juga menolak pendidikan. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Gurniwan (1994) bahwa:

Pendidikan sekolah tidak diterima oleh Orang Baduy karena dianggap melanggar pikukuh, begitu pula dengan pendidikan luar sekolah berupa pendidikan ketrampilan tidak boleh diikutinya, mereka hanya mengenal pendidikan keluarga dan pengarahan mengenai pikukuh yang diberikan oleh para orangtua dan atau baris kolot.

Adanya penolakan Orang Rimba terhadap upaya pendidikan baik pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah, pada satu sisi memang harus kita akui merupakan suatu masalah, namun pada sisi lain dapat dijadikan peluang bagi dinas pendidikan untuk memainkan perannya secara efektif dan efisien. Kesempatan bagi anak-anak akan pendidikan menurut laporan dari FAO (2008) menerangkan bahwa: *“In developing countries, 25 per cent of rural children do not attend primary school, compared to 16 per cent of urban children, and gender inequalities in acces to education remain 69 per cent of rural girls attend primary school compared to 73 per cent of rural boys”*.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa anak-anak yang kurang mampu di negara-negara berkembang hanya sedikit yang mempunyai peluang untuk mengikuti pendidikan, karena itu perlu adanya pembangunan di berbagai sektor khususnya pendidikan untuk masyarakat golongan bawah ini. Pendidikan untuk pembangunan masyarakat menurut Coombs & Ahmad (1987) bahwa: *“...di negara berkembang, kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak golongan bawah umumnya langka”*. Kondisi ini juga disebabkan oleh beberapa faktor yang didukung oleh lingkungan, kondisi keluarga, dan ekonomi yang mendukung kelangsungan hidup mereka. Anak-anak Perempuan Rimba dari kecil sudah

dididik untuk mandiri, membantu pekerjaan orangtua khususnya dalam mencari mata pencaharian sehari-hari seperti ikut membantu pekerjaan rumah tangga, mencari kayu bakar, ikut meramu, mengumpul buah-buahan di dalam hutan. Beberapa kondisi ini juga yang menyebabkan kurang beruntungnya peluang anak-anak Perempuan Rimba dalam akses pendidikan.

Dari berbagai kutipan di atas, jelas bahwa perlu adanya upaya, strategi, dan pendekatan agar dapat tercipta pendidikan bagi anak-anak rimba khususnya anak Perempuan Rimba kepada orangtua mereka supaya bisa menerima pendidikan. Pandangan masyarakat yang menerima pendidikan bagi anak-anak Perempuan Rimba bahwa pendidikan boleh diajarkan asal tidak merubah dan meninggalkan adat budaya rimba, yang telah menjadi tatanan kehidupan nenek moyang mereka sebelumnya. Pendidikan harus mengajarkan kepandaian dan ketrampilan agar anak-anak perempuan selain bisa baca, tulis, hitung, juga bisa mandiri. Pendidikan memang sudah seharusnya menjadikan hak anak-anak rimba. Dalam UUD 1945 telah dinyatakan bahwa pendidikan merupakan hak semua anak bangsa, dengan difasilitasi negara. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 5 ayat (3) disebutkan: warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Pada pasal 32 ayat (2) disebutkan pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Pasal ini salah satunya merupakan rujukan bagi anak-anak rimba khususnya anak Perempuan

Rimba. Orang Rimba memiliki hak yang sama di dalam hukum dan dijamin kebebasannya dari berbagai macam tindakan. Hal ini diperkuat dalam pasal 1 UN *Declaration on the Rights of Indigenous People*: “*Indigenous peoples have the right to the full enjoyment, as a collective or as individuals, of all human rights and fundamental freedoms as recognized in the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights and International human rights law*”.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) juga menekankan tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah meliputi: makanan pokok, kesehatan, pendidikan, perumahan, perlindungan dalam keluarga, demokrasi, partisipasi politik, perlindungan dari praktek perbudakan, penyiksaan, dan hukuman yang tidak manusiawi. Dalam hal ini pemerintah harus menjadi pelayan yang baik bagi rakyatnya dengan menyediakan berbagai kebutuhan yang dikategorikan sebagai kebutuhan dasar manusia.

Kedua, pandangan Orang Rimba yang sudah menerima pendidikan. Kondisi ini mengisyaratkan adanya harapan akan anak-anak perempuan rimba mereka pada sebuah perubahan ke arah kemajuan dari kondisi yang ada. Orang Rimba yang menerima pendidikan ini disebabkan karena mereka membutuhkannya untuk berinteraksi dan bertransaksi hasil jual beli hutan ke penduduk terdekat, supaya mereka tidak merasa dibohongi lagi. Pendidikan diharapkan dapat memberdayakan anak-anak supaya bisa setara dengan anak-anak lainnya di berbagai belahan dunia. Pendapat D Sambangi (2009) bahwa: “*education is a potent tool in the emancipation and empowerment of women*”.

Pendidikan adalah alat paten dalam emansipasi dan pemberdayaan perempuan, dari pendapat ini diharapkan melalui pendidikan dapat dijadikan alat untuk memberdayakan perempuan.

Pendapat ini juga didukung oleh perspektif dari pemberdayaan perempuan dalam konferensi di Hamburg, CONFINTEA V (1997) bahwa: “...a women is empowered when she is literate, educated, and has productive skills, has access to capital and self confidence”. Dalam hal ini seorang perempuan telah diberdayakan ketika dia berpendidikan, melek huruf, mempunyai pengetahuan, dan mempunyai keahlian yang produktif, mempunyai akses pada penghasilan atau uang dan percaya diri. Selain itu CONFINTEA V juga melaporkan tentang trend pendidikan perempuan di Karibia dijelaskan bahwa:

The trends in the Caribbean has been for women to take greater advantages of education. As a result, women have been demonstrating higher levels of achievement compared to men. Educational trends show: equal education opportunities for males and females in terms of acces at the pre-primary, primary, and secondary levels; enrolment in favour of females at the primary level in Bahamas and at the secondary level in St. Lucia; girls perform better in school on average; more female sit for the most sought after Caribbean Examination Council Exam.

Trend di Karibia adalah perempuan dapat mengambil banyak keuntungan dari pendidikan. Trend dalam pendidikan di Karibia menunjukkan bahwa kesempatan pendidikan yang adil antara perempuan dan laki-laki pada tingkat dasar sampai menengah, perempuan mempunyai kemampuan lebih baik di sekolah dan perempuan lebih banyak dicari untuk pekerjaan di Karibia. Keuntungan yang didapat dari pendidikan ini juga diharapkan dirasakan oleh anak-anak Perempuan Rimba walaupun masih pada tingkat minimal.

Orang Rimba yang membutuhkan pendidikan adalah mereka yang bermukim di pinggiran hutan dan dekat pemukiman penduduk desa. Kelompok Orang Rimba ini dikenal dengan *berdiom* yaitu Orang Rimba yang telah hidup menetap seperti penduduk kampung. Pendidikan bermanfaat bagi mereka untuk berinteraksi dan bertransaksi dalam jual beli hasil hutan dan hasil pertanian, supaya mereka tidak merasa dibohongi lagi oleh dunia luar. Orang Rimba pada kelompok ini sebagian sudah mengizinkan anak-anaknya untuk mengikuti pendidikan. Orang Rimba yang tinggal ditengah-tengah hutan kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas yang tidak berinteraksi dengan dunia luar sehingga mereka belum butuh akan pendidikan. Semua kebutuhan telah tercukupi dan tersedia di dalam hutan di dalam hutan. Karena semua kebutuhan telah tercukupi, mereka tidak perlu berinteraksi dan bertransaksi dengan dunia luar, sehingga mereka belum membutuhkan pendidikan baca, tulis, hitung.

Pandangan Orang Rimba tentang pendidikan saat ini sudah mulai ada perubahan dari yang dulunya menganggap pendidikan adalah sesuatu yang mengancam akan tata kehidupan Orang Rimba sampai pada perubahan pola pikir bahwa pendidikan penting dan bermanfaat untuk anak-anaknya. Terjadinya perubahan pola pikir Orang Rimba ini disebabkan oleh beberapa kondisi yang terjadi di dalam hutan. Mereka tidak bisa lagi menggantungkan hidup sepenuhnya pada hasil hutan yang semakin berkurang, supaya tetap bisa bertahan hidup mereka harus mengembangkan pola mata pencaharian dengan bercocok tanam, berladang. Interaksi sosial dengan masyarakat luar semakin meningkat, hal ini menimbulkan dampak positif dan negatif serta konflik dengan masyarakat luar

yang harus disikapi dengan sumber daya manusia Orang Rimba yang lebih baik. Menyadari akan hal ini, sebagian orangtua Orang Rimba telah mengizinkan anak-anaknya untuk bersekolah. Kesadaran orangtua akan pendidikan ini seharusnya ditangkap secara positif oleh pihak-pihak pemangku jabatan dengan menjembatani niat baik tersebut dalam bentuk program pendidikan yang nyata untuk mereka. Solusi untuk membuka pandangan Orang Rimba tentang pendidikan ini dapat dilakukan dengan pendekatan melalui tokoh adat Orang Rimba seperti: Temenggung, Wakil Temenggung, Depati, Mangku, Dubalang Batin, Menti, Tua Tenggana, dan tokoh masyarakat rimba. Kader pendidik, kader kesehatan, fasilitator desa, maupun anak-anak rimba yang telah mengikuti pendidikan baik pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Sarolangun maupun KPA Sokola dan KKI Warsi, dapat menjadi contoh dan figur bagi kelompoknya, sekaligus bisa mensosialisasikan akan manfaat pendidikan yang telah mereka dapat dari pendidikan.

4. Peran Perempuan Rimba Kaitannya dengan Pendidikan

Peran Perempuan Rimba jika dihubungkan dengan adat budayanya, Perempuan Rimba Sebagai pemegang adat dan merupakan simbol kekuatan adat rimba sehingga mereka selalu menyimbolkan perempuan sebagai sosok seorang raja. Seperti dalam seloka atau undang-undang adat rimba, perempuan dianggap sebagai *raja nang ditakutko dan raja nang dikemaluko* (hukum empat pertama raja). *Raja nang ditakutko* adalah raja yang ditakuti yaitu istri orang lain. Dalam hal ini individu rimba dilarang untuk berbicara atau berjalan berdua di tempat

sepi atau di rumah tanpa kehadiran suaminya, walaupun tanpa sengaja tetap dinilai tabu. Sedangkan *raja nang dikemaluko* yaitu anak gadis yang dipermalukan artinya individu orang rimba terutama laki-laki harus malu dan menjaga harga diri anak perempuan orang lain, laki-laki harus bisa menjadi suri teladan dan melindungi kaum perempuan. Perempuan Rimba sangat diprotek dari pengaruh luar untuk tetap menjaga dan melestarikan adat budaya rimba. Simbul dan kekuatan adat ini pada satu sisi menguntungkan Perempuan Rimba, namun di sisi lain merugikan Perempuan Rimba. Perempuan Rimba diuntungkan dengan protek yang tinggi mereka merasa aman, dilindungi dimanapun mereka berada, namun dari sisi pemberdayaan diri Perempuan Rimba sebenarnya dalam kungkungan adat budaya yang membuat tertutupnya akses perubahan. Hal ini jika dikaitkan dengan kesetaraan dan keadilan yang diungkapkan oleh Ahmad Zulfa (2009) bahwa:

Peran Islam untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan, adalah: membangun iman dan menumbuhkan kesadaran akan kehadiran Allah dalam segala aktivitas; menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia (*laqad karramnā banī Ādam*) dan paling bagus (*aḥsanu taqwīm*); menumbuhkan kesadaran bahwa ciptaan Allah yang berpasangan bukan untuk mengecilkan arti salah satu terhadap yang lainnya; memahami bahwa perbedaan di antara segala makhluk Allah yang berpasangan ini adalah fitrah, pemberianNya, dan merupakan gambaran kemajemukan yang harus dihormati dan digunakan secara sehat untuk membangun kehidupan yang lebih baik; dan menumbuhkan sikap hati-hati terhadap perkembangan teori gender, agar tidak hanyut dengan perkembangan yang terjadi, sebab tujuan akhir seorang muslim adalah ridha Allah.

Pendapat tersebut menggambarkan bahwa kondisi Perempuan Rimba harus disikapi dengan menumbuhkan kesadaran bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan yang berpasangan harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain tanpa mengecilkan arti dari salah satu terhadap yang lainnya. Perbedaan

antara laki-laki dan perempuan tidak seharusnya menyebabkan adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dikenal dengan kesenjangan gender (*gender gap*) yang pada gilirannya menimbulkan permasalahan gender. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan tersebut adalah *Gender Empowerment Measurement* (GEM) dan *Gender Related Development Index* (GDI) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari *Human Development Index*. Berdasarkan *Human Development Report* tahun 2009 GDI Indonesia menempati peringkat 91 dari 173. Sedangkan HDI berada pada peringkat 110 dari 173 negara, inipun masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, misalnya Malaysia, Thailand, Philipina yang masing-masing berada pada peringkat 59, 70, dan 77. Untuk GDI pada peringkat 54, 60, dan 63. Untuk memperkecil kesenjangan tersebut maka kebijakan dan program yang dikembangkan saat ini dan mendatang harus mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional, disamping meningkatkan kualitas hidup perempuan itu sendiri. Untuk meningkatkan tingkat kesetaraan dan keadilan Perempuan Rimba perlu dilakukan sosialisasi pemberdayaan baik kepada laki-laki maupun Perempuan Rimba.

Pendapat tentang adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan perempuan juga diungkapkan oleh Lawrence E. Harrison and Samuel P. Huntington (2000), bahwa:

Women, who are rarely in a position to make the religious or social rules, tend to be swept up into a culture in the broadest sense, which takes in religion, the economy, the arts, the law, and entertainment, as well as the often subtly defined rules of social behavior involving public life, family relationships, and the place of children. A male-dominant culture is, in short, the atmosphere in which most women live all the time, with fewer lines of definition between work and home, career and family, than many men in most countries enjoy.

Perempuan secara hukum agama maupun sosial pada posisi lemah yang berpengaruh pada kehidupan keluarga dan anak-anaknya, sedangkan karena faktor budaya laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Ketimpangan hubungan ini menjadikan kaum perempuan belum sama baiknya dengan kehidupan laki-laki, meskipun secara hukum dimana-mana kaum perempuan sudah memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki, misalnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, hak memilih dalam pemilihan umum dan sebagainya.

Kenyataan di lapangan, Perempuan Rimba secara adat budaya mempunyai posisi yang tinggi ditinjau dari sisi gender, dengan indikator:

- pertama Perempuan Rimba sebagai simbol kekuatan dalam seloka atau undang-undang adat rimba, perempuan dianggap sebagai *raja nang ditakutko dan raja nang dikemaluko*
- kedua harta kekayaan dalam rumah tangga semua menjadi milik Perempuan Rimba
- ketiga Perempuan Rimba sebagai penentu utama dalam persetujuan pernikahan anak-anaknya
- keempat dalam rapat adat untuk pengambilan keputusan seorang istri sangat dominan dalam mempengaruhi keputusan yang diambil oleh suami.

Kenyataan ini menunjukkan ada beberapa sisi kekuatan Perempuan Rimba dalam adat budaya mereka. Kondisi ini dapat dijadikan kekuatan dalam program memberdayakan Perempuan Rimba, dengan harapan kalau Perempuan Rimba telah berdaya di berbagai bidang kehidupan akan membawa kehidupan yang lebih baik di masa depan keluarga dan anak-anaknya.

Peran perempuan dalam pembangunan setidaknya mengandung dua pengertian. Pertama, pembangunan dapat memberikan kemudahan kepada perempuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya. Kedua, pembangunan juga memberikan kemungkinan bagi perempuan untuk mengalirkan tenaga, keterampilan, pikiran, dan keahlian dalam proses pembangunan. Pada saat ini terdapat kecenderungan yang cukup besar dimana perempuan menduduki peranan yang dominan dalam pekerjaan mencari nafkah. Perempuan turut berperan serta dalam bidang pertanian, peternakan, perdagangan, industri, pemerintahan, dan bahkan kegiatan politik.

Berkaitan dengan pemberdayaan perempuan menurut Stromquist (1993) dikatakan bahwa:

Empowerment is a four dimensional process and that to act as equal participants in development, women have to be empowered in these four dimensions: cognitive, psychological, economic, and political. Cognitive empowerment is the ability to critically review one's experiences in order to notice or identify patterns of behavior which lead to dependence and hence reinforce subordination. Psychological empowerment is concerned with women's feelings and the belief that they can change their situation themselves. Economic empowerment involves the ability for women to engage in income-generating activities that will enable them to have access to independent income. Political empowerment entails the ability to analyze situation politically and to mobilize for social change.

Pemberdayaan adalah sebuah proses untuk mengubah distribusi tenaga dalam hubungan interpersonal maupun institusi di masyarakat, perempuan harus diberdayakan melalui pemberdayaan secara kognitif, psikologi, ekonomi, dan politik. Pemberdayaan secara kognitif diharapkan perempuan mempunyai kemampuan untuk secara kritis menilai pengalaman seseorang untuk mengetahui atau dapat menganalisa kebiasaan dan pola seseorang yang mengarah pada ketergantungan dan akhirnya memaksa sebuah subordinasi. Pemberdayaan secara psikologi berhubungan dengan kepercayaan dan perasaan perempuan bahwa mereka mampu merubah situasi atau kondisi itu sendiri. Pemberdayaan ekonomi berhubungan dengan kemampuan perempuan yang berkaitan dengan aktivitas pada pendapatan sehingga mengarahkan mereka pada akses untuk mendapatkan penghasilan sendiri. Sedangkan pemberdayaan politik berhubungan dengan kemampuan untuk menganalisa situasi politik dan bergerak demi perubahan sosial. Pemberdayaan perempuan yang dikemukakan oleh Stromquist tersebut dapat diberdayakan pada Perempuan Rimba karena kondisi mereka yang masih lemah dari berbagai segi kehidupan.

Kenyataan yang ada di lapangan, dari sisi peran perempuan dan pemberdayaan Perempuan Rimba masih banyak yang belum diberdayakan. Perempuan Rimba sebagian besar belum berperan baik dalam bidang pendidikan maupun kesehatan, hal ini terlihat dari beberapa kondisi Perempuan Rimba:

- Pertama, Perempuan Rimba secara psikologis masih merasa malu, minder, menundukkan wajah ketika diajak berbicara, bahkan ada yang lari ketika bertemu dengan orang luar.

- Kedua, Perempuan Rimba secara sosial masih tertutup dalam berinteraksi, hanya terbatas dengan kelompoknya, dan dilarang untuk berkomunikasi dengan orang luar.
- Ketiga, Perempuan Rimba secara ekonomi masih belum mandiri, belum mampu, miskin, dan masih menggantungkan hidupnya kepada laki-laki.
- Keempat, Perempuan Rimba secara politis masih rendah, belum bisa mengambil keputusan sendiri. Kondisi ini perlu disikapi dengan langkah memberdayakan Perempuan Rimba dari berbagai bidang.

Gambaran tentang kondisi Perempuan Rimba dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.12
Jenis Ketidakberdayaan Perempuan Rimba di Kabupaten Sarolangun

NO	Jenis Ketidakberdayaan	Karakteristik
1	Secara Psikologis	masih merasa malu minder belum percaya diri menundukkan wajah ketika diajak berbicara lari ketika bertemu dengan orang luar
2	Secara Sosial	masih tertutup dalam berinteraksi terbatas dengan kelompoknya dilarang untuk berkomunikasi dengan orang luar
3	Secara Ekonomis	masih belum mandiri belum mampu miskin masih menggantungkan hidupnya kepada laki-laki
4	Secara Politis	belum bisa mengambil keputusan sendiri

Berkaitan dengan hal ini, Payne (2001) mengemukakan bahwa:

...to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from the environment to clients.

Suatu proses pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan dan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang mereka miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Pemberdayaan yang merupakan terjemahan dari kata aslinya "*empowerment*" menurut Webster (1996:3) mengandung dua arti: pertama adalah *to give power or authority to*, dan yang kedua berarti *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama, diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua diartikan sebagai memberi kemampuan atau keberdayaan.

Sedangkan proses pemberdayaan menurut Kindervatter (2005:209), dijelaskan bahwa:

People gaining an understanding of and control over social, economic, and/or political force in order to improve their standing in society. In other words, as an empowering process is oriented toward influencing socio-economic structures and relationships through group action tracking.

Proses pemberdayaan berarti kemampuan seseorang atau masyarakat untuk memahami dan mengendalikan keadaan sosial, ekonomi, dan atau kemampuan politiknya yang sangat diperlukan dalam upaya memperbaiki kedudukannya di masyarakat. Proses pemberdayaan adalah setiap usaha pendidikan yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran atau pengertian dan kepekaan pada peserta didik terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan atau

politik sehingga pada akhirnya peserta didik memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat.

Pemberdayaan perempuan sering dipahami sebagai proses penumbuhan kesadaran diri agar perempuan mampu berkembang secara optimal dan mampu membuat rencana, mengambil inisiatif, mengorganisir diri, dan bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya. Kesadaran kritis tersebut dapat dicapai apabila perempuan mampu melihat ke dalam diri mereka sendiri untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya.

Pendekatan kebijakan yang berkaitan dengan kedudukan perempuan dalam pembangunan telah dikaji oleh Moser (1993) ada lima pendekatan, yaitu: *“the welfare approach, the equity approach, the anti-poverty approach, the efficiency approach, the empowerment approach”*. Lima pendekatan kebijakan yang mencakup pendekatan kesejahteraan, keadilan, pengentasan kemiskinan, efisiensi, dan pemberdayaan ini diharapkan dapat memberdayakan perempuan secara maksimal.

Pendekatan pemberdayaan (*the empowerment approach*) adalah pendekatan yang menekankan pentingnya meningkatkan keberdayaan perempuan dan mengartikan pemberdayaan bukan dalam konteks mendominasi orang lain. Perempuan adalah makhluk sosial yang memerlukan kemandirian dan kecakapan dan dengan kemandirian dan kecakapannya tersebut perempuan diharapkan memiliki kemampuan dan kekuatan untuk memanfaatkan akses yang semakin terbuka terhadap berbagai sumber-sumber sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Pada tataran praktek, istilah pemberdayaan perempuan seringkali digunakan dalam konteks peningkatan ekonomi dan taraf hidup. Pemberdayaan identik dengan penumbuhan dan penguatan kesadaran diri untuk mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan mampu berpartisipasi dalam aktivitas sosial, budaya, ekonomi, dan politik, baik secara individu maupun kelompok. Pemberdayaan perempuan erat kaitannya dengan peran perempuan itu sendiri baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Mutawali (2001:12), menyebutkan:

Peranan perempuan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek intern dan ekstern. Aspek intern berupa peranannya dalam kehidupan keluarga, yaitu mendidik dan memelihara anak-anak serta membina keluarga agar menjadi keluarga yang sehat dan sejahtera lahir dan batin. Sedangkan aspek ekstern peranannya di luar keluarga, yakni turut membangun masyarakat sebagai pelaksana pembangunan.

Dari pendapat di atas, kenyataan di lapangan Perempuan Rimba masih berperan pada aspek intern, peran Perempuan Rimba masih sebatas dalam kehidupan keluarganya belum pada tataran aspek ekstern yaitu berperan ke masyarakat luas khususnya Orang Rimba. Temuan penelitian di lapangan, peran Perempuan Rimba kaitannya dengan pendidikan masih banyak bertumpu pada pendidikan informal. Pendidikan informal yang diberikan kepada anak-anaknya khususnya anak perempuan, dapat dikelompokkan menjadi tujuh bagian, yaitu:

- Pertama pendidikan rumah tangga yang mencakup: memperkenalkan peralatan rumah tangga, cara memasak, mengurus rumah, mengasuh adik-adiknya, dan didikan yang berkaitan dengan kegiatan di dalam rumah.
- Kedua, pendidikan sosial yang mencakup: bagaimana harus berinteraksi dengan sesama Orang Rimba maupun dengan masyarakat luar. Cara

berinteraksi dengan masyarakat di dalam Orang Rimba sendiri diajarkan bagaimana tatacara bergaul dengan teman sebaya, bagaimana bersikap dengan orang yang lebih dewasa termasuk kakak atau saudara yang umurnya lebih tua, bagaimana harus bersikap kepada lawan jenis, dan bagaimana harus bersikap hormat kepada orangtua atau tua tengganai di Orang Rimba. Selain itu anak-anak perempuan juga diajarkan bagaimana harus bersikap hati-hati kepada masyarakat luar ketika mereka berinteraksi ke dunia luar.

- Ketiga, pendidikan ekonomi yang mencakup: pendidikan yang berkaitan dengan mata pencaharian, seperti cara berburu, cara meramu, cara berladang, cara mencari ikan di sungai, cara menyadap getah di kebun, cara mencari jernang, dammar di hutan, cara mencari buah-buahan, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan mencari kehidupan sehari-hari. Kehidupan Orang Rimba sebagian pekerjaan laki-laki juga dikerjakan oleh perempuan.
- Keempat, pendidikan ketrampilan yang mencakup: cara menganyam dalam membuat tikar, cara membuat ambung, cara membuat alat-alat sederhana yang bahannya dibuat dari rotan atau dammar.
- Kelima, pendidikan religi yang mencakup ajaran mantra-mantra untuk menjaga keselamatan dan kesehatan agar mereka selalu dilindungi oleh Dewa-Dewa dalam menjalankan segala aktivitasnya.
- Keenam, pendidikan seni atau budaya yang mencakup: ajaran untuk berpantun, ajaran berseloka, ajaran bernyanyi, menari, atau ajaran ketangkasan yang berkaitan dengan seni dan budaya Orang Rimba.

- Ketujuh, pendidikan kesehatan yang mencakup ajaran kebersihan badan, pakaian, rumah dan pekarangan, belajar meramu obat-obatan yang berasal dari akar dan tumbuh-tumbuhan di dalam hutan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.13
Jenis Pendidikan Informal Perempuan Rimba

No	Jenis Pendidikan Informal	Materi Ajar
1	Pendidikan Rumah Tangga	cara memasak, mengurus rumah, mengasuh adik-adiknya
2	Pendidikan Sosial	berinteraksi dengan sesama Orang Rimba tatacara bergaul dengan teman sebaya, bersikap dengan orang yang lebih dewasa termasuk kakak atau saudara, bersikap kepada lawan jenis, bersikap hormat kepada orangtua atau tua tengganai di Orang Rimba. diajarkan bagaimana harus bersikap hati-hati kepada masyarakat luar
3	Pendidikan Ekonomi	cara berburu, cara meramu, cara berladang, cara mencari ikan di sungai, cara menyadap getah di kebun, cara mencari jernang, dammar di hutan, cara mencari buah-buahan, kegiatan lain yang berkaitan dengan mencari kehidupan sehari-hari
4	Pendidikan Ketrampilan	cara menganyam dalam membuat tikar, cara membuat ambung, cara membuat alat-alat sederhana yang bahannya dibuat dari rotan atau dammar
5	Pendidikan Religi	ajaran mantra-mantra untuk menjaga keselamatan ajaran mantra-mantra untuk menjaga kesehatan
6	Pendidikan Seni/Budaya	ajaran untuk berpantun, ajaran berseloka, ajaran bernyanyi, menari, ajaran ketangkasan yang berkaitan dengan seni dan budaya
7	Pendidikan Kesehatan	ajaran membersihkan badan, membersihkan pakaian, membersihkan rumah dan pekarangan,

		belajar meramu obat-obatan yang berasal dari akar dan tumbuh-tumbuhan
--	--	---

Perempuan Rimba sebagai seorang ibu rumah tangga merupakan salah satu komponen dalam keluarga yang bersama-sama dengan suami dan anak-anaknya menjalankan fungsi-fungsinya dalam keluarga. Perempuan secara kodrati sebagai penerus keturunan, seperti yang diungkapkan oleh Dewantoro (1961) bahwa: "...dalam keluarga wanita secara kodrati dinamakan pemangku turunan, sedangkan pria dinamakan pangkal turunan...". Hubungan antara anggota keluarga didasarkan atas persamaan cinta kasih yang suci dan murni dan tidak ada maksud untuk menguntungkan diri pribadi yang merugikan anggota keluarga. Perempuan sebagai ibu dalam rumah tangga mempunyai kedudukan yang sama tinggi nilainya. Kedudukan seorang ibu adalah memelihara rumah tangga, pengasuh, serta pendidik anak-anaknya. Ada lima fungsi seorang istri menurut Sikun Pribadi (1988) yaitu: "sebagai pendamping suami (*helping mate*), istri sebagai teman hidup (*companion*), sebagai ibu rumah tangga (*home maker*), istri sebagai sexpartner, dan sebagai ibu anak-anak (*mother*) atau sebagai pendidik".

Peran perempuan sebagai seorang istri memang berat, diharapkan dapat menjalankan perannya dengan baik kepada seluruh anggota keluarganya. Seorang ibu sebagai istri dalam menghadapi suaminya tidak boleh menganggapnya sebagai sekutu, menganggap sebagai kawan akrab yang dengan potensinya akan bersama-sama menggalang kesejahteraan dan kemuliaan keluarga. Sejalan dengan pendapat ini Morton Hunt (1970) mengungkapkan: "*I mean a female who is neither man's indentured servant, nor sharp-tongued tyrant, but his friendly collaborator and*

equal, who moreover, uses up her aggressive energies not upon him and the children, but sublimates them into activities or work, and so competes only with the outside world”.

Pandangan ini menempatkan kaum perempuan tidak lagi menjadi budak kaum laki-laki tetapi lebih kepada teman sejawat yang akan menggunakan energi atau kemampuannya untuk meningkatkan aktivitas-aktivitas yang kreatif sehingga bisa berkompetisi dengan masyarakat di sekitarnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, dalam buku *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan*, Tan (1996:26), menyatakan bahwa:

Dewasa ini perempuan memperoleh kesempatan lebih majemuk. Perempuan bukan semata-mata tampil sebagai anggota keluarga saja, tetapi ia mulai tampil dan berkesempatan memainkan perannya sebagai makhluk sosial dalam menjalin hubungan dengan suami, anak, maupun dengan masyarakat luas lainnya. Oleh karenanya, peran perempuan dalam pembangunan bangsa diarahkan pada penghapusan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi, partisipasi aktif dalam masyarakat, stabilisasi nasional, dan pembangunan berkelanjutan.

Peran perempuan dalam pendidikan dapat dimaksimalkan dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya lokal yang ada pada Orang Rimba. Relasi gender antara laki-laki dan Perempuan Rimba tercermin dalam pepatah *‘bini sekato laki’* Artinya seorang istri harus patuh terhadap suami. Perintah suami asalkan tidak mencelakakan harus dipatuhi oleh istri. Apabila tidak dipatuhi maka sang suami bisa mengadu kepada Tenganai. Hal ini berkaitan dengan hubungan kekuasaan, dimana prinsip dasar pengaturan sosial Orang Rimba adalah; *‘Alam sekato Tuhan, rakyat sekato pengulu, rumah sekato tengganai, bini sekato laki, adik sekato kakak’* Artinya alam seperti apapun kondisinya adalah atas kehendak Tuhan,

rakyat patuh terhadap penguasanya, urusan rumah harus mematuhi tengganai, istri harus patuh terhadap suami, dan adik harus patuh terhadap kakak. Apabila seorang Perempuan Rimba tanpa alasan jelas tidak mematuhi perintah suami maka denda dijatuhkan. Dalam melakukan pemberdayaan terhadap Perempuan Rimba harus ada ijin dari laki-laki rimba sebagai suaminya terlebih dahulu.

Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan perempuan tanpa melibatkan kerjasama dengan kaum laki-laki tidak banyak menampilkan hasil yang signifikan. Pendekatan pertentangan (dikotomis) dirasa kurang membawa hasil yang memadai bahkan timbul sinistis (*male backlash*) dari kaum laki-laki terhadap perjuangan tersebut. Berdasarkan berbagai studi maka tema WID (*Women in Development*) atau perempuan dalam pembangunan diubah menjadi pendekatan WAD atau (*Women and Development*) atau perempuan dan pembangunan. Kata dalam diganti dengan kata dan yang memberi makna bahwa kualitas (mutu) kesertaan lebih penting daripada sekedar kuantitas (jumlah). Dari studi Anderson (1992) dan Moser (1993) memberikan rekomendasi bahwa tanpa kerelaan, kerjasama, dan keterlibatan kaum laki-laki maka program pemberdayaan perempuan tidak akan berhasil dengan baik. Oleh karena itu dipergunakanlah pendekatan gender yang kemudian dikenal dengan *Gender and Development* (GAD), suatu paradigma baru yang menekankan pada prinsip hubungan kemitraan dan keharmonisan antara perempuan dan laki-laki atau sebaliknya.

Agama Islam memandang dimensi perempuan dalam kiprahnya bagi kemaslahatan pembangunan sebagaimana konfirmasi Allah dalam Al-Quran

“Barang siapa yang melakukan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik” (QS. An-Nahl:97). Demikian Islam mengajarkan kepada umatnya bagaimana seseorang dituntut senantiasa berkiprah secara nyata, sehingga menimbulkan dampak positif bagi diri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya.

Berkaitan peran perempuan, Ahmad Zulfa (2009) berpendapat:

Tujuh karakteristik Islam menurut Al-Qardhawi: pertama, *Rabbaniyyah* (ketuhanan), kedua *Insaniyyah* (kemanusiaan), ketiga *Syumul* (universal), keempat *Al-Wasthiyyah* (moderat), kelima *Al-Waqi'iyah* (kontekstual), keenam *Al-Wudhuh* (jelas), dan ketujuh menyatukan *tathawwur* (transformasi) dan *tsabat* (konsistensi).

Jika kita melihat Perempuan Rimba dari kacamata atau cara pandang kita sebagai orang luar di luar Perempuan Rimba, kita masih melihatnya mereka belum berdaya, lemah, namun jika kita melihatnya dari cara pandang mereka sebagai perempuan dan Orang Rimba, sebenarnya mereka telah berdaya dan lebih hebat dari kita sebagai perempuan luar. Kenyataan ini bisa kita lihat dengan berbagai kondisi yang ada antara lain, yaitu Perempuan Rimba mempunyai berbagai potensi yang telah dimiliki secara turun temurun dari nenek moyangnya. Sesuai dengan temuan di lapangan, Perempuan Rimba mempunyai beberapa potensi yang tumbuh secara alami, yaitu:

- Potensi alam yang mencakup memanfaatkan benda-benda yang disediakan oleh alam di hutan
- Potensi Perempuan Rimba yang mencakup keterampilan membaca alam, keterampilan bercocok tanam secara sederhana, keterampilan mengumpulkan,

keterampilan untuk meramu obat-obatan tradisional dengan menggunakan akar dan daun-daunan.

Potensi Perempuan Rimba ini harus tetap dipelihara dan dikembangkan agar mereka mempunyai kesempatan dalam memberdayakan dirinya, keluarganya, maupun kelompoknya.

Dari beberapa uraian di atas, menunjukkan bahwa Perempuan Rimba masih membutuhkan uluran tangan untuk diberdayakan dari segala aspek kehidupan. Bagi kehidupan mereka, kondisi ketidakberdayaan ini tidak merupakan suatu masalah baik bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun kelompoknya, namun dengan semakin tingginya interaksi sosial dengan masyarakat luar dan tuntutan akan perubahan Perempuan Rimba harus diberdayakan. Pemberdayaan Perempuan Rimba dapat dilakukan melalui:

- Diberdayakan secara psikologis, diupayakan dari mereka yang malu, minder, takut dapat berubah menjadi percaya diri, berani baik dengan kelompoknya maupun dengan masyarakat luar.
- Diberdayakan secara sosial, dengan kondisi yang sulit berkomunikasi, sulit berinteraksi diharapkan mereka dapat lancar berinteraksi baik dengan kelompoknya maupun dengan masyarakat luar.
- Diberdayakan secara ekonomi, agar mereka mampu dan dapat tercukupi kebutuhan hidupnya dan bisa mandiri.
- Diberdayakan secara politik, agar mereka mampu untuk mengambil keputusan sendiri terutama yang mencakup tentang kehidupannya.

Beberapa pemberdayaan tadi dapat dijalankan melalui pendidikan formal, pendidikan non formal, maupun pendidikan informal dalam keluarga. Pemberdayaan bagi perempuan dewasa dapat dibentuk kelompok atau perkumpulan Perempuan Rimba melalui pendekatan dengan istri Temenggung sebagai pemimpin mereka, dengan diberikan ketrampilan yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di hutan seperti anyaman, tikar. Selain itu dapat dibentuk kegiatan kelompok arisan, kegiatan memasak, dan kegiatan kesehatan. Dengan berbagai kegiatan tersebut diharapkan mereka akan lebih memberdayakan Perempuan Rimba sehingga mereka merasa setara, mandiri, dihargai, dan percaya diri.

Dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pemberdayaan Perempuan Rimba supaya program tersebut berhasil, terlebih dahulu pemberdayaan diberikan kepada laki-laki rimba. Dengan harapan kalau laki-laki rimba sebagai suami sudah diberdayakan akan berdampak pada perubahan pola pikir, sikap, dan perlakuan terhadap istrinya sehingga terjadi kemitrasejajaran dalam rumah tangga. Selain itu dapat mempercepat akses pendidikan dan pemberdayaan Perempuan Rimba.

5. Strategi Pengelolaan Pendidikan dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Rimba

Strategi pengelolaan pendidikan seharusnya melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik dalam upaya pemberdayaan Perempuan Rimba. Kenyataan yang ada di lapangan, perencanaan pendidikan formal bagi Orang Rimba secara umum hanya didorong untuk mau bersekolah. Berkenaan dengan perencanaan pendidikan dibutuhkan solusi dengan

merencanakan pendidikan berbasis budaya lokal. Dalam pengorganisasian pendidikan bagi Orang Rimba, diorganisir oleh lembaga yang terkait dan yang melaksanakan pendidikan yaitu pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat. Pelaksanaan pendidikan yang mencakup tenaga pendidik, anak didik, gedung sekolah, kurikulum, metode pembelajaran, sarana prasarana, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan Orang Rimba. Kenyataan yang ada di lapangan, dalam pelaksanaan pendidikan bagi Orang Rimba belum ada strategi yang khusus diperuntukkan anak-anak rimba. Pengelolaan pendidikan bagi anak-anak rimba masih dibaurkan dengan penduduk desa terdekat, guru-guru yang mengajar masih memperlakukan sama dengan anak-anak lainnya, kurikulum yang dipergunakan disamakan, metode ajarnya juga disamakan, tanpa ada pelayanan khusus untuk anak-anak rimba. Pengawasan pelaksanaan pendidikan dilakukan oleh pemerintah melalui penilik sekolah dan kepala sekolah. Seharusnya pelaksanaan pendidikan bagi anak-anak rimba dilakukan evaluasi, apakah pengelolaan pendidikan sudah diterima, bisa memberdayakan Orang Rimba. Strategi pengelolaan pendidikan bagi anak-anak rimba oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Sarolangun seharusnya mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendidikan, namun kenyataannya belum ada realisasinya. Perencanaan pendidikan secara umum hanya didorong untuk bersekolah di sekolah dasar terdekat. Penyelenggaraan pendidikan untuk anak-anak rimba kenyataannya masih dibaurkan dengan penduduk desa terdekat, belum ada pengelolaan pendidikan secara khusus untuk anak-anak rimba. Pihak Dinas

Pendidikan hanya memberikan stimulus kepada anak-anak rimba yang bersekolah di SD terdekat berupa bantuan alat tulis sekolah, tas sekolah, pakaian seragam, dan bantuan biaya pendidikan.

Strategi pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan oleh KPA Sokola dalam perencanaan pendidikan dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan Orang Rimba, mengadakan pendekatan melalui bahasa rimba, berusaha untuk diterima oleh Orang Rimba, dan merencanakan program kegiatan pendidikan yang sesuai kebutuhan Orang Rimba. Dalam pengorganisasian pendidikan dilakukan dengan mengorganisir Orang Rimba dengan melakukan beberapa pendekatan baik kepada anak-anak usia sekolah maupun kepada orangtuanya, diorganisir adat budayanya, bahasanya, dan memberikan motivasi kepada anak-anak rimba agar mau belajar. Dalam pelaksanaan pendidikan lebih fleksibel disesuaikan dengan kondisi anak-anak rimba. Tempat belajar bertempat di sebuah gubug yang terbuat dari kayu dengan alas papan dan beratap daun rumbia, jam belajarnya bebas bisa pagi hari, siang hari, dan malam hari. Bahasa pengantar pada proses belajar mengajar yang digunakan adalah bahasa rimba, hal ini memudahkan anak-anak rimba dalam menerima pelajaran. Ketika anak-anak rimba berpindah tempat ke tempat baru karena budaya melangun, maka gurunya siap untuk membawa pindah peralatan belajar ke tempat baru tersebut. Kurikulum dan materi ajar yang digunakan dengan mengkolaborasikan budaya lokal Orang Rimba. Selain diajarkan baca, tulis, hitung, juga diajarkan tentang pengenalan teknologi sederhana untuk membantu mempermudah dalam mencari mata pencaharian sehari-hari, juga diajarkan tentang kesehatan badan. Dalam

pengawasan pelaksanaan pendidikan dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat rimba.

Strategi pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan oleh KKI Warsi baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sama dengan yang dilakukan oleh KPA Sokola. Strategi lain yang dilakukan oleh KKI Warsi adalah dengan menjembatani anak didiknya yang sudah lancar baca, tulis, hitung, untuk diikutkan belajar pada sekolah dasar terdekat. Hal ini bertujuan agar pendidikan anak-anak rimba dapat diakui secara formal sehingga dapat dipergunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Salah satu anak rimba yang dibantu KKI Warsi untuk mengikuti pendidikan di SD terdekat adalah Besudut, tahun 2010 ini lulus SD dan akan melanjutkan ke SMP Terbuka. Besudut juga dijadikan kader kesehatan untuk membantu fasilitator kesehatan dalam melayani kebutuhan kesehatan Orang Rimba.

Laporan dari *UNDP Human Development* (2008) bahwa: “*Women and young girls have to allocate large amounts of time to the collection of firewood, compounding gender in equalities in livelihood opportunities and education*”. Laporan tersebut menjelaskan bahwa kaum perempuan kurang beruntung dalam mengikuti pendidikan karena berbagai faktor kehidupan.

Bertitik tolak dari berbagai kondisi yang ada, maka diperlukan upaya pemberdayaan Perempuan Rimba melalui pendidikan dan dibutuhkan strategi dalam melakukan pendekatan kepada orangtua mereka. Berkaitan dengan strategi, Sharpin (1985:6) merumuskan bahwa: “*strategy is plan or course of action which is of vital, pervasive, or continuing importance to the organization as whole*”.

Strategi sebagai pedoman melakukan aksi memiliki sifat sangat dibutuhkan, pengaruhnya mampu menembus dalam arti mewarnai berbagai keputusan pelaksanaan dan sangat besar pengaruhnya terhadap keseluruhan organisasi. Dalam strategi ini terkait dengan proses kebijaksanaan dan tidak dapat dipisahkan pula dari tahapan sebelumnya, khususnya mengenai analisis stakeholder. Strategi untuk menembus pendidikan bagi anak Perempuan Rimba perlu adanya pendekatan kepada stakeholder Orang Rimba khususnya kepada Temenggung sebagai pimpinan tertinggi masyarakat rimba.

Pendekatan yang dapat dilakukan antara lain:

- (1) Berusaha untuk mengenal anak-anak rimba, khususnya Perempuan Rimba secara utuh
- (2) Mengadakan pendekatan melalui belajar bahasa rimba, belajar adat dan budaya rimba
- (3) Memperhatikan nilai-nilai sosial dan karakter Orang Rimba
- (4) Berkoordinasi dengan Dewan Adat setempat dan membangun muatan pendidikan berbasis budaya lokal

Selain itu supaya pendidikan bisa diterima oleh Orang Rimba juga perlu adanya perencanaan dan pendekatan pendidikan yang matang. Pandangan klasik yang mengatakan tentang perencanaan pendidikan antara lain Davis (1980) mengemukakan pendekatan: (1) *Social demand*; (2) *manpower planning*; (3) *rate of return*; dan (4) *cost effectiveness analysis*. Pendekatan *Social demand approach*, menekankan pada tujuan pendidikan yang mengandung misi pembebasan, yakni pembebasan masyarakat dari kebodohan dan kemiskinan,

seperti kebutuhan akan pendidikan dasar yang memadai. *Manpower approach* menekankan pada kesesuaian atau relevansi antara output atau lulusan suatu sistem pendidikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja di berbagai bidang kehidupan. *Cost benefit approach* menekankan pada analisis untung rugi yang lebih bersifat ekonomis dan berlandaskan pada konsep *investment in human capital*. Pendidikan dipandang sebagai investasi sumber daya manusia, yang harus mendatangkan keuntungan yang dapat diukur dengan nilai moneter. Adapun *cost effectiveness approach* menekankan pada penggunaan dana dan fasilitas.

Adapun William N. Dunn (1995:80) dalam bukunya *Analisa Kebijakan Publik*, menjelaskan bahwa: “implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dan pengendalian arah tidak kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan. Implementasi kebijakan lebih merupakan aktivitas praktis”. Dari penjelasan tersebut, dapat dimengerti bahwa implementasi rencana adalah merupakan manifestasi tindakan dari suatu penyusunan rencana strategik. Implementasi rencana yang juga disebut dengan implementasi strategik sebenarnya merupakan proses di mana manajemen atau pimpinan suatu organisasi menerjemahkan strategi dan kebijakan ke dalam tindakan melalui pengembangan berbagai program yang diikuti dengan anggaran dan penetapan prosedur yang diperlukan untuk merealisasikan berbagai strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Implementasi strategik juga merupakan pernyataan serangkaian kegiatan atau langkah yang diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan rencana satu persatu dan mewujudkan strategi tersebut ke dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, kunci utama dalam implementasi rencana

pendidikan khusus untuk Orang Rimba adalah pada formulasinya dalam bentuk program, prosedur dan anggaran ke dalam praktek nyata (*real action*).

Perencanaan pendidikan yang baik hendaknya memenuhi kriteria seperti yang diungkapkan oleh Vembriarto, (1985):

- a) *Politically dependable*, artinya dipandang dari aspek politik dapat dibela dan dipertahankan (berpihak kepada kepentingan masyarakat).
- b) *Socially and culturally acceptable*, artinya perencanaan dan implementasi tindakannya secara sosial dan kultural dapat diterima masyarakat.
- c) *Technically workable*, artinya secara teknis harus bisa dilaksanakan, ada kesesuaian dengan peralatan, keahlian, dan kesanggupan dalam proses penyelenggaraan sehingga tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan.
- d) *Administratively, managerially, organizationally practible*, artinya secara administratif, manajemen, atau secara organisasi dapat diselenggarakan.
- e) *Economically feasible*, artinya bahwa perencanaan, kebijaksanaan, atau tindakan itu secara organisasi dapat diselenggarakan.
- f) *Finacially feasible*, artinya tidak menimbulkan hambatan pembiayaan.
- g) *Legally permissible*, artinya memenuhi persyaratan-persyaratan hukum yang berlaku.

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen terpenting dalam merencanakan pendidikan. Selain berperan sebagai sumber daya organisasi yang harus secara optimal berfungsi, sumber daya manusia memiliki kapasitas mendorong sumber daya lainnya agar berperan optimal di dalam sistem kerja sama sehingga kerjasama semakin solid untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Sumber daya manusia secara ideal bisa berperan sebagai panglima inovator yang senantiasa menjadi pemula dan penentu lahirnya gagasan-gagasan baru dan sebagai pemicu pembaharuan.

Peran sumber daya manusia akan optimal jika dikelola dengan baik. Keberhasilan implementasi perencanaan strategis sangat ditentukan oleh kualitas

dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh penyelenggara pendidikan. Untuk memiliki sumber daya manusia yang dibutuhkan guna mencapai keberhasilan implementasi perencanaan stratejik diperlukan manajemen tenaga kependidikan yang baik. Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen pesonalia pendidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan.

Strategi pengelolaan pendidikan bagi Orang Rimba dalam upaya pemberdayaan Perempuan Rimba dapat dilakukan dengan mengenal Orang Rimba khususnya Perempuan Rimba secara sangat dekat dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup ruang dan orang, sistem kehidupan, perilaku dan kebiasaan, kehidupan sosial dan budaya, alam pikiran dan psikologis Perempuan Rimba. Pengenalan ini penting dilakukan agar bisa diperoleh gambaran secara jelas dan komprehensif kehidupan Perempuan Rimba dengan segala permasalahannya. Pengenalan ini harus dilakukan dengan persuasif atau informal sehingga akan mampu membongkar informasi yang diperlukan. Dirancang secara khusus pendidikan yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan Perempuan Rimba, baik kurikulum, materi ajar, dan metodologi yang sesuai dengan alam pikirannya. Dalam pengelolaan pendidikan Perempuan Rimba, selain aspek kognitif juga perlu dipertimbangkan aspek psikomotor dan afektif. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak rimba yang mengikuti pendidikan, tidak hanya bisa baca tulis hitung saja tetapi bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam berinteraksi dan bertransaksi dengan masyarakat luar Orang Rimba.

Selain itu dalam merencanakan strategi pengelolaan pendidikan yang berbasis budaya lokal khususnya dalam upaya memberdayakan Perempuan Rimba dengan memberi makna terhadap pendidikan bagi Orang Rimba. Pertama, pendidikan bagi Orang Rimba harus operasional terhadap kebutuhan sehari-hari, materi ajarnya harus rasional, mudah, dan mampu dipahami oleh pemikiran mereka. Kedua, pendidikan harus menguntungkan atau bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari Orang Rimba. Ketiga, pendidikan harus diorganisir secara lokal dengan menggunakan bahasa, adat, dan budaya Orang Rimba. Keempat, pendidikan harus mampu membantu menumbuhkan kesadaran dan kesiapan terhadap perubahan dalam proses perkembangan kebudayaan.

Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pihak-pihak terkait dapat bekerjasama dan berkoordinasi dalam merencanakan strategi pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan Orang Rimba. Hal ini dapat dilakukan dengan menggandeng lembaga swadaya masyarakat, pihak perusahaan swasta, tokoh masyarakat rimba, untuk berkoordinasi dan bekerjasama dalam merencanakan strategi pengelolaan pendidikan yang berbasis budaya lokal khususnya dalam upaya memberdayakan Perempuan Rimba.

6. Faktor-faktor Strategis dalam Pengelolaan Pendidikan Sebagai Upaya Pemberdayaan Perempuan Rimba

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pembangunan daerah kawasan TNBD dan pengelolaan pendidikan bagi Orang Rimba antara lain:

- a. Sumber daya manusia, yang ditunjukkan oleh rendahnya jumlah dan kualitas kesejahteraan penduduk masyarakat Orang Rimba dengan penyebarannya yang tidak merata dibandingkan dengan luas wilayah kawasan hutan.
- b. Sumber daya bantuan atau prasarana, yang tingkat pelayanannya masih sangat terbatas, seperti sistem perhubungan dan telekomunikasi, pelayanan listrik dan air bersih, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pasar.
- c. Penataan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam, yang ditunjukkan antara lain terjadinya permasalahan yang tumpang tindih antara kawasan TNBD sebagai cagar alam yang dilindungi oleh pemerintah, sementara masyarakat Orang Rimba menganggap kawasan hutan ini menjadi tempat hidup mereka. Selain itu terjadinya pemanfaatan ruang atau lahan antara kawasan budidaya dengan kawasan lindung maupun antar kawasan budidaya seperti kegiatan penebangan hutan liar dengan ekonomi masyarakat Orang Rimba.
- d. Keterbatasan sumber pendanaan, dimana pengelolaan pendidikan dan pembangunan daerah kawasan TNBD kurang diberikan prioritas dibandingkan daerah lainnya, sehingga semakin memperlebar tingkat kesenjangan antar daerah.
- e. Terbatasnya kelembagaan dan aparat yang ditugaskan di daerah kawasan TNBD, dengan fasilitas yang kurang mencukupi sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat Orang Rimba relatif kurang memadai.

Ditinjau dari faktor-faktor strategis yang ada baik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Sarolangun maupun KPA Sokola dan KKI Warsi dalam pemberdayaan perempuan adalah:

- Pertama, kebijakan Pemerintah Daerah tentang kebijakan pendidikan untuk Orang Rimba khususnya pendidikan untuk perempuan masih disamakan dengan masyarakat luar Orang Rimba. Kebijakan yang menyamaratakan pendidikan bagi anak-anak rimba ini menimbulkan berbagai masalah dalam pengelolaan pendidikan.
- Kedua, faktor lingkungan yang mencakup faktor ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan yang menyangkut kehidupan sehari-hari berpengaruh terhadap akses pendidikan bagi Orang Rimba.
- Ketiga, faktor lingkungan yang mencakup sumber daya alam, kawasan TNBD yang kondisinya sekarang sudah dirambah oleh masyarakat desa dan adanya *illegal logging* berpengaruh terhadap pendapatan Orang Rimba yang mengandalkan hasil hutan dan menghambat proses pemberdayaan Perempuan Rimba.
- Keempat, faktor *value sharing* dengan perusahaan swasta, dalam hal ini perusahaan yang berada di wilayah TNBD telah mengembangkan konsep berbagi demi terlaksananya pemberdayaan Perempuan Rimba.
- Kelima, faktor sumber daya manusia, dalam hal ini dengan memanfaatkan orang-orang yang berpengaruh atau dianggap pintar seperti Temenggung, Menti, Demang, Depati, Jenang, dan tokoh tua tengganai rimba yang dapat diajak bersama-sama untuk bekerjasama dalam pengelolaan pendidikan.
- Keenam, aspek demografis yang meliputi pengisian dan pemerataan penyebaran Orang Rimba yang mempunyai budaya melangun dan selalu

berpindah-pindah, hal ini menyebabkan akses pendidikan menjadi sulit karena anak didiknya harus mengikuti orangtuanya berpindah tempat.

- Ketujuh, aspek ekonomi yang berkaitan dengan mata pencaharian Orang Rimba perlu dijadikan pertimbangan, mata pencaharian mereka rata-rata masih menggantungkan alam seperti berburu, meramu, berladang, dan sebagian ada yang berkebun.
- Kedelapan, aspek sosial budaya yang perlu dijadikan pertimbangan adalah pendidikan, kesehatan, adat, dan budaya lokal yang perlu dijaga kelestariannya.
- Kesembilan, aspek pertahanan keamanan yang meliputi pembangunan pos-pos penjagaan hutan dari penjarahan kayu hutan oleh masyarakat luar, hal ini dapat mengurangi penjarahan kayu hutan secara liar yang akan berdampak pada kehidupan Orang Rimba.

Berkaitan dengan faktor kebijakan Pemerintah Daerah, dalam *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer* (Alex, 2005: 298) bahwa:

Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran. Pendidikan merupakan sektor publik. Sehingga kebijakan yang mengatur pendidikan dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik.

Pengertian kebijakan lainnya dikemukakan oleh Nurrochmat (2006) yang menyatakan bahwa: “kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan”. Kebijakan yang diambil harus mengarah kepada pengambilan keputusan yang fokus tentang pendidikan. Kebijakan yang mengatur tentang pendidikan Orang Rimba akan berpengaruh

terhadap implementasi perencanaan stratejik yang dikembangkan oleh penyelenggara pendidikan. Rencana strategis yang disusun harus berpijak atau sesuai dengan kebijakan pendidikan yang ada, baik kebijakan pusat maupun kebijakan pemerintah daerah. Perencanaan strategis yang sedang diimplementasikan bisa terhambat bila pada saat tersebut lahir kebijakan yang substansinya bertentangan atau tidak sesuai dengan renstra yang sedang dilaksanakan.

Faktor strategis yang berkaitan dengan *values sharing* dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah TNBD akan berpengaruh terhadap pengembangan sumber daya manusia Orang Rimba khususnya dalam pemberdayaan Perempuan Rimba. Berikut ini nama-nama perusahaan yang berada di sekitar wilayah TNBD, yaitu:

- Jambi Agrowijaya Palm Oil Plantation
- Era Mitra Agro Lestari Palm Oil Plantation
- Wana Perintis Industrial Timber Estate
- Limbah Kayu Utama Industrial Timber Estate
- Sari Aditya Loka Palm Oil Plantation

Faktor-faktor strategis yang telah diuraikan di atas dapat menjadikan peluang bagi pemangku kepentingan dalam upaya memberdayakan Orang Rimba khususnya Perempuan Rimba. Melalui pemahaman yang menyeluruh dapat merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program dan kegiatan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan Orang Rimba. Dalam hal ini perlu membangun pola-pola yang akan diprogramkan, menyiapkan sumber daya

manusia, sumber daya pembelajaran, pola pembelajaran atau pola pendidikan yang cocok bagi Orang Rimba pada umumnya dan Perempuan Rimba khususnya.

Selain faktor-faktor strategis tersebut, perlu dikaji faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengelolaan pendidikan sebagai upaya pemberdayaan Perempuan Rimba. Ada banyak tantangan dan hambatan dalam pengelolaan pendidikan bagi anak-anak rimba, antara lain yaitu budaya Orang Rimba yang menolak pendidikan karena dianggap tabu dan melanggar adat budaya rimba; adanya pengaruh pihak ketiga yang datang dari luar Orang Rimba dimana mereka beranggapan jika Orang Rimba mendapatkan pendidikan akan menjadi pandai dan dapat merugikan bagi kepentingan mereka; persebaran penduduk yang tidak merata dan budaya melangun dapat mengganggu penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak rimba; dan sarana prasarana pendidikan yang belum ada di kawasan tempat tinggal Orang Rimba. Gambarannya dapat dilihat pada tabel 5.14 dan 5.15 di bawah ini.

Tabel 5.14
Faktor Penghambat Orang Rimba

NO.	FAKTOR MASALAH	URAIAN
1	Status Pemukiman Orang Rimba	Warga Orang Rimba yang hidup di TNBD, mereka ada yang masih tinggal di tengah hutan, ada yang bermukim di pinggir hutan, dan ada yang bermukim di tengah ladang karet yang mereka punya dengan pondok berlantai kayu bulat, panggung setinggi 60 cm, beratap daun/plastik hitam, tanpa dinding
2	Lahan Kebun Orang Rimba	Warga Orang Rimba yang hidup di tengah hutan, masih berladang berpindah; Warga Orang Rimba yang hidup di pinggir hutan ada yang berladang dan membuka lahan untuk berkebun karet secara tradisional, lahan mereka digarap secara gotong-royong, setelah panen dibagikan kepada mereka yang ikut gotong royong;

		Warga Orang Rimba yang hidup di dekat penduduk desa, membuka lahan untuk kebun karet dan sawit, lahan mereka digarap secara perorangan dan terbatas pada kerabat dekatnya.
3	SDM	Warga Orang Rimba yang hidup di tengah hutan pada umumnya buta membaca, menulis, dan menghitung (Calistung) Warga Orang Rimba yang hidup di pinggiran hutan sebagian ada yang sudah mengenal baca, tulis, hitung Warga Orang Rimba yang hidup dekat penduduk desa, sebagian sudah mengenal baca, tulis, hitung, dan sudah mengizinkan anak-anaknya untuk bersekolah
4	Mata Pencaharian	Warga Orang Rimba yang hidup di tengah hutan pada umumnya masih: berburu ikan, labi-labi, baning, babi, tringgiling, monyet, rusa, kijang, unggas, dan hewan jenis lainnya di hutan; mengumpul rotan, akar obat, daun obat, jernang, tunjuk langit, gambir, kulit kayu, dammar, buah kepahyang, dan buah-buahan lain yang ada di hutan; dan meramu gadung, ubi, umbut, dan umbi-umbian. Warga Orang Rimba yang hidup di pinggiran hutan dan dekat penduduk desa, sudah berkurang untuk berburu, meramu, dan mengumpul, mereka lebih banyak bermata pencaharian pertanian dan perkebunan
5	Interaksi Sosial	Warga Orang Rimba yang hidup di tengah hutan pada umumnya interaksinya terbatas dengan kelompoknya. Warga Orang Rimba yang hidup di pinggiran hutan berinteraksi sosial dengan penduduk desa terdekat yakni dengan Jenang-jenang mereka. Bila ada masalah warga Orang Rimba, mereka akan mengadakan nasibnya pada Jenang (Induk semang) masing-masing yang dilanjutkan pada Raja Jenang. Warga Orang Rimba yang hidup di TNBD melakukan perjanjian kepada jenang masing-masing dengan perjanjian yang saling menguntungkan dan tolong-menolong Interaksi dengan warga desa terdekat hanya terbatas pada hubungan jual beli
6	Kebiasaan Melangun	Warga Orang Rimba yang hidup di tengah hutan masih kuat memegang teguh tradisi

		<p>melangun (mengembara). Terjadinya melangun disebabkan oleh adanya anggota keluarga meninggal, maka mereka segera melangun (nomaden) dengan cara berpindah dari tempat pada saat kematian ke tempat lain, lamanya melangun 4 sampai 5 tahun. Namun pola melangun sudah berubah baik lamanya maupun jumlahnya, yang melangun hanya keluarga terdekat. Bila melangun tempat mereka ada yang menjaga yakni orang yang tidak ikut melangun yakni masih saudaranya atau kelompoknya.</p> <p>Warga Orang Rimba yang hidup di pinggiran hutan dan dekat penduduk desa, masih melangun hanya waktunya sangat pendek.</p>
7	Institusi Budaya	Institusi budaya yang masih dimiliki oleh Orang Rimba adalah pimpinan kelompok saja, yang lainnya tidak mempunyai atau sudah terjadi penurunan
8	Secara Administratif	Warga Orang Rimba tidak terdaftar sebagai warga Desa, tetapi masyarakat Desa mengetahui dan mengakui bahwa warga Orang Rimba di TNBD sebagai satu keturunan (setali sedarah)
9	Kehidupan Kelompok	Warga Orang Rimba di wilayah TNBD masih hidup berkelompok.

Faktor pendukung pemberdayaan warga Orang Rimba antara lain sebagai berikut:

Tabel 5.15
Faktor Pendukung Orang Rimba

NO.	FAKTOR PENDUKUNG	URAIAN
1	Induk semang (Jenang)	Warga Orang Rimba Orang Rimba yang hidup di tengah hutan mempunyai induk Semang atau jenang. Sedangkan Warga Orang Rimba yang hidup di pinggiran hutan dan dekat penduduk, fungsi jenang sudah berkurang karena mereka sudah bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat luar.
2	Hewan Buruan	Hutan yang disekitar Warga Orang Rimba yang hidup di tengah dan pinggiran hutan

		masih banyak dijumpai hewan buruan seperti labi-labi, ular, trenggiling, burung, babi, monyet, rusa, kijang, dan hewan lainnya.
3	Hasil Hutan	Hutan yang disekitar Warga Orang Rimba yang hidup di TNBD bernilai ekonomis tinggi seperti rotan, getah jernang, balam merah, tumbuhan obat seperti tunjuk langit, akar selusuh, pasak bumi, dan lain-lain.
4	Keterampilan	Kaum wanita Orang Rimba memiliki ketrampilan menganyam tikar rotan, lapik, dan ambung dari rotan. Kaum Pria memiliki keterampilan berburu hewan, menjerat hewan, memanjat madu sialang, pengobatan tradisional (besale), bertani, dan berkebun.

7. Dampak dari Strategi Pengelolaan Pendidikan Terhadap Pemberdayaan Perempuan Rimba

Pendidikan yang direncanakan, diorganisir, dilaksanakan, dan diawasi dengan benar seharusnya berdampak positif terhadap penerima manfaat pendidikan. Dampak positif dari pengelolaan pendidikan, anak-anak rimba dapat dan mampu baca, tulis, hitung. Anak-anak rimba dapat menulis seloka, mantera-mantera adat budaya rimba. Seloko, mantera-mantera yang lahir secara turun temurun dari nenek moyang Orang Rimba dilestarikan dengan budaya lisan secara turun temurun. Kondisi saat ini telah banyak berubah, pemberian seloko dan mantera-mantera yang disampaikan secara lisan seiring dengan hasil hutan yang berkurang sehingga para tetua adat, anak-anak rimba lebih banyak berkonsentrasi pada kebutuhan mencari mata pencaharian sehingga telah ada kesenjangan waktu untuk menurunkan seloko dan mantera-mantera rimba tersebut. Jika adat-istiadat yang dipergunakan selama ini budaya lisan dengan cara menghafal, dengan anak-anak rimba dapat baca, tulis maka mereka dapat menuangkan adat, budaya,

seloko, mantera-mantera ke dalam bentuk tulisan ataupun buku sehingga dapat dipelajari oleh generasi berikutnya. Dengan adanya generasi Orang Rimba yang sudah mengenal pendidikan, maka akan diwariskan melalui tulisan-tulisan kepada anak-anak rimba. Jadi kalau selama ini pendidikan adat budaya diberikan secara lisan, dengan anak-anak rimba bisa baca, tulis, hitung, mereka bisa mempelajarinya melalui dokumen.

Selain itu pendidikan bagi anak-anak rimba juga berdampak terjadinya perubahan pada diri anak-anak rimba, bisa berinteraksi dengan masyarakat luar dan dapat bertransaksi dalam jual beli hasil hutan. Dari sisi kesehatan mengalami peningkatan dalam menjaga kebersihan badan, kebersihan pakaian, dan mengenal pola hidup sehat. Dampak yang terjadi pada anak-anak tersebut merupakan peran dari pendidikan yang dapat mempersiapkan anak-anak rimba menuju masa depan yang lebih baik. Senada dengan kondisi ini, Gaffar (2000:2-3) mengemukakan tentang peran pendidikan, sebagai berikut:

Pendidikan berperan dan memiliki kekuatan untuk mempersiapkan generasi muda bangsa untuk membawa bangsa ini menuju masa depan, menuju masyarakat Indonesia baru. Karena itu pendidikan memfokuskan kepada keseluruhan proses pembangunan manusia secara total. Penguasaan IPTEK tanpa pendidikan moral dan etika dan tanpa budi pekerti hanya akan berakibat kepada perpecahan, mengutamakan kepentingan kelompok dan individu, materialistik, dan melemahkan kepentingan nasional dan kepentingan bangsa. Pendidikan adalah harapan seluruh masyarakat bangsa, dan karena itu setiap orang harus memperoleh pendidikan sesuai kebutuhan, sesuai aspirasi, dan sesuai hati nuraninya.

Peran pendidikan sebenarnya untuk mempersiapkan generasi muda menuju masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam mewujudkan

masyarakat yang maju, adil, dan makmur serta dapat memungkinkan warganya untuk mengembangkan diri, baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah. Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Peranan peserta didik dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, merupakan keluaran (*output*) dari sistem dan fungsi pendidikan. Pada hakikatnya pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan mutu kehidupan, dan martabat manusia baik individu maupun sosial. Dengan kata lain, pendidikan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan individu dan masyarakat guna menghadapi masa depan.

Kenyataan yang terjadi di lapangan, dampak yang ditimbulkan oleh pendidikan seperti yang terjadi pada anak-anak rimba yang mengikuti pendidikan ada perubahan sosial-budaya yang terjadi. Sebagian dari anak-anak muda kurang mematuhi adat yang diberlakukan oleh orangtua. Contohnya, besabun atau mandi memakai sabun, anak-anak dilarang memakai sabun, tetapi sekarang sudah banyak yang memakai sabun pada waktu mandi. Dari cara berpakaian, laki-laki dan perempuan sudah banyak yang sudah berpakaian seperti orang desa, tidak memakai cawat lagi. Pemakon (makanan) seperti roti, minuman kaleng atau semua makanan yang di luar Orang Rimba dilarang, tetapi sekarang sudah dilanggar dan boleh dimakan. Melangun dulu lima tahun baru kembali tetapi sekarang empat atau lima bulan sudah pulang kembali. Perubahan sosial yang terjadi pada anak-anak rimba juga disebabkan oleh adanya interaksi sosial dengan

masyarakat luar. Orang Rimba dalam melakukan hubungan sosial tidak terbatas hanya dengan sesama kelompoknya, namun juga dengan pihak-pihak luar melalui kontak jual beli.

Terjadinya perubahan sosial pada masyarakat pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang wajar, mengingat kehidupan masyarakat itu sendiri merupakan suatu gerak dinamis. Berkaitan dengan perubahan sosial, Rusli Karim (1990) berpendapat bahwa: "Terjadinya perubahan sosial pada suatu masyarakat merupakan gejala yang wajar timbul, karena manusia itu selalu melakukan kontak sosial dengan manusia lainnya, dan kontak sosial itu merupakan suatu kebutuhan antara manusia dalam memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya".

Sedangkan perubahan sosial menurut Karl Manheim (1979) bahwa: *...a changing community is not determined by a set of unshable commons, but is engaged in a permanent search for new norms to express changing experiences. The content of conscience is accordingly not determined by explicit and final rules but it is continuously shaping it self a new.*

Dari pendapat tersebut, jelas terlihat bahwa inti dari proses perubahan sosial adalah perubahan norma-normanya, dimana perubahan norma-norma dan proses pembentukan norma-norma merupakan inti dari kehidupan dalam mempertahankan persatuan kehidupan kelompok.

Perubahan sosial dapat pula diakibatkan oleh adanya pertukaran sosial antara warga masyarakat dengan pemimpin adat yang memelihara dan menjaga tradisi serta seringkali warga masyarakat melakukan interaksi sosial dengan warga masyarakat lainnya. Interaksi sosial sebagai salah satu saluran komunikasi yang

terjadi dalam kehidupan masyarakat rimba terjadi dengan penduduk desa terdekat, pemukiman transmigrasi yang ada di dekat wilayah TNBD. Komunikasi ini terjadi berkaitan dengan masalah jual beli dimana mereka saling membutuhkan. Orang Rimba menjual hasil hutannya untuk kebutuhan membeli bahan-bahan makanan, sementara masyarakat desa membeli hasil hutan untuk kegiatan dagang yang dapat menambah nilai ekonomi keluarganya. Hubungan antara Orang Rimba dengan masyarakat luar ini saling menguntungkan satu sama lain. Berkaitan dengan hal ini, Rogers (1993) menyatakan:

- *Provide a two way exchange of information. One of individual can secure clarification or additional information about the innovation from another individual*
- *Persuade an individual to form or change a strongly held attitude. This role of interpersonal channels is especially important in persuading an individual to adopt innovation*

Keinginan untuk berubah tidak saja datang dari pembaharu di masyarakat, tetapi juga dapat berasal dari luar, yaitu berupa intervensi yang masuk ke dalam kehidupan suatu masyarakat. Keinginan untuk berubah memerlukan suatu keberanian, karena dalam prosesnya tidak tertutup kemungkinan harus bersentuhan dengan nilai-nilai sosial budaya yang telah lama ada di masyarakat. Kondisi ini juga terjadi pada anak-anak rimba yang mengikuti pendidikan.

Pendidikan baik melalui pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Sarolangun, maupun pendidikan alternatif yang diselenggarakan oleh KPA Sokola dan KKI Warsi, berdampak pada anak-anak rimba. Pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang sifatnya permanen dalam

tingkah laku, pikiran, dan sikapnya. Dalam konteks Orang Rimba, dapat dikatakan bahwa Orang Rimba setelah mendapatkan pendidikan, mereka bisa mengembangkan dirinya, mengubah sikap, dan tingkah laku di dalam masyarakat tempat mereka hidup maupun dengan masyarakat di luar Orang Rimba. Hal ini terlihat dari beberapa perubahan-perubahan yang ada pada Orang Rimba yang mengarah pada suatu kemajuan. Dampak positif dari pendidikan tersebut harus dibarengi dengan pemberian tuntunan dalam bersikap dan bertingkah laku agar anak-anak rimba tetap bisa menjaga keasliannya sebagai Orang Rimba. Agar adat, budaya, tradisi mereka tetap terjaga maka pendidikan harus berasaskan pada budaya dan kearifan lokal Orang Rimba. Untuk itu diperlukan sebuah konsep pendidikan berbasis budaya lokal, dengan memperhatikan aspek-aspek pendidikan yang mengacu kepada masyarakat lokal rimba. Konsep pendidikan berbasis budaya lokal ini diharapkan anak-anak rimba, orangtua, dan Orang Rimba dapat lebih menerima pendidikan.

Dampak negatif dari pelaksanaan pendidikan adalah adanya perubahan sosial-budaya yang terjadi pada anak-anak Orang Rimba. Sebagian dari anak-anak muda kurang mematuhi adat yang diberlakukan oleh orangtua, antara lain:

- Besabun atau mandi memakai sabun, anak-anak dilarang memakai sabun, tetapi sekarang sudah banyak yang memakai sabun pada waktu mandi. Sesuai dengan adat kepercayaan masyarakat rimba jika menggunakan wewangian, Dewa tidak akan mendekat lagi dan dianggap melanggar aturan nenek moyangnya terdahulu.

- Cara berpakaian, sebagian anak laki-laki dan perempuan sudah banyak yang sudah berpakaian seperti orang desa, tidak memakai cawat lagi.
- Pemakon (makanan) seperti roti, minuman kaleng atau semua makanan yang diluar Orang Rimba dilarang, tetapi sekarang sudah dilanggar dan boleh dimakan.
- Dulu dilarang memakai sepeda ataupun sepeda motor, tetapi sekarang sudah ada anak-anak rimba yang memakai sepeda dan sepeda motor.
- Adanya penurunan dalam mematuhi adat budaya rimba
- Anak-anak generasi muda kurang menguasai adat seloko, mantera, jampi-jampi yang telah dimiliki oleh tetua adat secara turun temurun dari nenek moyangnya dulu.

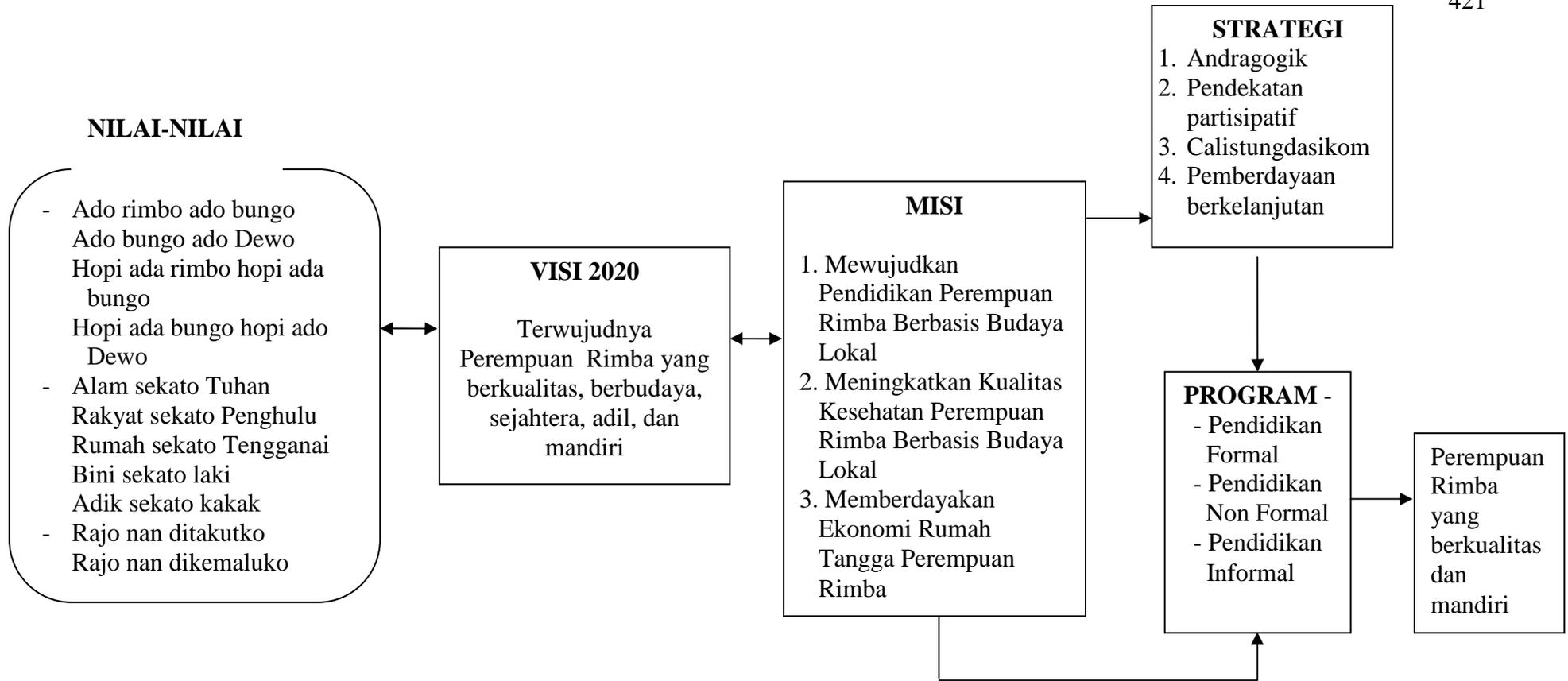
Agar pendidikan bagi anak-anak rimba berdampak positif dan tidak mengganggu adat budaya yang ada, maka perlu diberikan pendampingan secara terus menerus. Diharapkan dengan adanya pendidikan mereka dapat merubah pola pikir yang akan mempengaruhi dan memperkuat adat budaya rimba, berpengaruh terhadap pola tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, akan berpengaruh terhadap pola interaksi sosial, dan dapat menjaga lingkungan serta kearifan lokal Orang Rimba.

B. Model Konseptual Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Rimba Berbasis Budaya Lokal

Model atau pola pada hakekatnya merupakan visualisasi atau konstruksi konkrit dari suatu konsep. Law dan Kelton (1991:5) mendefinisikan model sebagai representasi dari sebuah sistem, dimana dipandang mewakili sistem yang

sesungguhnya. Visualisasi atau konstruksi itu dirumuskan melalui aktivitas mental, berupa cara berpikir (*ways of thinking*) tertentu untuk melaksanakan konkretisasi atas abstrak. Menurut Miles, *et.al.* (1989:4), model adalah bentuk representasi akurat, sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau kelompok orang mencoba bertindak berdasarkan pijakan yang terepresentasi dari model itu.

Temuan-temuan yang diperoleh melalui hasil penelitian ini, telah memberikan gambaran tentang kondisi-kondisi yang dapat diciptakan sehubungan dengan model konseptual pengelolaan pendidikan berbasis budaya lokal dalam upaya pemberdayaan Perempuan Rimba di kawasan TNBD yang ditawarkan melalui "*Ethnopaedagogical Strategies Model*". Model ini bertolak dari visi, misi, dan nilai-nilai yang ingin dicapai melalui model pendidikan yang berbasis budaya lokal. Masyarakat rimba dengan nilai-nilai adat budaya yang dimiliki dapat dijadikan sebagai suatu kekuatan dalam memberdayakan dirinya. Karena nilai-nilai adat budaya lokal telah mereka yakini dan mereka taati sebagai tatanan hidup dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang visi, misi, dan nilai-nilai Orang rimba dapat dilihat seperti digambarkan pada gambar 5.3 di bawah ini.



Gambar 5.3.
Nilai-nilai, Visi, dan Misi

Ket: → = Hubungan searah
 ↔ = Hubungan timbal balik

Berdasarkan gambar 5.3 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa visi yang ingin dicapai melalui strategi pengelolaan pendidikan berbasis budaya lokal dalam upaya pemberdayaan perempuan rimba adalah terwujudnya masyarakat Perempuan Rimba yang berkualitas, berbudaya, sejahtera, adil, dan mandiri pada tahun 2020. Sedangkan misinya adalah mewujudkan pendidikan Perempuan Rimba berbasis budaya lokal, meningkatkan kualitas kesehatan Perempuan Rimba berbasis budaya lokal, dan memberdayakan ekonomi rumah tangga Perempuan Rimba. Dengan ditopang oleh nilai-nilai sebagai berikut: 1). *Ado rimbo ado bungo, ado bungo ado Dewo, Hopi ado rimbo hopi ado bungo, hopi ado bungo hopi ado Dewo* artinya kehidupan Orang Rimba tidak bisa dipisahkan dari hutan tanpa ada hutan maka tidak akan ada kehidupan lagi bagi Orang Rimba. 2). *Alam sekato Tuhan, rakyat sekato pengulu, rumah sekato tengganai, bini sekato laki, adik sekato kakak*” artinya alam seperti apapun kondisinya adalah atas kehendak Tuhan, rakyat patuh terhadap penguasanya, urusan rumah tangga harus mematuhi tengganai, istri harus patuh terhadap suami, dan adik harus patuh terhadap kakak. Apabila tanpa alasan jelas tidak mematuhi yang harus dipatuhi maka denda dijatuhkan. 3). *Raja nang ditakutko dan Raja nang dikemaluko. Raja nang ditakutko* adalah raja yang ditakuti yaitu istri orang lain. Dalam hal ini individu rimba dilarang untuk berbicara atau berjalan berdua di tempat sepi atau di rumah tanpa kehadiran suaminya, walaupun tanpa sengaja tetap dinilai tabu. Sedangkan *raja nang dikemaluko* yaitu anak gadis yang dipermalukan artinya individu orang rimba terutama laki-laki harus malu dan menjaga harga diri anak

perempuan orang lain, laki-laki harus bisa menjadi suri teladan dan melindungi kaum Perempuan Rimba.

Dalam upaya menunjang keberhasilan penerapan model konseptual tersebut, maka berikut ini akan dikemukakan beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

1. Beberapa Kondisi yang Ditemukan dan Perlu Diberi Makna dalam Rangka Penerapan Model

a. Analisis Kondisi Perempuan Rimba

Pada hakikatnya sasaran program pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan. Kenyataan yang ada sekarang ini adalah kedudukan dan peran perempuan walaupun telah diupayakan dengan berbagai cara namun hasilnya belum memadai, hal ini disebabkan selama ini pendekatan pembangunan belum secara khusus mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil bagi perempuan dan laki-laki sehingga hal tersebut turut memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.

Tingkat pendidikan yang rendah dan terbatasnya akses terhadap informasi menyebabkan perempuan menjadi rentan terhadap berbagai krisis yang terjadi, baik ekonomi maupun sosial. Perempuan masih terbelenggu dalam kondisi diskriminatif antara laki-laki dan perempuan, akibatnya angka buta huruf di kalangan perempuan cukup tinggi bila dibandingkan dengan laki-laki. Oleh

karenanya, Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi jender.

Kondisi perempuan yang digambarkan di atas juga merasuk dalam kehidupan Perempuan Rimba di kawasan TNBD. Bila kondisi perempuan ini dibiarkan, maka perempuan yang diharapkan sebagai elemen penting untuk berperan aktif dalam pembangunan akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya terpadu dalam rangka memberdayakan perempuan baik dalam pendidikan maupun kesehatan.

Untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi Perempuan Rimba ditinjau dari potensinya, maka diperlukan peta demografi, pendidikan, kesehatan, rumah tangga, dan kegiatan ekonomi sebagai indikator potensi yang memungkinkan dibangunnya pemberdayaan perempuan di kawasan TNBD. Perempuan Rimba mempunyai potensi yang tumbuh secara alami, yaitu potensi alam yang mencakup memanfaatkan benda-benda yang disediakan oleh alam di hutan dan potensi Perempuan Rimba yang mencakup keterampilan membaca alam, keterampilan bercocok tanam secara sederhana, keterampilan mengumpul, keterampilan untuk meramu obat-obatan tradisional dengan menggunakan akar dan daun-daunan.

Dalam peta demografi ditemukan jumlah penduduk Orang Rimba yang ada di kawasan TNBD adalah 1.396 jiwa (Warsi, 2009) yang lebih dari separuhnya adalah penduduk perempuan. Jumlah usia produktif ternyata memiliki relevansi kuat dengan keadaan rumah tangga. Perempuan Rimba melangsungkan perkawinan di usia dalam kategori bawah umur. Ukuran untuk usia menikah

secara adat bagi Perempuan Rimba adalah dengan datangnya tanda kedewasaan bagi perempuan yaitu setelah mengalami datang bulan pertama maka perempuan tersebut dianggap dewasa dan harus menikah secara adat. Perkawinan dalam usia di bawah umur menyebabkan penduduk perempuan melahirkan lebih dari sepuluh anak, hal ini disebabkan belum ada yang mengikuti program KB.

Dalam bidang kesehatan kualitas Perempuan Rimba juga masih rendah, dengan beberapa indikator: terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan yang sulit dijangkau oleh Perempuan Rimba, baik untuk pencegahan penyakit maupun pengobatan, sehingga ketergantungan perempuan pada laki-laki untuk pengambilan keputusan yang berdampak pada kesehatan perempuan masih tinggi. Rendahnya kualitas kesehatan Perempuan Rimba masih terasa pula akibat dari konstruksi budaya yang menempatkan kualitas gizi untuk anak laki-laki dan suami jauh lebih penting daripada anak perempuan. Masalah kesehatan Perempuan Rimba yang perlu mendapatkan perhatian adalah masalah reproduksi, nutrisi, dan pola hidup sehat yang menjadi masalah utama yang dialami Perempuan Rimba. Adanya bantuan kesehatan sebagian besar Perempuan Rimba masih menolak, hanya Perempuan Rimba yang bermukim di desa dan pinggiran hutan yang sebagian menerima kesehatan, hal ini juga disebabkan karena adat budaya. Berhubungan dengan masalah reproduksi, Perempuan Rimba pada usia produktif berumur 13-45 tahun melahirkan setiap tahunnya. Dalam proses persalinan Perempuan Rimba yang bertempat tinggal di hutan dan peralihan antara hutan dan desa lebih memilih dukun, hal ini disebabkan karena faktor pribadi yang berkaitan dengan pengetahuan dan kepercayaan, dorongan suami, alasan ekonomi, dan jarak

yang cukup jauh jika harus ke bidan desa. Masalah nutrisi dan pola hidup sehat juga masih rendah karena keterbatasan sosialisasi dari pemerintah dan rendahnya sumber daya Perempuan Rimba.

Ditinjau dari aspek relasi gender, relasi antara laki-laki dan Perempuan Rimba tercermin dalam pepatah '*bini sekato laki*' artinya seorang istri harus patuh terhadap suami. Perintah suami asalkan tidak mencelakakan harus dipatuhi oleh istri, apabila tidak dipatuhi maka sang suami bisa mengadu kepada tengganai. Tengganai bisa mendenda sang istri yang tidak patuh pada suami, dengan membayar kain sebanyak 25 sampai 50 lembar kain. Denda dibayar oleh orangtua atau saudara laki-laki pihak istri.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat tingkat pemberdayaan Perempuan Rimba adalah pendidikan dan kegiatan ekonomi. Perempuan Rimba sebagian besar tidak bisa membaca dan menulis, masih buta huruf. Data dan temuan dalam penelitian ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari keterasingan dan keterbelakangan, dimana banyak tatanan kehidupan masyarakat rimba baik dalam bidang ekonomi, hukum, pendidikan, kesehatan, dan adat yang masih membelenggu kaum Perempuan Rimba, akibatnya upaya pemberdayaan perempuan banyak mengalami hambatan dan tantangan.

Dari beberapa data dan informasi responden serta pengamatan langsung tentang kualitas Perempuan Rimba di kawasan TNBD, maka dapat diketahui tingkat akses, kontrol, dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang. Akses, kontrol, dan partisipasi merupakan indikator pemberdayaan perempuan di TNBD.

Indikator tersebut dapat dirinci dalam bidang ekonomi, hukum adat, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam bidang ekonomi, Perempuan Rimba masih bermata pencaharian secara tradisional yaitu dengan cara meramu, mengumpul, dan berladang. Kondisi ini menyebabkan perempuan masih dalam kategori ekonomi rendah karena dari hasil mata pencahariannya belum mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam bidang hukum atau adat, kemampuan perempuan masih rendah dengan indikator secara informal, hukum adat rimba membedakan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, banyak peraturan perundang-undangan yang ada, tidak banyak yang memihak kepada perempuan, sehingga dalam implementasinya seringkali merugikan perempuan. Sebagai contoh Perempuan Rimba tidak boleh menduduki jabatan institusi sosial Orang Rimba, seperti menjadi Temenggung, wakil temenggung, depati, menti, debalang batin. Dalam bidang pendidikan, kualitas perempuan masih rendah dengan beberapa indikator antara lain: pertama, kesamaan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh pendidikan, baik formal maupun informal tidak ada perbedaan. Namun, peluang ini tereduksi dengan konstruksi budaya yang menyatakan perempuan tidak perlu sekolah karena perempuan dilindungi secara adat. Kedua, perempuan harus menikah secara adat di bawah umur, hal ini menyebabkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan jadi terhalang. Ketiga, Perempuan Rimba yang masih gadis dalam berinteraksi sosial dengan lawan jenis diatur oleh adat yang kuat. Keempat, adanya budaya melangun. Keadaan tersebut telah membuat kontrol dan partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan rendah.

Secara umum kondisi perempuan di kawasan TNBD dapat digambarkan dalam kriteria sebagai berikut: bentuk komunitas relatif kecil, tertutup, dan homogen; organisasi sosial/pranata sosialnya bertumpu pada hubungan kekerabatan atau masih bersifat informal dan kental dengan norma adat; pada umumnya terpencil secara geografis dan secara sosial budaya dengan masyarakat yang lebih luas; pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem seperti berburu dan meramu, peladang berpindah, dan kombinasi diantaranya; peralatan dan teknologinya sederhana; ketergantungan kepada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik; pada umumnya belum ada sarana transportasi umum dan hanya dapat ditempuh melalui jalur transportasi tertentu saja; masih kuatnya pengaruh kepemimpinan adat dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga; kepemilikan diperoleh dari warisan atau berdasarkan ketentuan adat; kehidupan masih diwarnai dengan tradisi atau kebiasaan turun menurun dan sudah mengenal keyakinan atau kepercayaan; pranata kesehatan masih mengandalkan pada kemampuan tradisional seperti dukun atau obat-obatan tradisional lainnya; pengetahuan diwariskan secara turun menurun dari orangtua dan tokoh adat atau mereka yang dianggap ahli; pada umumnya hidup dalam satu garis keturunan suku atau subsuku; dan hubungan dengan komunitas lain didasarkan pada kepentingan sosial dan ekonomi.

Perempuan Rimba yang masih tertinggal dan terdiskriminasi, penyebabnya antara lain, adalah: nilai-nilai dan budaya patriaki, perkawinan dan kehamilan dini dengan jarak kehamilan setiap tahun, internal Perempuan Rimba sendiri,

rendahnya kapasitas perempuan, hukum dan adat Orang Rimba yang masih diskriminatif, sistem yang masih diskriminatif, interpretasi kepercayaan yang masih bias jender, interaksi sosial yang tertutup, masih buta huruf, dan kebijakan dan program pemberdayaan yang diskriminatif.

b. Kondisi Sekolah Dasar Terdekat di Kawasan TNBD

Berdasarkan hasil temuan lapangan, baik di Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Sarolangun maupun dengan KPA Sokola dan KKI Warsi, serta dengan masyarakat di kawasan TNBD, penduduk usia sekolah banyak yang tidak bersekolah, karena beberapa hal. Adapun alasan mengapa anak-anak usia sekolah tersebut tidak bersekolah adalah yang pertama, aspek geografis yang meliputi kebutuhan jalan penghubung dan sarana komunikasi serta sarana perhubungan lainnya yang memadai untuk keperluan akses pendidikan bagi Orang Rimba. Kedua, aspek demografis yang meliputi pengisian dan pemerataan penyebaran Orang Rimba yang mempunyai budaya melangun dan selalu berpindah-pindah, hal ini menyebabkan akses pendidikan menjadi sulit karena anak didiknya harus mengikuti orangtuanya berpindah tempat. Ketiga, faktor sarana pendidikan yang belum tersedia, khususnya pendidikan khusus untuk anak-anak rimba. Keempat, faktor ekonomi dimana anak-anak dianggap sebagai sumber tenaga dalam mencari mata pencaharian sehari-hari. Kelima, faktor adat dimana orangtua menganggap pendidikan akan merubah adat mereka, sehingga mereka melarang anak-anaknya untuk bersekolah. Keenam, faktor sumber daya tenaga didik yang terbatas untuk bersedia mengajar anak-anak rimba di pedalaman hutan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan banyak anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Namun di

pihak lain, Orang Rimba yang tinggal di pinggiran hutan sebagian sudah memperbolehkan anak-anaknya untuk bersekolah di SD terdekat di pemukiman penduduk transmigrasi atau penduduk lokal.

Kondisi sekolah-sekolah yang berada di pemukiman penduduk terdekat dimana beberapa anak-anak Perempuan Rimba yang bersekolah di SD, namun hasilnya belum sesuai harapan. Dari beberapa data yang peneliti dapat di lapangan, belum ada anak-anak Perempuan Rimba yang menamatkan jenjang pendidikan dasar di SD terdekat. Selain itu jumlah anak-anak yang bersekolah masih didominasi oleh anak laki-laki, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yaitu: adanya rasa keamanan yang kurang dilindungi seperti adanya gangguan sesama teman sekolah, gangguan binatang buas, gangguan masyarakat luar, dan gangguan yang ditimbulkan oleh alam. Masalah yang banyak terjadi adalah tingginya angka droup out atau putus sekolah di SD. Beberapa penyebab dari tingginya angka putus sekolah pada anak yang bersekolah di SD terdekat, antara lain yaitu: pertama faktor psikologis, anak-anak Perempuan Rimba banyak yang merasa minder dengan anak-anak luar. Kedua, faktor musim, kaitannya dengan potensi sumber daya hutan yang menjadi mata pencaharian orangtua ketika musim yang berkaitan dengan hasil hutan itu tiba, maka anak-anak tidak masuk sekolah. Ketiga, faktor budaya melangun, orangtua akan mengajak anak-anaknya untuk ikut berpindah tempat. Keempat, faktor motivasi, rata-rata motivasi belajar anak-anak Perempuan Rimba motivasinya rendah untuk belajar.

Masalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dasar merupakan salah satu masalah utama yang sudah lama dihadapi dalam

pembangunan, termasuk juga dalam pembangunan pendidikan di kawasan TNBD. Ada banyak faktor yang menjadi kendala dalam perluasan pendidikan ini. Diantaranya adalah keterpencilan fisik dan kultural, rendahnya apresiasi dan aspirasi orangtua terhadap pendidikan. Faktor-faktor tersebut pada gilirannya akan memunculkan masalah lainnya seperti: tidak betahnya tenaga pendidik bertempat tinggal dan mengabdikan di daerah terpencil, sulitnya masyarakat memperoleh akses terhadap pendidikan, dan belum dibangunnya sarana pendidikan khusus masyarakat rimba. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan masalah pemerataan pendidikan dasar sesungguhnya merupakan masalah yang kompleks.

Berbagai pakar dan pengamat masalah pendidikan dasar telah mengusulkan beberapa alternatif untuk mengatasi ketidakmerataan pendidikan dasar ini. Untuk mengatasi masalah keterpencilan fisik dan kultural ini, perlu diambil langkah-langkah yang sesuai dengan karakteristik keterpencilan tersebut. Secara kelembagaan, pendidikan dasar perlu dikembangkan tanpa harus terikat pada batasan konvensional pendidikan formal, terutama di kawasan TNBD. Dalam hal ini, potensi belajar yang asli (*indigenous learning*) mereka perlu dikembangkan. Dalam musim-musim tertentu yang bertepatan dengan hasil hutan, siswa dapat diliburkan. Selain itu budaya lokal mereka harus dimasukkan dalam materi ajar. Untuk dapat menarik minat para guru agar bersedia ditempatkan di wilayah TNBD dan dapat betah tinggal di daerah terpencil, dengan diberikan gaji lebih besar, fasilitas yang lebih dari guru biasa karena tingkat mobilitasnya lebih tinggi.

c. Keterlibatan Semua Pihak Untuk Menunjang Keberhasilan Program

Dengan menggunakan strategi pengelolaan pendidikan bagi Orang Rimba yang berbasis pendidikan budaya lokal, maka model pengelolaan pendidikan yang akan dibangun di daerah kawasan TNBD menuntut partisipasi atau keterlibatan banyak pihak. Pihak-pihak yang perlu mendapatkan prioritas untuk memahami suatu program pengelolaan pendidikan, terutama sekolah-sekolah di TNBD.

1) Pemerintah Pusat

Kawasan Taman Nasional Duabelas berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Pusat, maka dalam hal strategi pengelolaan pendidikan perlu ada keterlibatan Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional. Keterlibatan Departemen Pendidikan Nasional ini harus dikoordinasikan secara terus menerus dengan dinas pendidikan provinsi, kabupaten, dan pemerintah daerah setempat.

2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi

Sejalan dengan adanya otonomi daerah yang diberlakukan sejak tahun 2001, pengelolaan pendidikan dasar sudah diserahkan pengelolaannya kepada daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, terbuka peluang yang cukup besar untuk membuat pendidikan di daerah menjadi lebih berkualitas, termasuk pendidikan di kawasan TNBD. Hal ini terjadi karena Bupati Kepala Daerah saat ini memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kualitas sekolah di daerahnya masing-masing melalui sistem rekrutmen guru, rekrutmen siswa, pembinaan profesionalisme guru, rekrutmen kepala sekolah, dan penentuan sistem evaluasi. Dengan perencanaan pendidikan yang komprehensif dan strategik, pengelolaan pendidikan akan memiliki peluang yang lebih besar dalam pemerataan pendidikan

khususnya di daerah terpencil. Manakala Pemerintah Daerah memiliki *political will* yang kuat dan disertai dengan kebijakan yang mengedepankan arti pentingnya pendidikan sebagai upaya *human investment* di daerah, maka pendidikan di kawasan TNBD akan memiliki praksis yang baik.

3) Orangtua dan Orang Rimba

Orangtua dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam penyelenggaraan pendidikan. Perwujudan tanggung jawab tersebut tercermin dari kadar keterlibatan dalam menunjang program dilaksanakannya pendidikan bagi anak-anak mereka. Di sisi lain, pendidikan itu sendiri merupakan bagian dari masyarakat, maka pendidikan dituntut untuk melayani masyarakat yang memerlukan pendidikan. Sebagai bagian dari masyarakat, pendidikan harus mendatangkan manfaat bagi masyarakatnya, antara lain dalam bentuk pemberian ketrampilan bagi warga masyarakat yang mengikuti pendidikan. Dalam konteks pendidikan di kawasan TNBD, harus ada pola partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Pola peran masyarakat tersebut dapat dilaksanakan secara perorangan, keluarga, atau organisasi kemasyarakatan yang dapat terwujud melalui institusi sosial secara adat. Keterlibatan orangtua dan masyarakat yang utama adalah dengan memberikan izin untuk mengikuti pendidikan baik anak laki-laki maupun perempuan tanpa harus dibatasi oleh adat budaya yang ada pada Orang Rimba. Hal ini sangat diperlukan untuk memotivasi anak-anak rimba pada usia sekolah agar mau mengikuti pendidikan.

4) Sumber Daya Pendidik

Sumber daya pendidik yang dimaksud adalah mulai dari pimpinan sekolah, guru, tenaga pendidik yang berfungsi sebagai motivator pendidikan.

Semua sumber pendidik harus disiapkan secara matang mulai dari perekrutan sampai penempatan, serta perlu memahami program-program yang akan dilaksanakan termasuk mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan pendidikan di Orang Rimba tersebut. Sumber daya pendidik dapat direkrut dari Orang Rimba yang telah menjadi kader pendidik maupun anak didik yang dianggap mampu dari teman lainnya, dengan harapan akses akan pendidikan menjadi lebih menyebar dan meluas pada Orang Rimba.

5) Anak Didik

Sasaran utama pengelolaan pendidikan ini adalah anak-anak usia sekolah baik laki-laki maupun perempuan yang ada di wilayah TNBD. Karena itu keterlibatan anak didik dalam menyokong berbagai upaya pelaksanaan pendidikan sangat diperlukan. Anak didik perlu memahami program pendidikan tersebut, sehingga merasakan bahwa program pendidikan tersebut merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, bahkan memandangnya sebagai suatu kebutuhan.

2. Model Konseptual Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Rimba Berbasis Budaya Lokal

Rasional Model

Model pendidikan berbasis budaya lokal dalam upaya pemberdayaan perempuan, diajukan dengan bersandar pada landasan konseptual, landasan yuridis, dan landasan empirik. Beberapa landasan konseptual ditetapkan yaitu *education for all*, *community base education*, pengelolaan pendidikan berbasis budaya lokal, dan kelekatan budaya masyarakat. Pendidikan untuk semua yang

dikumandangkan di Jomtien Thailand tahun 1990 dan ditegaskan kembali dalam Deklarasi Dakkar di Senegal tahun 2000, bertekad untuk meningkatkan 50% tingkat melek aksara orang dewasa, terutama wanita pada tahun 2015, sehingga mereka terus didorong untuk memperoleh pelayanan pendidikan berkelanjutan.

Aspek yuridis merupakan landasan konstitusional, sebagai payung hukum dan kebijakan yang menjadi legalitas dan akuntabilitas pada tingkat implementasi model yang disusun. Beberapa landasan yang menjadi payung hukum model yang disusun adalah UUD 1945, UU Nomor 20 tahun 2003, dan INPRES Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajar Dikdas 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Landasan Konseptual

Konsepsi model layanan pendidikan berbasis budaya lokal dalam upaya pemberdayaan perempuan, dikembangkan mengacu kepada hasil kesepakatan Dakkar di Senegal tahun 2000, bertekad untuk meningkatkan 50% tingkat melek aksara orang dewasa, terutama wanita pada tahun 2015, sehingga mereka terus didorong untuk memperoleh pelayanan pendidikan berkelanjutan. Selain itu, untuk lebih mempertegas dan mempercepat pemberantasan buta aksara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa pemberantasan buta aksara adalah program yang sangat penting dan merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Tingkat keaksaraan suatu negara merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dibidang kesehatan, nutrisi, tingkat kematian bayi dan ibu

melahirkan (IMR&MMR), kesejahteraan masyarakat, dan tingkat harapan hidup (UNESCO dan Bank Dunia, 2004).

- b) Tingkat keaksaraan suatu negara merupakan indikator yang berdampak paling kuat pada tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan paling berarti dibandingkan indikator-indikator lainnya di bidang pendidikan. Berdasarkan analisis kedalaman masing-masing komponen IPM, satu-satunya cara yang paling cepat dan paling murah untuk meningkatkan peringkat IPM adalah mengurangi jumlah buta aksara pada orang-orang dewasa.
- c) Pendidikan adalah hak esensial semua warga. Oleh karena itu, mendidik mereka yang masih buta akan pendidikan dengan maksud agar mereka dapat hidup secara layak di zaman modern ini, harus dijadikan prioritas.
- d) Ketidakmampuan baca tulis hitung sangat erat hubungannya dengan kemiskinan, tidak punya akses pada pembangunan, dan hasil-hasil pembangunan, pengangguran dan ketidakberdayaan. Semua ini menunjuk pada status ekonomi yang terkait dengan kemiskinan dan lemahnya kemampuan berproduksi.

Pendidikan Untuk Semua (*Education for All, EFA*). Kerangka Aksi Dakar tersebut menegaskan visi Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk semua dengan enam komitmen. Pertama, memperluas dan meningkatkan kesempatan pendidikan masa kanak-kanak, terutama bagi mereka yang terpinggirkan dan kurang beruntung. Kedua, memastikan bahwa pada tahun 2015, semua anak terutama perempuan, anak-anak yang terpinggirkan, dan mereka yang menjadi etnis minoritas, memiliki akses terhadap pendidikan dasar yang bermutu.

Ketiga, memastikan bahwa kebutuhan belajar dari semua generasi muda maupun dewasa terpenuhi melalui terbukanya akses terhadap segala bentuk pendidikan, program-program belajar, dan kecakapan hidup yang sesuai. Keempat, meningkatkan angka melek huruf orang dewasa menjelang tahun 2015, khususnya bagi kaum perempuan dan meningkatkan akses pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa. Kelima, melenyapkan kepincangan kesempatan gender dalam akses terhadap pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan mencapai kesetaraan kesempatan gender pada tahun 2015. Keenam, memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya, sehingga hasil-hasil belajar diakui dan terukur dapat diraih oleh semua terutama dalam keaksaraan, angka, dan kecakapan hidup.

Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2006 adalah *Literacy for Life* (keaksaraan untuk kehidupan) memberikan laporan tentang keadaan keaksaraan yang perlu mendapat perhatian serta memberikan rekomendasi kebijakan yang perlu ditempuh oleh masing-masing Negara. *EFA Global Monitoring Report 2006* mengemukakan, bahwa (1) keaksaraan adalah hak yang masih diingkari oleh hampir seperlima penduduk orang-orang dewasa di dunia ini. (2) keaksaraan adalah penting sekali untuk partisipasi dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik, terutama di dalam masyarakat sekarang ini. Demikian pula usaha-usaha di bidang sosial-ekonomi di masa lalu dan terutama di masa depan akan lebih menuntut perlunya keaksaraan yang berkualitas yang dimiliki oleh setiap orang. Suatu pendapat dikemukakan, bahwa sebenarnya niraksarawan/wati tidak masalah, biarlah tetap buta huruf asal jangan buta

keterampilan yang dapat dijadikan bekal untuk mencari nafkah sehari-hari, namun sekarang di dalam “ekonomi berbasis pengetahuan” (*knowledge-based economy*), pernyataan itu sudah diragukan kebenarannya, karena pendapat lain sudah diterima bahwa manusia hidup bukan hanya untuk makan (seperti hewan), tetapi makan untuk hidup, dan pendidikan untuk kehidupan, bukan hanya untuk ‘keterampilan’ atau ‘perut’. Sekarang ini ‘informasi’ sudah menjadi barang dagangan (*information is a commodity*) dan siapa yang mempunyai informasi akan bergerak satu dua langkah mendahului orang lain, dan kemampuan untuk mampu berbuat seperti itu adalah melalui penguasaan aksara, angka, dan berhitung atau yang disebut sekarang dengan membaca, menulis, dan berhitung disingkat calistung alias keaksaraan (W.P. Napitupulu, 2007: 28).

Pendidikan Berbasis Luas (*Broad Base Education*). Konsep lain yang dipandang relevan dengan model penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya lokal adalah pendidikan berbasis luas (*Broad Based Education, BBE*). Pendidikan berbasis luas merupakan suatu pendekatan yang memiliki karakteristik bahwa proses pendidikan bersumber pada nilai-nilai hidup yang berkembang secara luas di masyarakat. Wardiman (1998:73) menyebutkan pendidikan berbasis luas merupakan sistem baru yang berwawasan keunggulan, menganut prinsip tidak mungkin membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan, kalau tidak diawali dengan pembentukan dasar (pondasi) yang kuat. Dengan demikian *broad based education* diartikan bahwa pendekatan pendidikan yang harus memberikan orientasi yang lebih luas, kuat dan mendasar, sehingga memungkinkan warga masyarakat memiliki kemampuan menyesuaikan diri

terhadap kemungkinan yang terjadi pada dirinya baik yang berkaitan dengan usaha atau pekerjaannya.

Beberapa landasan konsep pendidikan berbasis luas. Pertama, filosofi, pendidikan berlangsung sepanjang hayat dan dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Kedua, sosial budaya: (1) nilai sosial dan budaya digali, dibina, dan dikembangkan melalui proses pendidikan guna memperkuat kepribadian bangsa, (2) menata masyarakat melalui pendidikan berdasarkan fungsi-fungsi budaya yang universal dengan orientasi pada budaya lokal yang berkembang ke arah budaya nasional dan global; (3) proses revitalisasi potensi untuk membangkitkan kesadaran, pengertian, dan kepekaan anak didik terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan atau politik sehingga pada saatnya mereka memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memperbaiki posisinya di dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, psikologis: (1) proses pendidikan diarahkan untuk mengoptimalkan karakteristik potensi yang dimiliki seseorang sehingga menuntut adanya lingkungan yang kondusif bagi kebutuhan belajarnya; (2) manusia dalam kehidupannya memerlukan hubungan dengan lainnya, sehingga membutuhkan berbagai nilai-nilai yang berkembang secara luas untuk kepentingan kelangsungan hidupnya.

Bersandar pada konsepsi Pendidikan Berbasis Luas tersebut, tergambar bahwa ada perubahan paradigma konsep pendekatan pengembangan sumber daya manusia. Sekolah hanyalah merupakan bagian kecil lembaga pendidikan di masyarakat sebagai wahana untuk meningkatkan berbagai kemampuan dan keterampilan anggota masyarakat. Perubahan yang paling mendasar adalah

pendidikan harus mampu mengoptimalkan semua potensi kelembagaan yang ada dalam masyarakat, baik itu lembaga pendidikan sekolah, lembaga yang didirikan oleh individu, sekolah, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan, ataupun lembaga swasta yang memelopori aktivitas pengembangan sumber daya manusia. Pendekatan pendidikan berbasis luas dalam program pendidikan berbasis budaya lokal mendasarkan konsep atau gagasan secara menyeluruh tentang kemampuan baca-tulis lebih luas untuk pengembangan manusia secara utuh.

Pendidikan Berbasis Masyarakat (*Community Based Education*). Mengingat karakteristik permasalahan pendidikan bagi masyarakat buta aksara, konsepsi *Community Based Education (CBE)* menjadi salah satu sandaran dalam penguatan konsep model ini, pendidikan berbasis budaya lokal menekankan pentingnya pemahaman masyarakat, karakteristiknya, kebutuhannya, kelemahan, dan kekuatan yang dimilikinya. Di sisi lain, CBE menekankan pula pada cara pemecahan masalah oleh masyarakat dengan memanfaatkan potensi lingkungan (*to help people to help them self*).

Community Based Education, dikembangkan bersandar kepada beberapa konsepsi sebagai berikut: (1) *Life long education*, (2) pendidikan kritis yang menekankan perbaikan kemampuan dasar masyarakat, meningkatkan kemampuan yang ada, serta partisipasi dalam setiap kegiatan, (3) *andragogy*, dan (4) *learning organization*.

Kurikulum pendidikan berbasis masyarakat, memiliki berbagai karakteristik, di antaranya adalah: (1) terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari,

(2) permasalahan relevan dengan kebutuhan masyarakat, (3) urutan pendidikan tergantung pada warga belajar, (4) waktu belajar fleksibel, (5) menggunakan konsep keterampilan fungsional, (6) menggunakan pendekatan andragogi, serta (7) tidak mementingkan ijazah.

Persoalannya berkembang sebuah pemahaman, bahwa penerapan konsepsi CBE memiliki kecenderungan terbukanya peluang bagi pemerintah untuk lepas dari tanggung jawabnya. Namun demikian, secara konseptual ditegaskan bahwa peran pemerintah dalam konteks CBE, yaitu: (1) sebagai pelayan masyarakat yang cepat tanggap, cepat memberi perhatian, tidak berbelit-belit, dan masyarakat sebagai fokus pelayanan utama; (2) sebagai fasilitator, pemerintah dituntut berperilaku ramah, menyatu dengan masyarakat, menangkap aspirasi, membuka jalan, membuka peluang, memberi dukungan, meringankan beban pekerjaan masyarakat, menghidupkan komunikasi, dan partisipasi masyarakat tanpa membebani masyarakat; (3) sebagai pendamping, pemerintah merupakan teman, sahabat, mitra setia dalam diskusi untuk membantu dalam merencanakan program; (4) sebagai mitra, pemerintah berperan dalam pengambilan keputusan dengan mendudukan posisi yang setara dalam satu jalur yang sama. Saling memberi, mengisi, mendukung dan tidak bersebrangan dengan masyarakat. Tidak banyak campur tangan, yang akan menyusahkan bahkan dapat mematikan kretativitas masyarakat; (5) sebagai penyandang dana. Mengingat lemahnya kemampuan masyarakat dalam pengadaan dana, di sisi lain upaya pendidikan memerlukan modal dasar, sekaitan dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan berbasis budaya lokal untuk peningkatan mutu layanan belajar bertanggungjawab dalam memobilisasi dan pengadaan dana.

Secara yuridis, pendidikan nasional memainkan peranan yang sangat penting, khususnya bagi pembangunan kehidupan intelektual nasional. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas mengamanatkan pentingnya pendidikan nasional. Pada Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Pentingnya pendidikan tersebut, lebih lanjut diuraikan dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 2003, Pasal 5 yang berbunyi:

- a) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- b) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- c) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- d) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- e) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Instruksi Presiden No. 5/2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Buta Aksara (GN-PPBA). Pemberantasan buta aksara telah mencapai titik tertinggi dalam menghadapi kesulitannya, terutama pada kelompok-kelompok masyarakat buta aksara yang belum dapat digapai yang masih besar jumlahnya, serta adanya ketimpangan *gender* secara luas, semua ini tidak dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang

konvensional. Menurunkan angka buta aksara sebagaimana ditargetkan untuk tahun 2009 memerlukan pendekatan-pendekatan inovatif.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dengan jelas telah menyatakan bahwa pemberantasan buta aksara secara tuntas harus menjadi prioritas kebijaksanaan dari Pemerintah. Melalui Instruksi Presiden maka tanggung jawab menurunkan persentase warga buta aksara yang berumur 15 tahun ke atas menjadi 5% menjelang 2009, diserahkan kepada MENKO Kesejahteraan Rakyat, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, dan Kepala Biro Statistik serta para gubernur, bupati, dan walikota.

3. Langkah-langkah Penerapan Model

Sebuah model harus dibarengi dengan langkah-langkah konkrit, diharapkan akan membawa hasil sesuai yang diharapkan. Karena itu perlu dirumuskan langkah-langkah operasional yang dapat dijadikan acuan untuk implementasi model strategi pengelolaan pendidikan Perempuan Rimba berbasis budaya lokal. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

a) Meneropong karakteristik Orang Rimba

Berdasarkan tempat tinggalnya atau tingkat keterasingannya. Ada tiga kategori masyarakat yaitu: 1). Kategori I masyarakat kelana, merupakan komunitas yang masih hidup dalam kondisi yang sangat sederhana, belum mengenal teknologi dengan penggunaan alat kerja yang terbatas dilingkungan mereka semata yang diperoleh secara turun menurun, hidup masih perpcncar dan berpindah dalam jumlah yang masih sangat kecil, belum ada kontak atau interaksi

dengan dunia luar dari komunitas mereka, komunikasi yang hanya dapat diketahui oleh kelompok atau etnis mereka sendiri. 2). Kategori II masyarakat menetap sementara, merupakan komunitas yang masih hidup berpindah menetap dalam kondisi yang sangat sederhana, dengan menggunakan teknologi yang masih sangat sederhana yang didapat dari luar komunitas mereka, hidup masih berpencar dan berpindah dalam jumlah kecil dalam orbitasi tertentu, sudah ada kontak atau interaksi dengan dunia luar dari komunitas mereka, mulai mengenal sistem bercocok tanam. 3). Kategori III masyarakat menetap, merupakan KAT yang mulai menetap di tempat tertentu dan untuk kehidupan keseharian sudah ada kontak atau interaksi dengan warga lainnya di luar komunitas mereka, berkelompok dalam jumlah lebih besar, sudah mengenal teknologi sederhana yang diperoleh dari luar komunitas mereka, mulai mengenal sistem bercocok tanam dengan bibit yang didapat atau dicari sendiri dari lingkungan serta mulai melemahnya peran tokoh adat dalam kehidupan kemasyarakatan.

Selain itu ada yang mengelompokkan Orang Rimba berdasarkan susunan stratifikasi Orang Rimba, ada tiga kategori Orang Rimba yaitu: masyarakat melangun dimana terjadi perpindahan karena keluarganya meninggal; masyarakat ngekem yaitu masyarakat yang menetap sementara, dan masyarakat menetap yang telah menetap di sebuah perkampungan dan tidak berpindah-pindah lagi.

b) Jenis Pendidikan yang dibutuhkan Orang Rimba

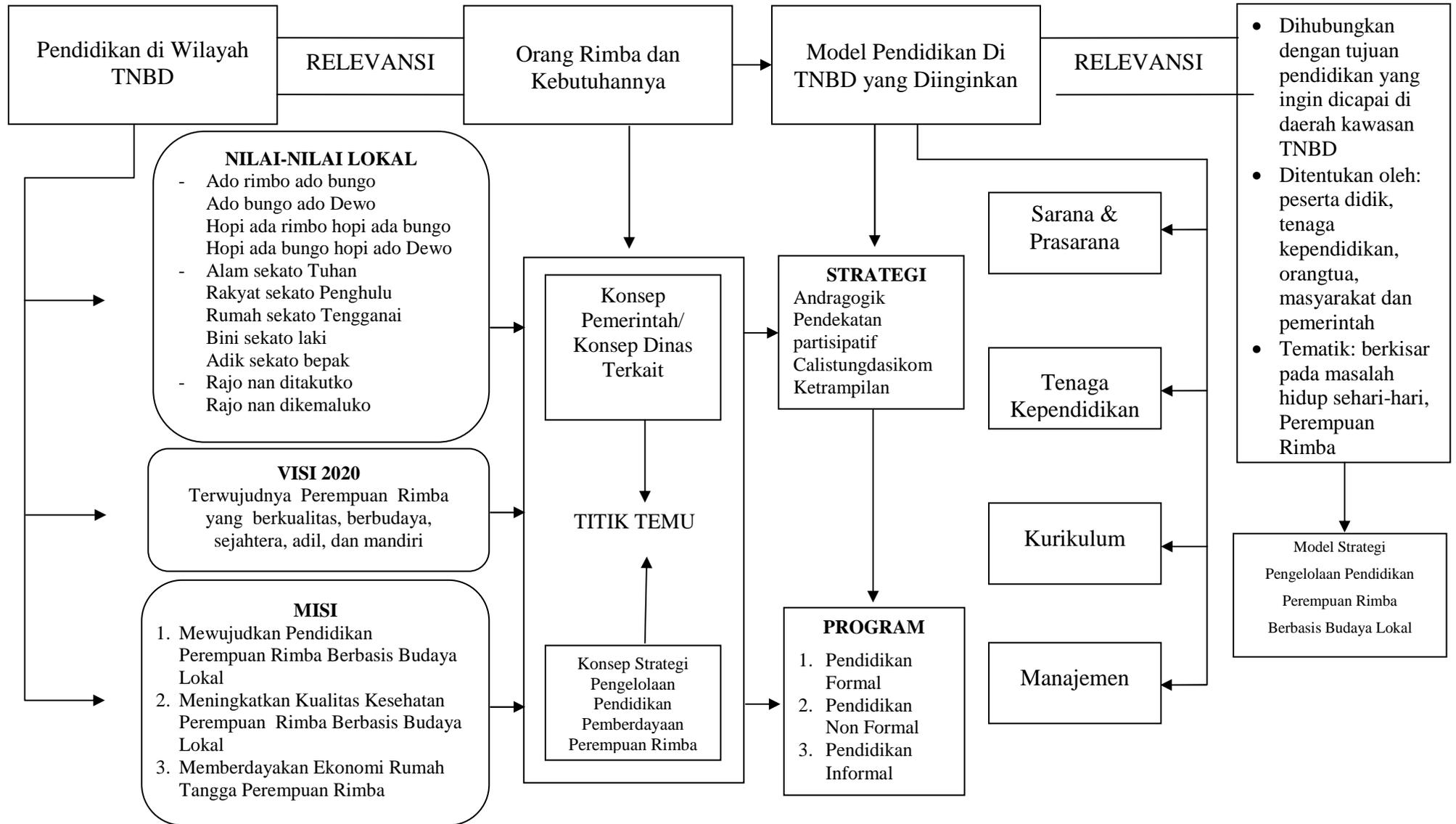
Berdasarkan karakteristik Orang Rimba tersebut maka jenis pendidikan yang dibutuhkan harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada. Untuk Orang Rimba dalam kategori ngekem atau menetap sementara, jenis pendidikan

selain diarahkan pada pola pertanian, perkebunan, dan kehutanan dalam mengelola potensi sumber daya alam yang ada di hutan. Bagi Orang Rimba dalam kategori ngekem atau menetap sementara, jenis pendidikan selain diarahkan pada pola pertanian, perkebunan, dan kehutanan, juga diberikan pendidikan baca, tulis, hitung. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat berinteraksi dengan masyarakat luar khususnya dalam jual beli hasil hutan. Sedangkan Orang Rimba dalam kategori menetap, jenis pendidikan selain diarahkan pada pola pertanian, perkebunan, dan kehutanan, baca, tulis, hitung juga perlu diberikan pendidikan ketrampilan dan pengenalan teknologi yang berguna dalam mengelola potensi sumber daya alam yang ada di hutan.

c) *Ethnopaedagogical Strategic Model*

Dalam mempersiapkan sebuah model “*Ethnopaedagogical Strategic Model*” harus bertolak dari potret pendidikan yang berada di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas, yang meliputi aspek-aspek nilai-nilai budaya lokal, visi, misi, strategi, program, sarana prasarana, tenaga kependidikan, kurikulum, dan manajemen. Model strategi pengelolaan pendidikan dalam upaya pemberdayaan Perempuan Rimba ini, dapat dilihat pada gambar 5.4 di bawah ini.

“ETHNOPAEDAGOGICAL STRATEGIC MODEL FOR RIMBA WOMEN”



Gambar 5.5
Model Strategi Pengelolaan Pendidikan Perempuan Rimba Berbasis Budaya Lokal

Aspek-aspek yang terdapat dalam konsep model “*Ethnopaedagogical Strategic Model*” tersebut dapat dijabarkan lebih rinci sebagai berikut.

(1) Nilai-Nilai Lokal

Nilai-nilai budaya lokal adalah sebagai berikut: 1). *Ado rimbo ado bungo, ado bungo ado Dewo, Hopi ado rimbo hopi ado bungo, hopi ado bungo hopi ado Dewo* artinya kehidupan Orang Rimba tidak bisa dipisahkan dari hutan tanpa ada hutan maka tidak akan ada kehidupan lagi bagi Orang Rimba. 2). *Alam sekato Tuhan, rakyat sekato pengulu, rumah sekato tengganai, bini sekato laki, adik sekato kakak*” artinya alam seperti apapun kondisinya adalah atas kehendak Tuhan, rakyat patuh terhadap penguasanya, urusan rumah tangga harus mematuhi tengganai, istri harus patuh terhadap suami, dan adik harus patuh terhadap kakak. Apabila tanpa alasan jelas tidak mematuhi yang harus dipatuhi maka denda dijatuhkan. 3). *Raja nang ditakutko dan Raja nang dikemaluko. Raja nang ditakutko* adalah raja yang ditakuti yaitu istri orang lain. Dalam hal ini individu rimba dilarang untuk berbicara atau berjalan berdua di tempat sepi atau di rumah tanpa kehadiran suaminya, walaupun tanpa sengaja tetap dinilai tabu. Sedangkan *raja nang dikemaluko* yaitu anak gadis yang dipermalukan artinya individu orang rimba terutama laki-laki harus malu dan menjaga harga diri anak perempuan orang lain, laki-laki harus bisa menjadi suri teladan dan melindungi kaum Perempuan Rimba.

(2) Visi

Visi yang ingin dicapai melalui strategi pengelolaan pendidikan berbasis budaya lokal dalam upaya pemberdayaan Perempuan Rimba adalah terwujudnya

masyarakat Perempuan Rimba yang berkualitas, berbudaya, sejahtera, adil, dan mandiri pada tahun 2020.

(3) Misi

Sedangkan misinya adalah mewujudkan pendidikan Perempuan Rimba berbasis budaya lokal, meningkatkan kualitas kesehatan Perempuan Rimba berbasis budaya lokal, dan memberdayakan ekonomi rumah tangga Perempuan Rimba.

(4) Konsep Pemerintah Daerah

Dalam era otonomi daerah seperti saat ini, di mana sektor pendidikan juga dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dan dinas terkait, praktis pendidikan harus ditingkatkan ke arah yang lebih baik dalam arti relevansinya bagi kepentingan daerah maupun kepentingan nasional.

(5) Strategi

Berbagai strategi pembelajaran kiranya dapat dipahami sebagai suatu cara yang dipilih dan ditetapkan oleh tenaga pendidik untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Dalam memilih dan menetapkan strategi pembelajaran pendidikan berbasis budaya lokal yang digunakan selama proses pembelajaran, hendaknya memperhatikan: 1) tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, 2) materi/bahan belajar, 3) media belajar yang akan digunakan, 4) orang yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran, 5) lama waktu yang tersedia untuk belajar. Berlandaskan aspek-aspek tersebut akan melahirkan berbagai alternatif strategi yang dapat digunakan, sehingga pada akhirnya tenaga pendidik akan memperoleh gambaran yang lengkap untuk menetapkan strategi yang paling memungkinkan.

Strategi pembelajaran yang coba dikembangkan dalam model studi ini lebih mengarah pada strategi andragogik dengan model pendekatan partisipatif. Model ini dipilih karena keterlibatan warga belajar akan memicu tumbuhnya motivasi dan tanggung jawab anak didik dalam mengembangkan diri dan dalam memelihara keberlangsungan kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran partisipatif dipilih karena strategi ini sangat memungkinkan dapat dipadukan dengan kondisi budaya masyarakat terutama dengan penggunaan bahasa (bahasa rimba sebagai bahasa ibu). Begitu pula kaitannya dengan kepuasan anak didik dalam hal mutu layanan. Penguasaan kompetensi akan meningkat apabila anak didik secara partisipatif mampu melibatkan diri dalam proses pembelajaran dan pemeliharaan pembelajaran.

Penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya lokal dikembangkan dengan menggunakan strategi membaca, menulis, berhitung, diskusi, aksi, dan komunikasi (calistungdasikom). Strategi tersebut memanfaatkan sumber-sumber yang kental dengan kelekatan budaya lokal, selanjutnya dikemas ke dalam media dan bahan belajar.

Ada empat kriteria dasar yang menunjang peningkatan penguasaan kompetensi dasar dan kepuasan anak didik:

- (a) Strategi pembelajaran berbasis budaya lokal lebih ditekankan pada kebutuhan belajar yang dirasakan anak didik. Upaya untuk memenuhi kebutuhan anak didik inilah yang menjadi ujung tombak penyusunan dan pengembangan program kegiatan belajar. Dalam pemahaman kebutuhan belajar seyogyanya bahasa rimba (budaya lokal) dan sumberdaya yang ada di lingkungan

masyarakat rimba harus menjadi acuan khusus dan dijadikan bahasa pengantar dalam penyampaian atau penggalian kebutuhan belajar.

- (b) Berorientasi pada tujuan kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran partisipatif andragogik direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan belajar yang ditetapkan sebelumnya. Di dalam perencanaan, tujuan belajar seyogyanya disusun dan dirumuskan berdasarkan kebutuhan belajar. Oleh karena itu dalam pengembangan strategi ini tujuan pembelajaran disusun dan dirumuskan dengan mempertimbangkan latar belakang pengalaman anak didik, potensi yang dimiliki warga belajar, sumber-sumber yang tersedia di lingkungan kehidupan anak didik serta kemungkinan hambatan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini kebutuhan belajar, potensi dan sumber-sumber serta kemungkinan hambatan, perlu diidentifikasi terlebih dahulu agar tujuan pembelajaran bisa dirumuskan secara akurat dan proses kegiatan pembelajaran dapat dirancang dan dilaksanakan dengan efektif.
- (c) Pendekatan pembelajaran berpusat pada anak didik (*participant centered*). Pendekatan partisipatif mengandung makna bahwa kegiatan belajar yang dilakukan didasarkan atas dan disesuaikan dengan latar belakang kehidupan dan budaya anak didik. Latar belakang kehidupan dan budaya yang meliputi: bahasa, agama, adat istiadat, pendidikan, kesenian, pekerjaan, dan pergaulan.
- (d) Pembelajaran yang dikembangkan dalam pendekatan partisipatif berdasar pada pengalaman anak didik (*experiential learning*). Kegiatan pembelajaran disusun dan dilaksanakan berangkat dari hal-hal yang telah dipelajari serta pengalaman yang telah dimiliki anak didik.

(6) Kebijakan

Kebijakan untuk Pendidikan Berbasis Lokal ini mencakup:

- Kebijakan Pemerintah Pusat dalam pendidikan.
- Kebijakan Pemerintah Daerah khususnya dinas pendidikan, dinas sosnakertrans, dinas pemberdayaan perempuan harus ada koordinasi dalam pemberdayaan Orang Rimba supaya ada titik temu dalam pelaksanaan program-programnya. Kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu adanya koordinasi dan kerjasama dalam pemberdayaan Orang Rimba khususnya Perempuan Rimba supaya tidak ada kegiatan yang tumpang tindih dan hasilnya lebih optimal, secara ekonomis ada efektifitas dari segi pendanaan.
- Kebijakan Pemerintah tentang hak ulayat Orang Rimba kaitannya dengan kepemilikan lahan sebagai sumber kehidupan mereka.

(7) Dana

Sumber dana dapat berasal dari:

- Sumber dana dari Pemerintah Pusat (APBN).
- Sumber dana dari Pemerintah Daerah (APBD).
- Sumber dana dari stakeholders setempat (Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, Perusahaan Tambang batubara).
- Sumber dana dari Orang Rimba.

(8) Sarana Prasarana

Sarana prasarana belajar harus disesuaikan dengan kondisi anak didik rimba seperti:

- Merencanakan gedung sekolah dalam bentuk panggung, dengan atap yang berasal dari bahan-bahan di hutan, tidak harus disekat-sekat, hal ini berdasarkan keyakinan Orang Rimba jika berada dalam ruangan tertutup, bersekat, Dewa tidak akan datang (kepercayaan).
- Alat peraga berasal dari hasil hutan (buah-buahan, tanaman, pohon dari hasil hutan).
- Aksesibilitas, harus bisa dijangkau oleh anak-anak rimba yang berasal dari beberapa rombongan.
- Pakaian bersekolah tidak harus diseragamkan, hal ini disesuaikan dengan adat budaya rimba dimana anak-anak perempuan kebiasaannya hanya memakai kembangan kain sarung dan anak laki-laki hanya memakai cawat/cawat.
- Anak didik diasramakan, diharapkan dengan diasramakan akan lebih memudahkan proses pembelajaran mengingat tempat tinggal anak-anak rimba jaraknya cukup berjauhan.
- Alat pembelajaran tidak harus disamakan dengan alat pembelajaran di sekolah formal seperti meja, kursi dapat diganti dengan tikar buatan lokal.

(9) Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan harus memenuhi kriteria berikut ini:

- Guru harus perempuan dengan alasan lebih mudah berinteraksi dengan sesama perempuan.
- Guru yang bersedia bertempat tinggal di lingkungan Orang Rimba.
- Guru yang memahami bahasa rimba untuk kemudahan proses pembelajaran.

- Orang Rimba yang bisa baca, tulis hitung bisa dijadikan kader pendidik/guru.
- Guru yang berasal dari tokoh Orang Rimba untuk mengajarkan adat budaya rimba.
- Guru dapat direkrut oleh Pemerintah Daerah melalui guru kontrak, guru PNS, atau guru yang berasal dari LSM seperti KPA Sokola dan KKI Warsi yang telah mengajar anak-anak rimba.
- Guru diberikan tunjangan lebih dari guru biasa supaya lebih termotivasi.

(10) Anak Didik

- Tidak ada batasan umur untuk mengikuti pendidikan.
- Anak didik Perempuan Rimba.
- Anak didik bebas biaya pendidikan, tidak dipungut uang untuk kelangsungan proses pembelajaran.

(11) Kurikulum

Model konseptual ini memerlukan inisiatif-inisiatif yang mampu mengupayakan dan mewujudkan kurikulum dari yang masih bersifat potensial atau tertulis (abstrak) menjadi lebih aktual atau terealisasi dengan melakukan serangkaian kegiatan pelaksanaan dalam bentuk proses pembelajaran pada program pendidikan. Oleh sebab itu, ide-ide pengembangan kurikulum harus tumbuh dan berasal dari bawah (*grass root level*), sehingga diperlukan suatu kebijakan yang bersifat komprehensif serta berlaku bagi seluruh komponen program pendidikan keaksaraan dan merupakan arah pembaharuan Kamil, (2002). Lebih tegasnya dikuasainya pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan merupakan tolok ukur bagi penguasaan kompetensi dasar anak didik. Sehubungan

dengan Fullan (1979) dalam Kamil (2002) menyebutkan bahwa implementasi kurikulum adalah “ *putting into practice of an idea, program or set of activities which is new to the individual or organization using it*”. Secara tegas Fullan menyatakan, bahwa program yang diimplementasikan merupakan pembaharuan “*new to individual organization it*”.

Kurikulum Pendidikan Berbasis Budaya Lokal yang disusun disesuaikan dengan kelekatan budaya lokal anak-anak rimba. Kelekatan budaya lokal tersebut diuraikan dalam perlakuan tenaga pendidik yang diterapkan pada proses belajar mengajar. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), tetapi disusun berdasarkan kebutuhan belajar anak-anak rimba dengan berbasis pada adat budaya lokal setempat. Dalam merencanakan pola pendidikan formal yang berbasis budaya lokal, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- Kurikulumnya KTSP yang berbasis budaya lokal,
- Ketahanan kultural Orang Rimba,
- Metode pembelajaran lisan/oral/cerita karena Orang Rimba belum mengenal baca tulis,
- Tenaga pendidik bisa mengajar huruf dengan cara oral disertai contoh benda nyata atau model,
- Model pembelajarannya harus interaktif,
- Kedisiplinan disesuaikan dengan adat budaya,
- Waktu belajar fleksibel artinya menyesuaikan dengan kondisi kehidupan sehari-hari anak-anak rimba,
- Pengetahuan tentang alam semesta, lingkungan.

Menurut Koentjaraningrat (1979) dari ketujuh *cultural universals* secara rinci dapat diungkap sebagai berikut: (1) sistem peralatan dan perlengkapan hidup manusia, terdiri atas alat-alat produktif, alat-alat distribusi dan transportasi, wadah-wadah dan tempat-tempat untuk menaruh, makanan dan minuman, tempat berlindung dan perumahan, dan senjata; (2) sistem mata pencaharian hidup, terdiri atas berburu dan meramu, perikanan, bercocok tanam di ladang, bercocok tanam tidak tetap, peternakan, dan perdagangan; (3) sistem kemasyarakatan, terdiri atas sistem kekerabatan, sistem kesatuan hidup setempat, asosiasi dan perkumpulan-perkumpulan, sistem kenegaraan; (4) bahasa terdiri atas bahasa lisan dan bahasa tertulis; (5) kesenian terdiri atas seni patung, seni relief, seni lukis dan gambar, seni rias, seni vokal, seni instrumental, seni kesusasteraan, dan seni drama; (6) sistem pengetahuan, terdiri atas: pengetahuan tentang sekitaran alam, pengetahuan tentang alam flora, pengetahuan tentang alam fauna, pengetahuan tentang zat-zat dan bahan-bahan mentah, pengetahuan tentang tubuh manusia, pengetahuan tentang kelakuan sesama manusia, pengetahuan tentang ruang, waktu, dan bilangan; (7) sistem religi dan kehidupan kerohanian, terdiri atas: sistem kepercayaan, kesusasteraan suci, sistem upacara keagamaan, komunitas keagamaan, ilmu gaib, dan sistem nilai dan pandangan hidup.

Pendapat tersebut jika dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari Orang Rimba, pengetahuan tentang alam dapat diajarkan melalui:

- a. Cara bermata pencaharian (berburu, berladang, meramu, mengumpul) masuk dalam ranah sistem ekonomi

- b. Kesenian (seloko, besale, pantun, menari, menyanyi, ketrampilan menganyam) dalam ranah kesenian
- c. Pengetahuan alam semesta (nama hari, bulan, iklim), Adat istiadat (adat kelahiran, kematian, kawin, adat pantangan/larangan) dalam ranah sistem pengetahuan
- d. Teknologi (alat berburu, alat pertanian, alat perkebunan, alat perikanan, alat meramu, kesehatan) dalam ranah teknologi
- e. Mengajarkan bahasa indonesia melalui bahasa rimba, dalam ranah bahasa
- f. Pendidikan yang berhubungan dengan religi dan religiusitas, dalam ranah religi
- g. Pendidikan tentang organisasi sosial Orang Rimba seperti: Temenggung, Wakil Temenggung, Depati, Menti, Debalang Batin, Jenang, dalam ranah organisasi sosial.

Pendidikan Berbasis Lokal, dalam proses pembelajarannya harus memperhatikan kelekatan budaya lokal Orang Rimba. Dengan memperhatikan kelekatan budaya lokal diharapkan tidak ada lagi penolakan terhadap pendidikan. Untuk gambaran jelasnya pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.16
Komponan Kelekatan Budaya Lokal

Komponen	Aspek	Indikator
Kelekatan Budaya Lokal	1. Sistem peralatan dan perlengkapan hidup	1.1 Jenis alat-alat produksi yang paling sering digunakan di rimba
		1.2 Alat-alat distribusi dan transportasi yang paling banyak digunakan masyarakat.
		1.3 Wadah-wadah yang biasa digunakan untuk menaruh makanan dan minuman
		1.4 Jenis tempat yang biasa digunakan untuk berlindung dari panas, dingin,

Komponen	Aspek	Indikator
		hujan, dan bahaya
		1.5 Model rumah/sudung yang banyak ditempati saat ini
		1.6 Jenis senjata yang dimiliki untuk mempertahankan diri
	2. Sistem mata pencaharian	2.1. Berburu
		2.2. Meramu
		2.3. Mengumpul
		2.4. Bercocok tanam di ladang
		2.5. Bercocok tanam tidak tetap
	3. Sistem kemasyarakatan	3.1. Sistem kesatuan hidup Orang Rimba
		3.2. Sistem kekerabatan
	4. Bahasa	4.1. Bahasa Rimba Lisan
		4.2. Bahasa Rimba Tertulis
	5. Kesenian/ Adat Budaya	5.1. Besale
		5.2. Bebale
		5.3. Melangun
	6. Sistem Pengetahuan	6.1. Pengetahuan tentang alam sekitar hutan
		6.2. Pengetahuan tentang alam flora
		6.3. Pengetahuan tentang alam fauna
		6.4. Pengetahuan tentang zat-zat dan bahan-bahan mentah
		6.5. Pengetahuan tentang tubuh manusia
		6.6. Pengetahuan tentang ruang, waktu, dan bilangan

(12) Manajemen

Dalam pengelolaan pembelajaran pendidikan berbasis budaya lokal meliputi langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam perencanaan, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut.

- (a) Melakukan identifikasi kebutuhan belajar dan analisis budaya anak didik.
- (b) Menyusun rancangan penyelenggaraan program pendidikan berbasis budaya lokal.
- (c) Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait
- (d) Menentukan strategi pembelajaran

- (e) Menyusun bahan belajar
- (f) Menyiapkan media pembelajaran
- (g) Menyusun rancangan instrumen evaluasi
- (h) Merekrut dan melatih tenaga pendidik dan calon anak didik

Dalam pelaksanaan pendidikan, langkah-langkah pelaksanaannya sebagai berikut:

- (a) Proses belajar mengajar, tenaga didik menggunakan bahan belajar yang diangkat dari karakteristik budaya lokal yang telah dirancang sebelumnya. Sehingga terjadi komunikasi yang interaktif antara sesama anak didik dan tenaga pendidik.
- (b) Monitoring dan evaluasi, selama proses kegiatan pembelajaran dipantau dan pada setiap pertemuan tenaga didik melaksanakan evaluasi.
- (c) Pelaporan; tenaga pendidik melaporkan perkembangan anak didik dalam penyerapan bahan belajar.
- (d) Tindak lanjut, tenaga pendidik bersama-sama dengan anak didik dari setiap akhir pertemuan berdiskusi melihat titik lemah yang harus diperbaiki pada pertemuan berikutnya.

Dalam mengevaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui kemajuan anak didik selama mengikuti program pendidikan. Evaluasi pembelajaran mengacu pada tujuan program pendidikan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baca-tulis-hitung dan kemampuan anak didik, maka perlu dilaksanakan evaluasi secara bertahap, berkala, rutin, dan teratur.

d) Prinsip Penerapan Model

Implementasi pembelajaran harus mempertimbangkan kondisi dan latar belakang dari anak didik antara lain bahwa: (1) anak didik dalam kesehariannya biasa menggunakan bahasa lokal yaitu bahasa rimba, (2) harus sesuai dengan minat dan kebutuhan anak didik, (3) setiap anak didik memiliki kemampuan untuk belajar dan mengembangkan potensi yang dimiliki, (4) mendekati dengan kehidupan sehari-hari, seperti bahasa yang digunakan, mata pencaharian, alat-alat yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari, organisasi kemasyarakatan, dan alat transportasi, (5) anak didik memiliki pengalaman belajar.

Implementasi program pembelajaran untuk anak didik mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) anak didik akan termotivasi untuk belajar jika sesuai dengan pengalaman, minat dan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, pengalaman, minat, dan kebutuhan merupakan titik awal dalam pengorganisasian aktivitas pembelajaran di kelompok belajar, (2) orientasi belajar berhubungan erat dengan kehidupannya, oleh karena itu unit yang tepat untuk pembelajaran program pendidikan berbasis budaya lokal adalah situasi kehidupannya bukan mata pelajaran, (3) pengalaman adalah sumber yang paling kaya yang harus diakui keberadaannya bagi pembelajaran program pendidikan berbasis budaya lokal, oleh karena itu metode utama dalam pembelajaran adalah menganalisis pengalaman anak didik, (4) setiap anak didik mempunyai kebutuhan untuk mengarahkan diri, oleh karena itu, peran tutor adalah meningkatkan proses saling memberi dan menerima bukannya mentransfer pengetahuan kepada mereka, (5) perbedaan individu di antara anak didik meningkat seiring dengan bertambahnya

usia. Atas dasar itu, pola pembelajaran harus menghargai secara penuh adanya perbedaan gaya, waktu, tempat dan bentuk penyampaian materi belajar.

e) **Prioritas Program Pendidikan**

Prioritas pelaksanaan program pendidikan masyarakat rimba di kawasan TNBD adalah diarahkan pada pendidikan dasar. Hal ini merupakan salah satu upaya guna mencapai ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun dan upaya meningkatkan kualitas penduduk pada umumnya, juga menjadi landasan yang kokoh bagi anak didik agar mempunyai masa depan yang lebih baik. Pendidikan dasar yang diterapkan untuk anak-anak rimba ini disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak rimba saat ini yaitu: baca, tulis, hitung. Program baca, tulis, hitung ini diharapkan dapat membantu dalam berinteraksi dengan masyarakat luar dan bertransaksi terutama dalam jual beli hasil hutan. Dengan mereka trampil membaca, menulis, dan berhitung diharapkan agar mereka mampu menghadapi permasalahan yang muncul akibat tekanan-tekanan dari luar.

Tabel 5.17
Kompetensi Baca, Tulis, Hitung

Komponen	Aspek	Indikator
Membaca	Membaca huruf vokal dan konsonan abjad Latin	<ul style="list-style-type: none"> • Permainan belajar kartu huruf • Bernyanyi • Menggambar • Melafalkan huruf
	Mengenal dan membaca suku kata yang terdiri atas dua suku kata	<ul style="list-style-type: none"> • Melafalkan suku kata • Permainan suku kata
	Membaca kata yang terdiri atas 3 suku kata	<ul style="list-style-type: none"> • Permainan kata yang dikenal di lingkungan setempat • Kartu kata • Lacak kata

Komponen	Aspek	Indikator
	Membaca 3 kata yang berimbuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Kata yang berimbuhan yang sesuai dengan gambar • Menjodohkan kata dengan gambar • Membaca gambar • Memperagakan kata melalui gerak
	Membaca papan nama, arah, label, merek, poster sederhana	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan berbagai jenis papan nama, arah, label, merek, poster berdasarkan gambar • Memperagakan cara membaca berbagai jenis papan nama, arah, label, merek, poster berdasarkan gambar • Menjodohkan kata dengan gambar • Permainan kata dan gambar
Menulis	<ul style="list-style-type: none"> • Menulis huruf vokal & konsonan • Menulis suku kata • Menulis minimal 3 kata yang ada di lingkungan setempat 	<ul style="list-style-type: none"> • Praktik menulis huruf vokal dan konsonan • Menulis berdasarkan nama-nama benda yang ada di lingkungan Orang Rimba
	<ul style="list-style-type: none"> • Menulis nama dan alamat sendiri, saudara, atau teman 	<ul style="list-style-type: none"> • Praktik menulis nama dan alamat • Mengisi formulir sederhana (nama, alamat, umur, anggota keluarga)
	<ul style="list-style-type: none"> • Menulis angka 1-20 • Menulis angka 21-50 • Menulis angka 51-100 	<ul style="list-style-type: none"> • Menulis angka berdasarkan gambar
Berhitung	Menghitung banyak objek secara berurutan (bilangan 1-20)	Diberikan sejumlah objek dilingkungan sekitar, warga belajar menghitung jumlah objek tersebut (bilangan 1-20)
	Membaca dan menulis lambang bilangan hingga dua digit	Membaca dan menulis secara aktif/partisipatif lambang bilangan dalam kata-kata dan angka hingga dua digit
	Membandingkan dua kumpulan objek hitung menyatakan dalam istilah banyak, lebih sedikit, atau sama dengan.	Membandingkan dua kumpulan objek yang dikenal dan menyatakan secara lisan dan tulisan dalam istilah 'lebih banyak', 'lebih sedikit', atau 'sama banyak'
	Mengurutkan lambang bilangan dari terkecil sampai terbesar hingga dua digit	Mengurutkan serangkaian lambang bilangan yang disajikan dari terkecil hingga terbesar atau sebaliknya hingga dua digit
	Menyusun gambar berdasarkan banyak objek dari terkecil hingga dua digit	Disediakan beberapa gambar yang masing-masing memiliki sejumlah obyek, warga belajar diminta mengurutkan gambar berdasarkan jumlah objek dari terkecil hingga terbesar atau sebaliknya
	Menyatakan contoh	Menyatakan dengan lisan (dengan bahasa

Komponen	Aspek	Indikator
	dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan	yang telah dikuasai) contoh soal dalam kehidupan sehari-hari yang memerlukan penjumlahan dan pengurangan dalam penyelesaiannya
	Membaca, menuliskan dan menggunakan simbol +, -, dan = dalam mengerjakan penjumlahan dan pengurangan hingga dua digit	Menghitung jumlah atau selisih dua kumpulan objek yang sama, kemudian menuliskan dan membacakannya dalam lambang bilangan dengan simbol +, -, = hingga dua digit
	Menghitung penjumlahan atau pengurangan bilangan hingga dua digit dengan metode susun ke bawah	Menghitung penjumlahan atau pengurangan bilangan hingga dua digit dengan metode penulisan lambangan bilangan susun ke bawah
	Menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari (dibatasi hanya dua digit)	Menerapkan konsep penjumlahan dan pengurangan secara fungsional dengan mengambil contoh dari pekerjaan atau kehidupan sehari-hari (dibatasi hanya 2 digit)
	Mengenal satuan waktu seperti: tahun, bulan, minggu, hari dan jam	Dikenalkan nama-nama bulan dan jumlah hari dalam satu bulan. Dikenalkan jumlah bulan dalam satu tahun, jumlah hari dalam satu minggu, jumlah jam dalam satu hari.

f) Terbuka Akses Pendidikan

Pendidikan merupakan jembatan untuk membuka kebuntuan akses dan menempatkan kelompok masyarakat terbelakang kepada wilayah pencerahan yang dapat membebaskan komunitas masyarakat yang ada di pedalaman dan keterasingan. Dengan pendidikan diharapkan dapat membuka berbagai akses pembangunan terutama akses pendidikan dalam upaya pemberdayaan Perempuan Rimba.

g) Program Pendidikan Perempuan Rimba

Selain jalur pendidikan formal melalui pendidikan dasar, untuk memenuhi kebutuhan penduduk dewasa yang buta huruf dapat diberikan program pendidikan

non formal melalui pendidikan keaksaraan fungsional (KF), life skill atau program pemberian ketrampilan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di hutan, dan program paket A yang setara dengan pendidikan dasar. Berikut ini komponen-komponen pendidikan untuk Perempuan Rimba yang dapat disesuaikan dengan adat kebiasaan rimba.

Tabel 5.18
Komponen Program Pendidikan Perempuan Rimba

No	Komponen	Kegiatan
1.	Pemberantasan buta huruf dalam arti luas	Membaca dan menulis latin Berbahasa Rimba Berbahasa Indonesia Berhitung Perubahan sikap mental
2.	Penyuluhan Pertanian, pemanfaatan lahan hutan dengan aneka usaha tani	Bimbingan dan penyuluhan dalam pengolahan dan pemeliharaan tanaman. Pemanfaatan lahan hutan dengan berladang karet dan berkebun sawit
3.	Penyuluhan serta pelaksanaan keluarga berencana dan kependudukan	Penyuluhan kependudukan dan KB Pengadaan Klinik KB Pembinaan Kelompok Akseptor Lestari Membudayakan NKKBS
4.	Penyuluhan/penataran UU Perkawinan dalam rangka memasyarakatkan UU tersebut	Penyuluhan 6 azas UU Perkawinan Peningkatan peetahuan tentang hak dan kewajiban suami/ isteri, dalam keluarga menurut UU Perkawinan dan Agama.
5.	Peningkatan Keterampilan perempuan untuk menambah pendapatan dalam keluarga.	Latihan berbagai jenis keterampilan perempuan untuk menambah pendapatan keluarga. Pemberian alat-alat pembinaan kelompok keluarga
6.	Peningkatan peran dan fungsi perempuan dibidang kesejahteraan sosial	Latihan kepemimpinan Latihan keterampilan usaha ekonomi produktif. Pemberian simulasi sarana produksi dan peralatan Pengumpulan data Pembinaan kelompok perempuan Bina Swadaya
7.	Peningkatan keterampilan perempuan dibidang industri kecil/industri rumah tangga/ kewiraswastaan	Pendidikan motivasi Peningkatan mutu Peningkatan disain, promosi pemasaran
8.	Kesehatan	Gerakan keluarga sehat Gerakan hidup bersih

Tabel 5.19
Jenis Pendidikan Perempuan Rimba

No.	Jenis Pendidikan	Materi Ajar
1	Pendidikan Rumah Tangga	cara memasak, mengurus rumah, mengasuh adik-adiknya
2	Pendidikan Sosial	berinteraksi dengan sesama Orang Rimba tatacara bergaul dengan teman sebaya, bersikap dengan orang yang lebih dewasa termasuk kakak atau saudara, bersikap kepada lawan jenis, bersikap hormat kepada orangtua atau tua tengganai di Orang Rimba. diajarkan bagaimana harus bersikap hati-hati kepada masyarakat luar
3	Pendidikan Ekonomi	cara berburu, cara meramu, cara berladang, cara mencari ikan di sungai, cara menyadap getah di kebun, cara mencari jernang, dammar di hutan, cara mencari buah-buahan, kegiatan lain yang berkaitan dengan mencari kehidupan sehari-hari
4	Pendidikan Ketrampilan	cara menganyam dalam membuat tikar, cara membuat ambung, cara membuat alat-alat sederhana yang bahannya dibuat dari rotan atau dammar
5	Pendidikan Religi	ajaran mantra-mantra untuk menjaga keselamatan ajaran mantra-mantra untuk menjaga kesehatan
6	Pendidikan Seni/Budaya	ajaran untuk berpantun, ajaran berseloka, ajaran bernyanyi, menari, ajaran ketangkasan yang berkaitan dengan seni dan budaya
7	Pendidikan Kesehatan	ajaran membersihkan badan, membersihkan pakaian, membersihkan rumah dan pekarangan, belajar meramu obat-obatan yang berasal dari akar dan tumbuh-tumbuhan

h) Rencana Aksi

Usulan rencana aksi atau implementasi program pendidikan di kawasan TNBD dapat dilihat pada matriks 5.1 di bawah ini. Rencana aksi disusun berdasarkan permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan, yang secara langsung maupun tidak langsung turut memberi andil di dalam peningkatan

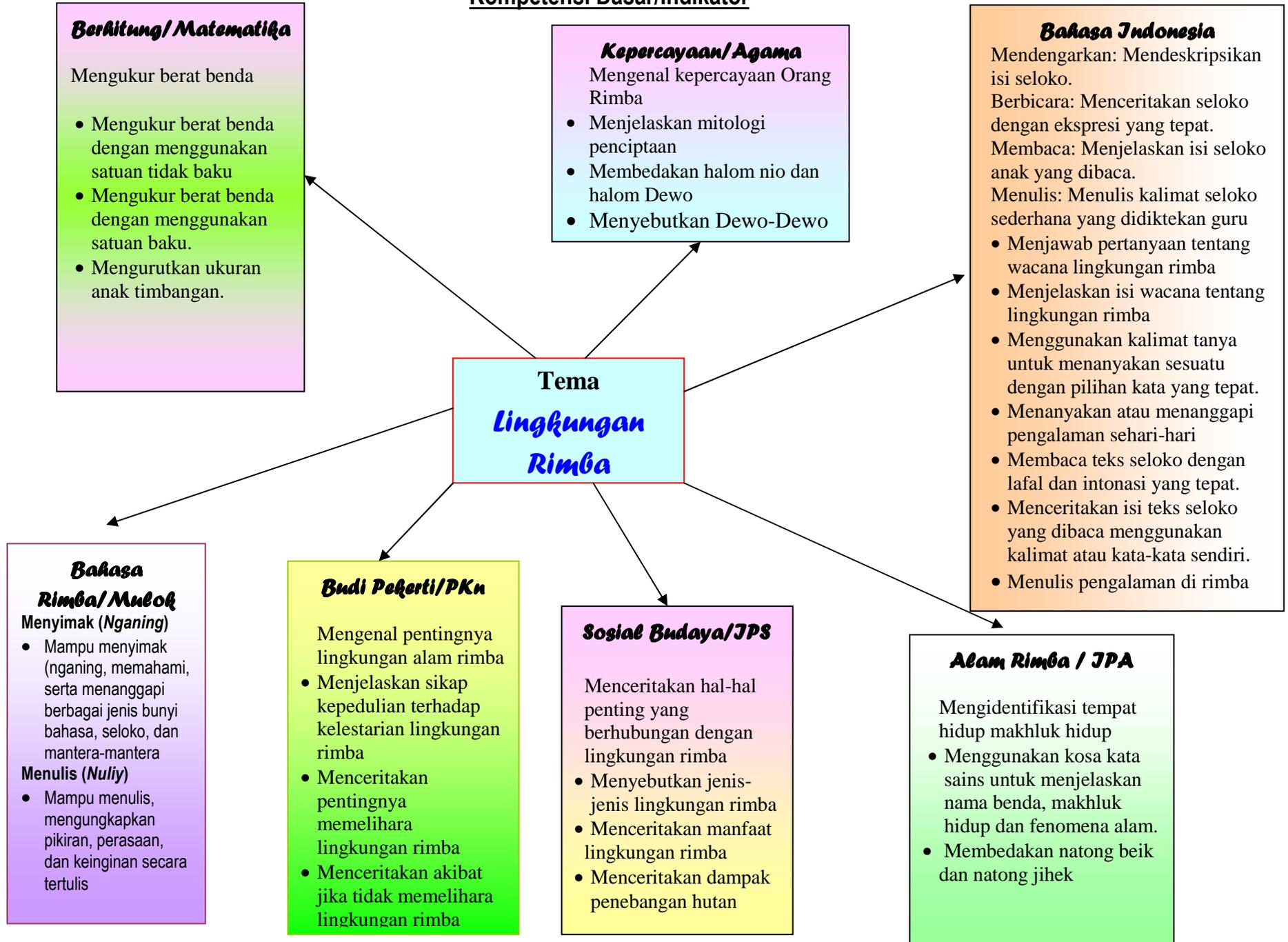
pembangunan di bidang pendidikan. Permasalahan yang tergambar dalam rencana aksi diuraikan berdasarkan parameter-parameter komponen wilayah yang mencakup komponen geografi, ekonomi, sosial budaya, kebijakan pemerintah, gedung sekolah, sarana prasarana, guru, siswa, kurikulum, proses belajar mengajar, manajemen sekolah, evaluasi, partisipasi orangtua dan masyarakat, dan pendidikan non formal.

Matriks 5.1
Rencana Aksi Program Pendidikan Berbasis Budaya Lokal
dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan di TNBD

No.	Komponen	Parameter	Permasalahan	Rencana aksi	Keterangan
1.	Geografi	<ul style="list-style-type: none"> Kelancaran transportasi dan komunikasi antar seluruh wilayah. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya wilayah pedesaan yang sulit dijangkau dan terisolasi 	<ul style="list-style-type: none"> Membuka isolasi dengan jaringan jalan dan transportasi yang memadai 	Perlu kerjasama Instansi terkait
2.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan ekonomi keluarga yang mendukung investasi di bidang pendidikan anak dan pemberdayaan perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> Lemahnya kemampuan ekonomi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan SDM berdasarkan mata pencaharian, baik berburu, meramu, mengumpul, berladang, dan berkebun Membentuk jaringan ekonomi dalam hal pemasaran hasil pertanian, perkebunan, hasil hutan, dan hasil kerajinan Memperkenalkan teknologi sederhana bidang pertanian, perkebunan. 	
3.	Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi sosial budaya yang mendukung berkembangnya pendidikan anak dan perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> Lemahnya dukungan sosial budaya terhadap pendidikan. Lemahnya dukungan terhadap pemberda-yaan perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong lembaga struktural dalam institusi sosial secara adat, tokoh adat, tokoh masyarakat, guna melakukan dialog dengan paratokoh adat dan tokoh masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak dan pemberdayaan perempuan 	Perlu menjalin Kerjasama dengan Tokoh masyarakat dan tokoh Adat serta pihak swasta

4.	Kebijakan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung pengembangan pendidikan anak dan perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya dana pemerintah (baik pusat maupun daerah) untuk membiayai pendidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggalang partisipasi masyarakat untuk membiayai pendidikan dengan membangun sistem pendidikan yang berbasis masyarakat. • Mendorong peran pihak swasta atau perusahaan untuk membantu mengatasi persoalan dana pendidikan dan kebutuhan fasilitas sekolah. 	Perlu menjalin kerjasama dengan Pemerintah, pihak swasta, perusahaan
5.	Gedung Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Harus tersebar merata di seluruh wilayah TNBD berdasarkan besaran jumlah penduduk dan karakter wilayah. • Gedung sekolah dibuat seperti balai pertemuan tetapi memenuhi standar pendidikan dan kesehatan, dengan mengembangkan prinsip kesejukan dan kerindangan, sehingga sesuai dengan kebiasaan hidup sehari-hari 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya gedung sekolah yang dibangun 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu pembangunan gedung atau bangunan sekolah yang sesuai dengan karakteristik masyarakat rimba • Mengembangkan budaya lokal melalui pemanfaatan sumber daya hutan yang ada guna menciptakan kesejukan dan kerindangan. 	
6.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan prasarana belajar disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan hidup masyarakat rimba 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya sarana dan prasarana belajar mengajar di kawasan masyarakat rimba. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana dan prasarana belajar-mengajar secara memadai disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan hidup 	
7.	Guru	<ul style="list-style-type: none"> • Guru harus tersedia dan terdistribusi secara merata sesuai dengan kebutuhan • Guru harus profesional dan mencintai profesinya, karena memegang peranan kunci dalam dunia pendidikan sekolah, guna mengemban tugas mengajar, mendidik dan melatih. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya guru yang bersedia mengajar di pedesaan dan daerah terpencil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya program intensif para guru untuk mengabdikan di daerah pedesaan, dan terpencil. • Perlu program redistribusi guru secara proporsional dan memadai terhadap semua • Perlu diberikan gaji lebih terhadap guru yang mengajar di pedalaman 	

Kompetensi Dasar/Indikator

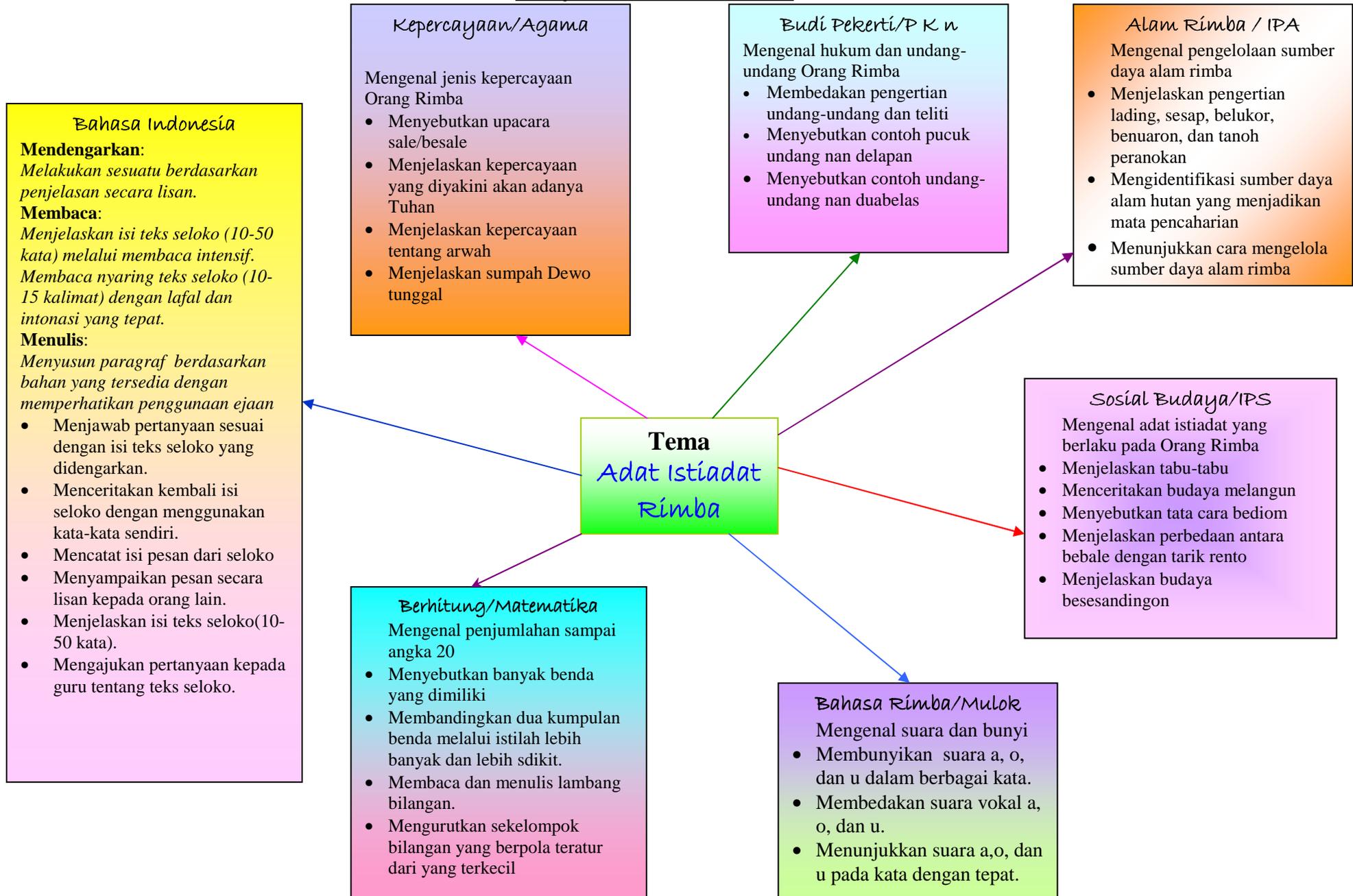


SILABUS PEMBELAJARAN TEMATIK
TEMA: LINGKUNGAN RIMBA

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	KEGIATAN PEMBELAJARAN	ALKS WAKTU	SARANA DAN SUMBER	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Mengetahui pentingnya lingkungan alam rimba	<ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan sikap kepedulian terhadap kelestarian lingkungan alam rimba Menceritakan pentingnya memelihara lingkungan alam rimba Menceritakan akibat jika tidak memelihara lingkungan alam rimba 	<ul style="list-style-type: none"> Mengamati gambar orang yang bersikap menjaga lingkungan hutan Bertanya jawab tentang makna gambar. Berdiskusi tentang sikap kepedulian terhadap lingkungan alam rimba Menjelaskan sikap kepedulian terhadap kelestarian lingkungan alam rimba Menceritakan pentingnya memelihara lingkungan alam rimba Menceritakan akibat jika tidak memelihara lingkungan alam rimba 	2 minggu	<ul style="list-style-type: none"> Standar Isi 2006 SD Mata Pelajaran Agama, PKn, IPS, Bhs Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, Matematika dan Mulok. Bahan Ajar/Buku siswa Pembelajaran Terpadu dengan Pendekatan Tematik. Buku Kerja Kelas IIA mata pelajaran Bhs Indonesia, IPA, IPS dan Matematika. Buku bahan ajar lain yang relevan untuk Mapel Agama, PKn, IPS, Bhs Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, Matematika dan Mulok 	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian Obyektif. Penilaian Subyektif. Penilaian Lisan. Penilaian Unjuk Kerja. Penilaian Produk. Penilaian Portofolio Penilaian Tingkah laku. Penilaian Buku Kerja Tematik Mengamati dan mencatat kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran Mencatat aktivitas siswa dalam merespon pertanyaan Mengamati aktivitas siswa dalam merespon pertanyaan guru Mengamati dan menilai siswa dalam mengungkapkan perasaannya dalam bercerita. Mengamati dan menilai sikap perilaku siswa dalam menceritakan isi teks/bacaan
IPS Menceritakan hal-hal penting yang berhubungan dengan lingkungan alam rimba	<ul style="list-style-type: none"> Menyebutkan jenis-jenis lingkungan rimba Menceritakan manfaat lingkungan rimba Menceritakan dampak penebangan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> Mengamati gambar lingkungan alam dan buatan Berdiskusi tentang sikap dan perilaku dalam menjaga lingkungan rimba Menyebutkan tata cara berperilaku terhadap alam rimba 			
MATEMATIKA Mengukur berat benda	<ul style="list-style-type: none"> Mengukur berat benda dengan menggunakan satuan tidak baku Mengukur berat benda dengan menggunakan satuan baku. Mengurutkan ukuran anak timbangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengukur berat benda dengan menggunakan satuan tidak baku Mengukur berat benda dengan menggunakan satuan baku. Mengurutkan ukuran anak timbangan. 			
AGAMA Mengetahui kepercayaan Orang Rimba	<ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan mitologi penciptaan Membedakan halom nio dan halom Deo Menyebutkan Dewo-Dewo Orang Rimba 	<ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan mitologi penciptaan Membedakan halom nio dan halom Deo Menyebutkan Dewo-Dewo Orang Rimba 			

<p>IPA</p> <p>Mengidentifikasi tempat hidup makhluk hidup.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan kosakata sains untuk menjelaskan nama benda, makhluk hidup dan fenomena alam. • Membedakan natong baik dan natong jheik 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan kosakata sains untuk menjelaskan nama benda, makhluk hidup dan fenomena alam. • Mengungkapkan gagasan secara lisan tentang jenis-jenis hewan rimba • Bekerjasama dengan teman. • Memberi tanggapan secara santun. 			
<p>BI</p> <p>Mendengarkan: Mendeskripsikan isi seloko Bercicara: Menceritakan isi seloko dengan ekspresi yang tepat. Membaca: Menjelaskan isi seloko anak yang dibaca. Menulis: Menulis kalimat seloko sederhana yang didiktekan guru</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menjawab pertanyaan tentang wacana lingkungan rimba • Menjelaskan isi wacana tentang lingkungan rimba. • Menggunakan kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu dengan pilihan kata yang tepat. • Menanyakan atau menanggapi pengalaman sehari-hari • Membaca teks seloko dengan lafal dan intonasi yang tepat. • Menceritakan isi teks seloko yang dibaca menggunakan kalimat atau kata-kata sendiri. • Menulis pengalaman sehari-hari • Menulis kalimat seloko sederhana yang didiktekan guru 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjawab pertanyaan tentang wacana lingkungan rimba • Menjelaskan isi wacana tentang lingkungan rimba • Menggunakan kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu dengan pilihan kata yang tepat. • Menanyakan atau menanggapi pengalaman sehari-hari • Membaca teks seloko dengan lafal dan intonasi yang tepat. • Menceritakan isi teks seloko yang dibaca menggunakan kalimat atau kata-kata sendiri. • Menulis pengalaman sehari-hari • Menulis kalimat seloko sederhana yang didiktekan guru 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lingkungan sekitar (sesudung, serombong, seladang) 	
<p>MULOK</p> <p>Menyimak (Nganing)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu menyimak (nganing, memahami, serta menanggapi berbagai jenis bunyi bahasa, seloko, dan mantera-mantera <p>Menulis (Nuliy)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu menulis, mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara tertulis 	<p>Menyimak (Nganing)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu menyimak (nganing, memahami, serta menanggapi berbagai jenis bunyi bahasa, seloko, dan mantera-mantera <p>Menulis (Nuliy)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu menulis, mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara tertulis 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyimak dan menanggapi dengan perbuatan • Murid menyimak wacana "seloko" dengan sikap yang baik • Murid menyebutkan kegiatan yang dilakukan seseorang di dalam gambar-gambar • Murid menunjukkan nama-nama bagian tubuh manusia • Murid menyebutkan fungsi nama-nama bagian tubuh manusia yang terdapat di dalam gambar • Murid dapat menyebutkan cara membaca yang benar yang terdapat di dalam gambar 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buku <i>Bahasa Rimba</i> 	

Kompetensi Dasar/Indikator



SILABUS PEMBELAJARAN TEMATIK
TEMA: ADAT ISTIADAT ORANG RIMBA

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	KEGIATAN PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	SARANA DAN SUMBER	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
<p>PKn Membedakan pengertian undang-undang dan teliti</p> <p>Menyebutkan contoh pucuk undang nan delapan</p> <p>Menyebutkan contoh undang-undang nan duabelas</p> <p>BAHASA INDONESIA</p> <p>Mendengarkan Melakukan sesuatu berdasarkan penjelasan secara lisan.</p> <p>Membaca Menjelaskan isi teks (10-15 kata) melalui membaca intensif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan <i>adat besendi sara, sara besendi kitabullah</i> Menyebutkan lima macam induk undang-undang Menjelaskan jenis pucuk undang nan delapan yang terdiri dari <i>dago dagi, sumbang salah, samun sakal, upas racun, siur bakar, tipu tepok, maling curi, dan tikam bunuh</i> Menjelaskan pelaksanaan aturan-aturan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat Orang Rimba yang dikenal dengan lembah balu ditepung tawar, terdiri dari luka lukis bangun, luka rendah, luka tinggi, luka parah, dan mati dibangun Menjawab pertanyaan sesuai dengan isi teks seloko yang didengarkan. Menceritakan kembali seloko dengan menggunakan kata-kata sendiri. Mencatat isi pesan dari seloko Menyampaikan pesan secara lisan kepada orang lain. Menjelaskan isi teks (10-50 kata). Mengajukan pertanyaan kepada guru tentang teks seloko Menjelaskan isi teks (10-15 kata) melalui membaca intensif. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengamati kegiatan adat Orang Rimba Mengidentifikasi contoh-contoh undang-undang di lingkungan Orang Rimba Menceritakan penerapan undang-undang dalam kehidupan sehari-hari Mengamati pererapan aturan/norma di lingkungan Orang Rimba Mengidentifikasi contoh-contoh aturan/norma di lingkungan masyarakat Orang Rimba Mengamati penerapan aturan/norma dalam lingkungan keluarga. Membedakan penerapan aturan/norma yang berlaku di masyarakat.Orang Rimba Melaksanakan aturan/norma dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Mendengarkan cerita dari guru maupun dari teman tentang seloko Menjawab pertanyaan tentang teks seloko yang didengar. Menceritakan kembali seloko yang telah didengarnya dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Mendengarkan informasi dari guru tentang seloko Menuliskan seloko yang didengar. Menjelaskan isi seloko kepada orang lain.dengan menggunakan kata-kata sendiri. Mendengarkan seloko yang disampaikan . Bertanya jawab tentang isi seloko dalam teks. Mendengarkan isi bacaan berdasarkan teks seloko Membaca isi teks seloko dengan bacaan dan intonasi yang tepat. Menjelaskan isi teks seloko sesuai dengan pemahaman sendiri. 	2 minggu	<ul style="list-style-type: none"> Bahan ajar/buku pembelajaran terpadu dengan pendekatan tematik Buku bahan ajar lain yang relevan untuk Mata pelajaran Agama, IPS, Bhs Indonesia, IPA, PKn Matematika, dan Mulok <p>Buku bahan ajar lain yang relevan untuk Mata pelajaran Agama, IPS, Bhs Indonesia, IPA, dan Mulok</p>	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian tingkah laku/pengamatan. Penilaian unjuk Kerja. Penilaian sikap dan tingkah laku serta unjuk kerja Penilaian tingkah laku/pengamatan.

1	2	3	4	5	6
<p>Membaca nyaring teks (20-25 kalimat) dengan lafal dan intonasi yang tepat.</p> <p>Menulis Menyusun paragraf berdasarkan bahan yang tersedia dengan memperhatikan penggunaan ejaan.</p> <p>AGAMA: Menenal jenis kepercayaan Orang Rimba</p> <p>IPA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan pengertian lading, sesap, belukor, benuaron, dan tanoh peranokan • Mengidentifikasi sumber daya alam hutan yang dapat dijadikan mata pencaharian • Menunjukkan cara mengelola sumber daya alam rimba 	<ul style="list-style-type: none"> • Membaca nyaring teks (10-15 kalimat) dengan lafal dan intonasi yg tepat. • Menulis paragraf berdasarkan bahan yang diterima. • Menyebutkan upacara sale/besale • Menjelaskan kepercayaan yang diyakini akan adanya Tuhan • Menjelaskan kepercayaan tentang arwah • Menjelaskan sumpah Dewo tunggal. • Mengidentifikasi lading yang dapat dijadikan tempat mata pencaharian • Membicarakan suatu topik berdasarkan mata pencaharian • Melakukan pengamatan obyek lading, sesap, belukor, benuaron, dan tanoh peranokan berdasarkan ciri-ciri fisiknya. • Menceritakan hasil pengamatan secara lisan atau menggunakan gambar. • Mengidentifikasi berburu, meramu, mengumpul, dan berladang • Membandingkan beberapa sumber daya alam rimba • Memberi makna pada hasil pengamatan. • Menggunakan informasi dari hasil pengamatan untuk menjawab pertanyaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan pertanyaan tentang teks seloko • Membaca isi teks seloko • Mengamati kegiatan sehari-hari. • Berdiskusi dengan teman tentang kegiatan sehari-hari. • Menuliskan paragraf kegiatan sehari-hari dengan bahasa sendiri yang mudah dipahami. • Mengamati berbagai upacara adat Orang rimba • Mengelompokkan bahan sesaji yang digunakan dalam upacara • Berdiskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan • Mencari informasi tentang adat istiadat • Mengamati suasana kelas tentang suatu topik. • Mendengarkan informasi tentang suatu topik . • Berbicara tentang topik yang dibahas. • Mengajukan pertanyaan. • Mengamati berbagai obyek. • Berdiskusi tentang obyek/topik yang diamati. • Bercerita tentang obyek . • Mencari informasi dari nara sumber, buku, atau gambar. • Menyimak informasi tentang sumber daya alam rimba • Mengidentifikasi jenis sumber daya alam • Mengamati perubahan yang dapat terjadi pada mahluk hidup jika sumber daya alam tidak dikelola dengan baik 			<p>Penilaian portofolio dan produk.</p> <p>Penilaian unjuk kerja dan produk.</p>

1	2	3	4	5	6
<p>MATEMATIKA Mengetahui penjumlahan sampai angka 20</p> <p>MULOK Mengetahui suara dan bunyi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyebutkan banyak benda yang dimiliki • Membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah lebih banyak dan lebih sedikit.ari yang terkecil • Membaca dan menulis lambang bilangan • Mengurutkan sekelompok bilangan yang berpola teratur d <ul style="list-style-type: none"> • Membunyikan suara a, o, dan u dalam berbagai kata-kata rimba • Membedakan suara vocal a, o, dan u. • Menunjukkan suara a, o, dan u pada kata yang tepat 	<ul style="list-style-type: none"> • Membaca soal. • Menuliskan lambang bilangan dengan kata-kata dan angka sampai angka 20 • Mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar sampai angka 20 • Menjumlahkan benda yang ada sampai angka 20 <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan gerakan latihan suara • Melakukan gerakan latihanvokal a, o, dan u • Mempraktekkan bunyi suara dengan kata-kata rimba yang menggunakan a, o, dan u. 			

